



# EQUITY

*Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*

**CATUR PURUSA ARTHA LENA DEKONSTRUKSI DEFINISI PAJAK YANG  
BERKEADILAN**

*I Nyoman Darmayasa, Yuyung Rizka Aneswari*

**PENERAPAN AKUNTANSI, AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL  
PADA GEREJA KRISTEN JAWA WEDI**

*Wahyu Jati Agung Prabowo, Lulus Kurniasih*

**RASIO KEUANGAN DALAM MEMREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN  
PERTAMBANGAN BATUBARA**

*Eva Lisnawati Sidabalok, Dwi Risma Deviyanti, Yoremia Lestari Ginting*

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN BAGI PARA "PENDOSA"**

*Sudrajat Martadinata, Arya Zulfikar Akbar*

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, PENEKANAN ANGGARAN, DAN  
KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN PADA SUKU  
DINAS PEMERINTAHAN DI DKI JAKARTA**

*I Gede Eka Dharma Putra, Danang Mintoyuwono*

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS, LEVERAGE, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN  
TERHADAP PENGUNGKAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)**

*Jetmi Ade Cecasmi, Samin*

Diterbitkan Oleh:

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta**

ISSN 0216-8545



9 770216 854537

# EQUITY

*Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*

## PENGELOLA JURNAL

### Pelindung

Rektor UPN "Veteran" Jakarta  
Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc., Eng

### Penanggungjawab

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dr. Prasetyo Hadi, SE, MM, CFMP

### Ketua Dewan Redaksi

Satria Yudhia Wijaya, M.S.Ak

### Penyunting Ahli

Dr. Ni Putu Eka Widiastuti, SE, M.Si, CSRS

### Anggota Penyunting

Toni Priyanto, SE, MM, SAS  
Ayunita Ajengtyas SM, SE, M.Accy, M.Comm

### Desain Grafis

Krisno Septyan, SE, M.S.Ak

### Fotografer

Heru Setiawan

### Sekretariat

Nanik Hartatik, SE, MM

### Alamat Penerbit :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UPN "Veteran" Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu,  
Jakarta Selatan 12450  
Telp. 021-7656971 ext.146

Homepage : <http://www.fe.upnvj.ac.id>

Email : [equity.feupnvj@gmail.com](mailto:equity.feupnvj@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Pembaca yang budiman,

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya maka Jurnal EQUITY (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Jakarta Volume 20 No.2 Periode Juli-Desember 2017 telah terbit.

Pada edisi ini memuat berbagai tulisan ilmiah yang dihimpun dari berbagai penelitian yang telah dilakukan. Artikel yang berhasil diterbitkan pada edisi ini berasal dari beberapa perguruan tinggi, antara lain : Politeknik Negeri Bali, Universitas Sebelas Maret, STIE Kesuma Negara Blitar, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Teknologi Sumbawa, Universitas Mulawarman Samarinda dan UPN "Veteran" Jakarta. Redaksi EQUITY senantiasa terus meningkatkan kualitas pengelolaan jurnalnya dengan cara melakukan review atas artikel yang diterima, komposisi penulis lebih diutamakan dari pihak eksternal, dan memperbaharui desain/tampilan pada jurnal ini.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Dikti No. 49/DIKTI/Kep/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, maka penerbitan Jurnal EQUITY diarahkan untuk mendapatkan akreditasi oleh pihak Dirjen Dikti. Redaksi secara bertahap akan memenuhi ketentuan yang ada pada peraturan tersebut untuk mendapatkan akreditasi terbitan berkala ilmiah. Hal ini sejalan dengan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang penelitian melalui publikasi ilmiah untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Sebagai salah satu media komunikasi dan informasi ilmiah dalam bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi, maka Redaksi EQUITY mengharapkan partisipasi dan peran aktif pembaca dalam rangka mewujudkan visi misi UPN "Veteran" Jakarta menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum, Inovatif, dan Berdaya Saing Yang Berwawasan Bela Negara. Selamat membaca.

## DAFTAR ISI

<b>CATUR PURUSA ARTHA LENSEA DEKONSTRUKSI DEFINISI PAJAK YANG BERKEADILAN</b> <i>I Nyoman Darmayasa, Yuyung Rizka Aneswari</i> .....	1
<b>PENERAPAN AKUNTANSI, AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA GEREJA KRISTEN JAWA WEDI</b> <i>Wahyu Jati Agung Prabowo, Lulus Kurniasih</i> .....	17
<b>PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA</b> <i>Eva Lisnawati Sidabalok, Dwi Risma Deviyanti, Yoremia Lestari Ginting</i> .....	31
<b>BAGI PARA “PENDOSA”</b> <i>Sudrajat Martadinata, Arya Zulfikar Akbar</i> .....	45
<b>PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, PENEKANAN ANGGARAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN PADA SUKU DINAS PEMERINTAHAN DI DKI JAKARTA</b> <i>I Gede Eka Dharma Putra, Danang Mintoyuwono</i> .....	59
<b>PENGARUH DEWAN KOMISARIS, LEVERAGE, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)</b> <i>Jetmi Ade Cecasmi, Samin</i> .....	75

# **CATUR PURUSA ARTHA LENSE DEKONSTRUKSI DEFINISI PAJAK YANG BERKEADILAN**

**I Nyoman Darmayasa<sup>1)</sup>  
Yuyung Rizka Aneswari<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, Jalan Kampus Bukit Jimbaran,  
Kuta Selatan, Badung, Bali, 80364<sup>1)</sup>

<sup>2)</sup>Akuntansi, STIE Kesuma Negara Blitar, Jalan Mastrip No.59,  
Kepanjen Kidul, Blitar, Jawa Timur, 66111<sup>2)</sup>

nyomandarmayasa@pnb.ac.id<sup>1)</sup>

## ***Abstract.***

***Catur Purusa Artha Lens of Deconstruction Equitable Tax Definition.*** *The study aims to deconstruct the definition of tax with Catur Purusa Artha (CPA) lens. Research using postmodern paradigm focused on modernity disagreement of tax definition based on act. Tax definition for the result of deconstruction namely Dharma in the form of funds contribution that conducted sincerely from individual's or entity's Artha to the state which will be distributed based on Kama for the purposes of the state for the welfare of the people. The essence of the deconstruction definition provide a sense of equitable and stimulation of tax compliance.*

***Key word:*** *Catur Purusa Artha (CPA), Deconstruction Tax Definition, Equitable, Tax Compliance, Local Wisdom, Postmodern*

## ***Abstrak***

***Catur Purusa Artha Lensa Dekonstruksi Definisi Pajak Yang Berkeadilan.*** *Penelitian bertujuan mendekonstruksi definisi pajak dengan lensa Catur Purusa Artha (CPA). Penelitian menggunakan paradigma postmodern fokus pada ketidaksetujuan modernitas definisi pajak berdasarkan UU. Definisi pajak hasil dekonstruksi yaitu pajak merupakan Dharma dalam bentuk kontribusi uang yang dilakukan secara tulus ikhlas yang berasal dari Artha orang pribadi atau badan kepada negara yang didistribusikan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berlandaskan Kama. Esensi definisi pajak hasil dekonstruksi memberikan rasa keadilan dan stimulasi kepatuhan pajak.*

***Kata kunci:*** *Catur Purusa Artha (CPA), Dekonstruksi Definisi Pajak, Keadilan, Kepatuhan Pajak, Kearifan Lokal, Postmodern*

## **1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN Indonesia. Sehingga pemberian definisi yang tepat terhadap pajak merupakan hal yang penting. Melalui definisi akan membawa arah pemaknaan pada masing-masing individu sebagai Wajib Pajak (WP). Definisi pajak merupakan cerminan mengenai sifat, tujuan, dasar, dan mekanisme pemungutan pajak. Makna yang dipahami oleh WP tersebut akan sangat berpengaruh besar dalam pilihan tindakan WP untuk mematuhi regulasi perpajakan atau sebaliknya.

Definisi pajak telah dituangkan dalam UU No. 28 tahun 2007<sup>1</sup>. Namun definisi ini perlu dikaji secara mendalam, sebab definisi yang tertuang dinilai sarat dengan unsur modernitas. Definisi pajak ini lebih menekankan pada aspek materialisme yang mengarusutamakan uang, hanya untuk tujuan ekonomi yakni memperoleh penerimaan pajak sebesar-besarnya. Definisi tersebut juga menunjukkan esensi adanya pemaksaan dalam pemungutannya.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang harus dipungut sesuai dengan aturan yang jelas. Artinya semua pemungutan pajak tertuang dalam aturan yang diformulasikan dalam undang-undang dan segala aturan pelaksanaannya. Sesuai dengan pernyataan *No Taxation Without Representation* dan *Taxation Without Representation is Robbery*. Artinya segala pungutan yang kaitannya dengan pajak harus diatur dengan jelas dan yang paling utama definisi pajak juga harus tertera dengan jelas. Pajak yang dipungut tanpa adanya aturan dapat disamakan sebagai pungutan liar (Aneswari, Darmayasa, dan Yusdita 2015).

Mengutip Franklin (1706-1790)<sup>2</sup> bahwa “satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah kematian dan pajak”. Pajak disamakan dengan kematian, sebab kematian adalah sesuatu yang tak dapat dihindari, begitu pula dengan pajak. Pandangan tersebut memberikan arti, bahwa kita tidak bisa menghindar untuk bayar pajak. Segala aktivitas yang ada nilai tambahnya merupakan objek pajak. Setiap kegiatan ekonomi ada potensi pajak yang harus dibayar, setiap tambahan kemampuan ekonomis menjadi objek pajak yang diatur dalam hukum pajak materiil yaitu UU PPh<sup>3</sup>. Sedangkan, tata cara melaksanakan hukum materiil diatur dalam hukum pajak formil. Melalui hukum pajak formil yang terdapat dalam UU KUP<sup>4</sup> (Mardiasmo 2013:5) untuk pertama kalinya memuat tentang definisi pajak.

Definisi pajak saat ini lebih menekankan pada aspek pemaksaan. Pemaksaan otoritas perpajakan diibaratkan seperti penguasa yang bisa memaksa WP untuk membayar pajak. Beberapa pihak telah mulai merasakan pentingnya untuk melakukan dekonstruksi definisi pajak. Salah satunya melalui kongres pajak sedunia sebagaimana tertulis dalam Rosdiana dan Irianto (2014:2) pada bulan September 2005 yang diselenggarakan di Buenos Aires, Argentina. Hasil kongres pajak tersebut menghasilkan diskursus-diskursus yang berkembang untuk merekonstruksi definisi pajak.

Artikel maupun penelitian yang mengajukan sebuah konsep dekonstruksi definisi pajak relatif sedikit. Sebab definisi pajak terutama yang telah tertuang dalam UU dianggap sebagai sesuatu yang telah mapan dan hanya perlu diikuti dan ditaati.

---

<sup>1</sup> Definisi Pajak sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

<sup>2</sup> Benjamin Franklin adalah seorang tokoh Amerika Serikat yang terkenal dan telah meninggalkan banyak karya di dalam hidupnya, lahir pada 17 Januari 1706 di Boston dan meninggal pada 17 April 1790 di Philadelphia.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU PPh.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU KUP.

Sedangkan menurut kami penting untuk melakukan kritik atas sesuatu meskipun telah mapan dan diikuti banyak orang. Meskipun telah ada beberapa upaya dari beberapa pihak untuk mendekonstruksi definisi pajak hingga menghasilkan wacana definisi pajak baru, namun hasil dekonstruksi dinilai belum menghasilkan suatu konsep yang bebas dari modernitas dengan pengarusutamaan materialisme sebagai satu cirinya.

Belum ada penelitian yang mengungkap atau menggali bahwa definisi pajak akan berimplikasi terhadap penyusunan sistem dan kebijakan perpajakan, yang bermuara kepada praktik perpajakan baik oleh DJP maupun oleh WP. Penelitian sebelumnya lebih menekankan kepada penggalian kenapa WP tidak mau membayar pajak, hal ini hanya merupakan hilir dari suatu proses penelitian. Penelitian ini mencoba untuk menggali akar permasalahan tersebut, dengan menarik ke atas dari tataran praktik, kemudian menuju tataran konsep, selanjutnya ke arah tataran pemikiran dan berlabuh pada tataran filosofi dalam penyusunan sistem dan kebijakan perpajakan di Indonesia.

Asumsi yang perlu dipahami dalam artikel ini bahwa fitrah manusia adalah taat pada Tuhan (*divine consciousness*). Bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk menaati aturan agama. Religiusitas seseorang akan terlihat dari perilaku sosialnya (Brañas-garza, Espín, dan Neuman 2013). Hal ini dapat direfleksikan dalam kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Torgler 2003). Bahkan religiusitas juga akan nampak dalam praktik profesional konsultan pajak yang akan mampu meningkatkan kepatuhan pajak kliennya (Darmayasa dan Aneswari 2015).

Mengacu pada beberapa penelitian yang menggunakan perspektif nilai kearifan lokal Hindu mengenai perpajakan seperti yang dilakukan oleh Budiasih (2014) dan Widiastuti, Sukoharsono, Irianto, dan Baridwan (2015). Maka artikel ini akan mengambil salah satu *value* dalam kearifan lokal Hindu-Bali yang menjadi budaya sekaligus religiusitas bagi penganutnya. Sebuah budaya dan agama merupakan hal yang tak nampak, namun wujud dari nilai yang terkandung dalam budaya dan agama dapat dirasakan melalui manifestasi tindakan pemilik atau penganut budaya dan agama tersebut.

Kami menyadari bahwa diskusi perpajakan dikaitkan dengan keyakinan seseorang merupakan hal yang berat. Sebab religiusitas akan berkaitan dengan kepercayaan. Namun penting untuk dipahami sebelumnya bahwa diskusi ini akan mengacu dan mengarah pada nilai Hindu yang diarahkan pada konteks perpajakan Nasional. Beberapa penelitian perpajakan yang menggunakan nilai lokal Hindu-Bali belum ada yang menggali mengenai ketidakadilan yang tertuang dari definisi pajak. Sehingga dengan menggunakan nilai lokal Hindu-Bali *Catur Purusa Artha* sebagai lensa untuk membaca sebuah teks, dalam hal ini definisi pajak berdasarkan UU. Maka artikel ini bertujuan untuk mendekonstruksi definisi pajak tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Paradigma dari suatu penelitian merupakan hal yang penting, sebab paradigma adalah penunjuk arah bagaimana sebaiknya peneliti memperoleh kebenaran dan ilmu

pengetahuan melalui penelitiannya. Sesuai dengan pandangan Triyuwono (2006) bahwa paradigma dalam penelitian adalah cara pandang mengenai dunia atau *worldview*. Sebagai cara pandang, maka paradigma ini berjalan secara *inline* dengan apa yang menjadi keyakinan peneliti. Tanpa melepas konsep bahwa paradigma harus sesuai dengan apa yang diteliti, artinya disesuaikan dengan ontologi serta epistemologi penelitiannya.

Paradigma *postmodern* merupakan paradigma yang tidak setuju dengan modernitas. Ciri utama *postmodern* yang merupakan logosentrisme, dalam hal ini ditunjukkan dalam definisi pajak berdasarkan UU KUP yang dinilai sarat dengan nilai modernitas yakni semangat materialisme yang tinggi dan tidak menunjukkan keadilan atau bersifat pemaksaan. Gerakan *postmodern* dinilai mengadopsi banyak pemikiran atau cara pandang seperti interpretif atau kritis dengan segala cabang pemikirannya. Sehingga *postmodern* dinilai tidak memiliki bentuk yang jelas, namun ketidakjelasan bentuknya inilah merupakan bentuk asli *postmodern* (Triyuwono 2011).

Terdapat banyak budaya Bali yang bisa digunakan sebagai alat analisis sebuah penelitian sebagaimana dijelaskan dalam artikel Kamayanti (2015). Filosofi Hindu-Bali yang kami gunakan dalam penulisan artikel ini yakni *Catur Purusa Artha* (CPA). CPA kami gunakan dalam penulisan artikel ini dengan keyakinan bahwa CPA adalah lensa yang tepat untuk mendekonstruksi definisi pajak saat ini yang tidak berkeadilan. CPA merupakan empat tujuan hidup umat Hindu. Melalui empat prinsip yang terkandung dalam CPA yakni *Dharma*<sup>5</sup>, *Artha*<sup>6</sup> dan *Kama*<sup>7</sup> umat Hindu mencapai tujuan hidupnya yaitu *Moksa*<sup>8</sup>, selanjutnya filosofi CPA ini kami hubungkan ke dalam ranah perpajakan.

Kami memahami bahwa pajak merupakan salah satu mekanisme pemerintahan paling utama yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Definisi pajak saat ini kami nilai sarat dengan unsur materialitas dan meniadakan Tuhan. Hal ini merupakan cerminan modernitas yang memarjinalkan nilai-nilai lokal dengan mengarusutamakan materi dan meniadakan keberadaan Tuhan (Djamhuri 2011; Mulawarman 2006).

Bahkan definisi pajak berdasarkan UU KUP saat ini juga tidak menunjukkan keadilan sebagaimana yang telah menjadi asas dalam perpajakan. Ketidakadilan tercermin dari definisi pajak yang memberikan kewenangan kepada DJP untuk memungut pajak dengan cara memaksa dan ketidakadilan lainnya adalah WP tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Definisi pajak yang tidak menyentuh hati WP bahkan terkesan tidak memihak pada mereka dengan menimbulkan asumsi ketidakadilan akan diabaikan oleh WP, sehingga definisi tersebut sebaiknya didekonstruksi.

---

<sup>5</sup> *Dharma* adalah tujuan hidup umat Hindu yang pertama. Umat Hindu harus melaksanakan semua kegiatannya dengan landasan ajaran agama Hindu yakni kebenaran, kesetiaan, kejujuran, dan hukum.

<sup>6</sup> *Artha* adalah tujuan hidup umat Hindu yang kedua. *Artha* merupakan harta benda, kekayaan, uang dan benda-benda lainnya. *Artha* yang dimaksud harus diperoleh dengan jalan *Dharma*. *Artha* yang diperoleh dimanfaatkan sesuai dengan jalan *Dharma*.

<sup>7</sup> *Kama* adalah tujuan hidup umat Hindu yang ketiga. *Kama* adalah keinginan jasmani dan rohani

<sup>8</sup> *Moksa* merupakan tujuan hidup ke empat umat Hindu. *Moksa* merupakan tujuan yang paling tinggi, hakikat, dan mulia. *Moksa* atau kelepasan adalah kebebasan dari kelahiran kembali atau bersatunya *Atman* dengan *Brahman* (Tuhan). Dengan tercapainya *Moksa*, maka orang akan terbebas dari hukum *karmapala*, terbebas dari penjelmaan kembali secara berulang-ulang, terbebas dari *punarbawa* atau reinkarnasi

Dekonstruksi merupakan cara memahami atau membaca teks untuk memberikan konsep baru pada teks yang telah dibaca. Dekonstruksi merupakan suatu metode yang menggabungkan sesuatu yang merupakan pusat (logosentris) dengan sesuatu lainnya sehingga menghasilkan yang baru. Dalam hal ini definisi pajak berdasarkan UU KUP adalah logosentrisnya. Sehingga dekonstruksi ibarat menggabungkan hidrogen dengan oksigen sehingga menjadi air (Triuwono 2015).

Dekonstruksi definisi pajak dalam artikel ini dilakukan dengan lensa CPA melalui analisa berdasarkan konsep yang ada dalam CPA, yakni *Dharma, Artha, Kama, dan Moksa*. Definisi pajak berdasarkan UU KUP akan dinilai apakah telah sesuai dengan empat *value* CPA tersebut. Sehingga hasil dekonstruksi pajaknya adalah memasukkan empat *value* tersebut sebagai alat untuk memasukkan misi keadilan dalam definisi pajak yang baru dengan menghilangkan unsur pemaksaan dan menghilangkan konsep yang secara eksplisit menunjukkan pengarusutamaan material.

Artikel ini mencoba menyajikan hasil dekonstruksi sekaligus memberi wacana mengenai berbagai pendapat dari informan mengenai definisi pajak dari sudut pandang keadilan baik yang menunjukkan pro maupun kontra. Tujuannya adalah memberi keleluasaan bagi pembaca untuk setuju atau tidak dengan segala konsep pemikiran yang kami ajukan dalam artikel ini. Sehingga penelitian juga dilakukan melalui wawancara untuk menggali pemahaman serta pemikiran dari berbagai pihak.

Informan penelitian difokuskan kepada informan yang beragama Hindu yang terkait dengan praktik perpajakan. Informan penelitian berlatar belakang akademisi, konsultan pajak dan WP dengan pertimbangan pihak-pihak tersebut yang merasakan ketidakadilan dari definisi pajak. Penelitian ini tidak menyertakan informan dari DJP sebab ketidakadilan definisi pajak tidak dirasakan oleh DJP. Keadilan menurut perspektif DJP sangat berbeda dengan perspektif WP, konsultan pajak maupun akademisi. Informasi mengenai informan penelitian, keterkaitan informan dengan praktik perpajakan beserta waktu wawancara disajikan pada Tabel 1.

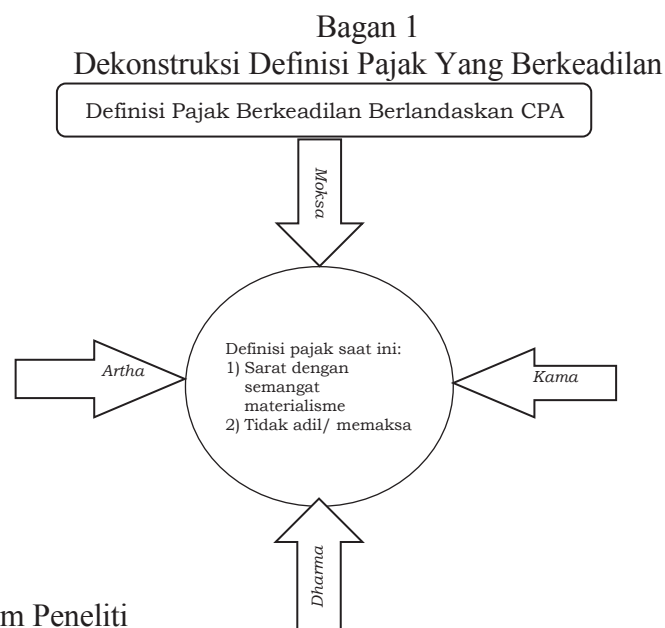
Tabel 1  
Daftar Informan

No	Subjek Informan	Keterangan	Waktu
1	Bapak Made Bagiada	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)	Diskusi informal mengenai perkembangan usaha untuk menyambut tahun 2016, pada Kamis, 31 Desember 2015
2	Bapak Made Arnaya	Akuntan dan Konsultan Pajak	Diskusi informal pada saat membahas perkembangan profesi akuntan dan konsultan pajak pada Kamis, 14 Januari 2016
3	Bapak Nyoman Sugianta	Konsultan Pajak yang Kesehariannya sebagai pemimpin upacara umat Hindu	Diskusi informal pada saat membahas <i>Corporate Tax Planning</i> pada Selasa, 2 Februari 2016
4	Bapak Made Sedana Yasa	Akademisi (Dosen Pengampu Perpajakan)	Diskusi informal pada Senin, 22 Februari 2016

Sumber: Tim Peneliti



Pengumpulan data dan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan sepanjang proses penelitian. Data hasil wawancara selanjutnya disusun dalam tema-tema yang sesuai dengan empat tujuan hidup CPA yaitu: *Dharma*, *Artha*, *Kama*, dan *Moksa*. Tema-tema yang sudah disesuaikan dengan CPA bertujuan untuk memudahkan dekonstruksi definisi pajak yang tidak berkeadilan. Penyusunan tema-tema tidak bertujuan untuk membahas dekonstruksi definisi secara parsial namun sebaliknya mendekonstruksinya secara holistik. Definisi pajak sesuai dengan UU KUP yang mengandung ketidakadilan selanjutnya berdasarkan tema-tema yang telah disusun didekonstruksi pada bagian-bagian yang mengandung ketidakadilan. Proses dekonstruksi definisi pajak yang tidak berkeadilan dengan memasukkan nilai-nilai *Artha* dan *Kama* yang berlandaskan *Dharma* untuk mewujudkan definisi pajak yang berkeadilan disajikan dalam Bagan 1.



Sumber: Tim Peneliti

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Definisi Pajak yang Tidak Berkeadilan.** Sebelum melakukan proses dekonstruksi definisi pajak, penting untuk menyisir sisi ketidakadilan definisi pajak yang telah diterapkan selama ini. Perlu dilakukan upaya untuk mendekonstruksi definisi pajak tersebut. Meskipun definisi pajak tersebut telah mapan dan disepakati oleh banyak pihak bahkan telah dilegitimiasi dalam UU KUP. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa upaya untuk melakukan dekonstruksi pajak ini telah dilakukan melalui sebuah kongres pajak sedunia yang mengusulkan beberapa wacana definisi pajak yang baru yang mengarahkan pada semangat keadilan dan membangun kepatuhan pajak. (Rosdiana dan Irianto 2014:2).

Menjadi suatu pertanyaan besar kenapa definisi pajak yang terdapat dalam UU KUP mengandung ketidakadilan bagi WP. Padahal keadilan merupakan asas dalam pemungutan pajak, seperti yang diungkapkan oleh Rosdiana dan Irianto (2014:161-162) bahwa pemungutan pajak dikatakan adil jika memenuhi keadilan horizontal dan vertikal. Hal senada juga diungkapkan oleh Plasschaert (1988:105) bahwa sistem pajak dikatakan berhasil jika WP merasa yakin terhadap pajak yang dipungut

pemerintah yang dikenakan secara adil. Keadilan horizontal terjadi apabila WP yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for the equals*). Sedangkan keadilan vertikal terpenuhi apabila WP yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama (Rosdiana dan Irianto 2014:161-163).

Beberapa ahli juga mengajukan pendapat definisi pajak, namun pada konsep tersebut masih melekat semangat materialisme dan ketidakadilan di dalamnya. Pandangan yang diungkapkan oleh Soemitro dan Sugiharti (2010:31) bahwa pajak merupakan pungutan atau peralihan kekayaan dari rakyat kepada penguasa tanpa ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi penghasilan individu yang tidak ada imbalannya, sehingga mengurangi harta WP, dan dengan sendirinya mengurangi daya belinya. Jika daya beli berkurang, maka hal ini berarti mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Terdapat pendapat berbeda dari informan kami mengenai sudut pandang keadilan definisi pajak berkaitan dengan tidak adanya imbalan langsung dari pajak yang telah dipotong. Pendapat Bapak Sedana Yasa menyatakan sebagai berikut:

*“Ya, karena imbalan yang diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan seluruh masyarakat”*

Meskipun dalam definisi pajak tertera jelas bahwa WP tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, namun mekanisme ini tetaplah adil menurut Bapak Sedana Yasa. Sebab konsep “imbalan” menurut bapak Sedana Yasa merupakan bentuk distribusi yang merata bagi kepentingan banyak pihak.

Bapak Made Arnaya terlihat berpikir sejenak dalam memberikan tanggapannya perihal tidak adanya imbalan secara langsung. Menurut Bapak Made Arnaya memang WP tidak mendapat imbalan secara langsung dari pajak yang dibayarkannya. Namun fasilitas yang dirasakan saat ini merupakan hasil dari pembayaran pajak. Pernyataan Bapak Made Arnaya mengenai tidak adanya imbalan balik secara langsung tersebut tidak serta merta mengatakan bahwa hal tersebut adalah termasuk sisi ketidakadilan.

Berbeda dengan tanggapan Bapak Made Bagiada yang merupakan WPOP, pernyataan Bapak Made Bagiada adalah:

*“Memang definisinya menyatakan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun pemerintah jika mampu memberikan imbalan kepada WP yang patuh membayar pajak akan terasa lebih adil bagi WP tersebut. Saya sebagai WPOP akan lebih merasakan keadilan jika ada manfaat langsungnya, tidak harus materi mungkin dalam bentuk lain, pemerintah lebih pintar lah mengaturnya”*

Pendapat ini mengarah pada pendapat bahwa sebaiknya WP mendapatkan imbalan yang secara langsung yang dapat dirasakan. Imbalannya bukan harus berupa materi, namun bisa berupa suatu manfaat yang dapat dirasakan oleh WP.

Definisi pajak saat ini apabila ditinjau dari segi individu (mikro ekonomi) memang tidak dirasakan imbalan langsungnya. Tetapi apabila soal pajak ditinjau dari segi kemasyarakatan (makro ekonomi), maka tidak dapat dikatakan bahwa pajak itu sama sekali tidak ada imbalannya. Ada imbalan secara tidak langsung bagi individu yang hidup dalam masyarakat, seperti yang terlihat dalam infrastruktur, keamanan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut kami, pandangan ini tidak seluruhnya tepat mengingat dalam definisi pajak terkandung makna-makna tersembunyi yang dipandang oleh WP sebagai suatu ketidakadilan.

Makna keadilan menurut masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat barat. Masyarakat Indonesia mendefinisikan adil sebagai sesuatu yang ada pada tempatnya, dekat dengan ketakwaan (vertikal), dan memberikan kepuasan (horizontal) (Alim 2015).

Ketidakadilan definisi pajak yang memberikan kewenangan kepada DJP untuk memungut pajak yang bersifat memaksa, kami yakini merupakan sumber dari praktik perpajakan yang tidak sehat. Praktik yang tidak sehat bisa terwujud dalam bentuk kekuasaan pegawai DJP dalam hal melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksa pajak dengan tujuan lain<sup>9</sup> berhak mengumpulkan data WP. Tujuan lain dalam pemeriksaan tersebut cenderung digunakan untuk memenuhi target masing-masing individu pemeriksa pajak yang secara agregat merupakan pemenuhan target DJP. Pemeriksa pajak secara legal melakukan pencarian-pencarian demi kepentingan negara dibawah perlindungan undang undang. Makna tujuan lain yang terdapat dalam definisi pemeriksaan bisa digunakan secara bias oleh pemeriksa pajak.

Namun pendapat informan kami menyatakan bahwa mekanisme pemaksaan dalam pajak yang secara eksplisit tercantum dalam definisi pajak masih masuk dalam koridor keadilan. Kutipan wawancara dengan Bapak Sedana Yasa sebagaimana tercantum berikut:

*“...karena memaksa yang dimaksud dalam peraturan justru untuk menerapkan keadilan kepada wajib pajak”*

Pendapat yang mendukung pernyataan Bapak Sedana Yasa diajukan oleh informan Bapak Sugianta sebagai berikut:

*“...karena tanpa dipaksa WP tidak akan patuh membayar pajak.”*

Berdasarkan pernyataan Bapak Sedana Yasa dapat dipahami bahwa mekanisme “pemaksaan” dalam definisi pajak merupakan penerapan keadilannya. Didukung oleh pendapat Bapak Sugianta bahwa pemaksaan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak WP. Melanjutkan penjelasan informan Bapak Sedana Yasa bahwa mekanisme pemaksaan ini ditujukan bagi WP yang melakukan *tax evasion* yang secara legalitas tidak diperkenankan. Sehingga harus diterapkan pemaksaan agar WP yang memiliki *evasion minded* agar mau mematuhi regulasi perpajakan.

Sebaliknya argumentasi informan kami bapak Sedana Yasa dan Bapak Sugianta di atas berlawanan dengan artikel Triyuwono (2009). Tujuan utama pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP. Bukankah hal ini bertentangan dengan sistem perpajakan di Indonesia, yang mana semenjak reformasi tahun 1983 sistem perpajakan Indonesia adalah *Self Assessment System* (SAS) (Bawazier 2011; Setiyaji dan Amir 2005). Terjadi dialektika antara DJP dengan WP. SAS memberikan kepercayaan, namun upaya pemeriksaan menguji kepercayaan tersebut atau dengan kata lain tidak percaya terhadap WP (Triyuwono 2009).

Melalui SAS peran WP lebih aktif dari pada pegawai DJP. Pada implementasi SAS WP diberi kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri (Ilyas dan Burton 2012; Okello 2014).

---

<sup>9</sup> Definisi Pemeriksaan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 (25), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Memang menjadi suatu lingkaran tanpa ujung, apakah SAS akan meningkatkan kepatuhan pajak ataukah kepatuhan pajak akan meningkat seiring dengan implementasi SAS (Darmayasa dan Aneswari 2015). Namun yang kami pahami bahwa pelaksanaan pemeriksaan oleh DJP mengindikasikan bahwa DJP belum percaya dengan WP.

Pandangan lainnya mengenai kata pemaksaan yang tertera eksplisit pada definisi pajak muncul dari informan Bapak Made Arnaya dan Bapak Made Bagiada. Bapak Made Arnaya menyatakan:

*“Bisa jadi DJP menggunakan kata memaksa untuk memungut pajak dengan cara sedikit memaksa karena memang target penerimaan pajak relatif tinggi, belakangan ini banyak sekali ada klien saya yang mendapatkan himbauan pembetulan SPT atau malah langsung pemeriksaan”*

Pandangan yang sejalan disampaikan oleh Bapak Made Bagiada:

*“Bayar pajak bagi saya memang sangat berat terasa, kalau ndak dipaksa mungkin tidak ada yang mau bayar pajak, tapi harusnya jangan dipaksa terus, seyogyanya DJP mampu menumbuhkan kepatuhan WP sendiri”*

Target penerimaan pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan kepatuhan WP di Indonesia amatlah rendah. Sehingga tidak dapat dipungkiri beban DJP semakin berat. Maka diperlukan berbagai *tax effort* untuk mengejar target tersebut, yakni melalui pemaksaan yang dilakukan dengan berbagai mekanisme mulai dari himbauan pembetulan SPT maupun pemeriksaan. “Pemaksaan” yang dilakukan DJP terhadap WP sudah terlegalisasi dengan tertera secara jelas di dalam definisi pajak berdasar UU.

**Catur Purusa Artha (CPA): Lensa Dekonstruksi.** Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengaitkan antara pajak dengan tataran religiusitas. Salah satu penelitian yang berupaya merekonstruksi sistem perpajakan yang berlaku pada saat ini dilakukan oleh Triyuwono (2009) dengan merekonstruksi SAS menjadi *free self assessment and payment system*. Usulan tersebut masih terbatas pada subjek pajak orang pribadi, bukan untuk keseluruhan<sup>10</sup> subjek pajak. Penelitian yang mencoba mengaitkan antara pajak dan zakat dilakukan oleh Kholifah (2013) dan Tolkah (2012). Hasil penelitian Kholifah (2013) mengusulkan pajak merupakan badan atau lembaga, sedangkan jiwa kepatuhannya adalah zakat, sehingga pajak dan zakat merupakan satu kesatuan. Berbeda dengan Tolkah (2012) yang mengusulkan bahwa zakat bisa digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak (PhKP) WP. Namun secara garis besar kesamaan dari penelitian keduanya bahwa zakat merupakan satu mekanisme yang mampu meningkatkan kepatuhan pajak, karena pemicu pelaksanaannya adalah sisi religiusitas yang dimanifestasikan dalam keikhlasan dari dalam hati WP.

Manifestasi religiusitas yang merupakan tujuan hidup WP yang akan digunakan sebagai lensa dekonstruksi definisi pajak terdiri dari: 1) *Dharma*, 2) *Artha*, 3) *Kama* dan 4) *Moksa*. Empat visi hidup berdasarkan *Purusa Artha* tidak boleh dimaknai sendiri-sendiri secara terpisah bagian per bagian. Sebab secara bagian akan benar, namun secara keseluruhan akan menjadi keliru bahkan menyimpang.

Sebagaimana asumsi yang menjadi benang merah artikel ini, bahwa fitrah manusia adalah mencari ketentraman dengan kembali pada Tuhan Yang Maha Esa

---

<sup>10</sup> Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, pada pasal 2 ayat 1, Subjek Pajak terdiri dari: 1) orang pribadi, 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, 3) badan, dan 4) bentuk usaha tetap (BUT)

dengan mematuhi semua aturan Tuhan. Atau dalam konsep CPA adalah *Moksa* (menyatu dengan Tuhan). Nilai-nilai kearifan lokal yang selalu dipegang teguh oleh WP harusnya dijadikan suatu tuntunan sehingga hati WP mampu tergerak untuk sadar dan taat membayar pajak. Nilai-nilai lokal selama ini termarginalkan oleh nilai-nilai yang menjunjung kapitalisme, bahkan mendewakan materi dengan mengesampingkan keberadaan Tuhan. Untuk memasukkan nilai-nilai lokal yang akan digunakan untuk dekonstruksi definisi pajak.

Hasil wawancara dengan berbagai informan akan disusun ke dalam tema-tema yang disesuaikan dengan konsep CPA. Hasil penelusuran berbagai literatur yang terkait dengan topik penelitian digunakan untuk membantu proses dekonstruksi definisi pajak yang tidak berkeadilan. Pandangan para informan penelitian akan disusun ke dalam *Dharma, Artha, Kama, dan Moksa*. Susunan pandangan informan disajikan secara berurutan sesuai dengan filosofi konsep CPA yang diawali dari *Dharma, Artha, Kama, dan Moksa*.

**Dharma** merupakan tujuan hidup pertama dalam konsep CPA. *Dharma* dimaknai sebagai ibadah dalam bentuk lebih luas dalam artikel ini. Yakni segala perbuatan manusia yang mengacu pada hal-hal yang diperintah oleh Tuhan Maha Besar. Terutama perbuatan manusia berkaitan dengan kewajibannya sebagai warga negara. Manusia dalam penelitian ini merujuk pada WP. Penjelasan mengenai konsep *Dharma* tercantum dalam Kitab Sarasamuccaya dalam sloka 8 dan sloka 12 sebagai berikut.

Sloka 8:

*Manusyam durlabham  
prapya widyullassitacandalam  
bhawaksaye matih karya  
bhawopakarensu ca*

Artinya:

Menjadi manusia itu hanya sebentar  
Tidak berbeda dengan kilatnya petir  
Gunakan melakukan *dharma sadhana*  
Memusnahkan derita dan sorga pahalanya

Sloka 12:

*Karmarthau lipsamanastu  
dharmmam ewaditascaret  
na hi dharmmadapetyarthah  
kamo wapi kadacana*

Artinya:

Jika *artha* dan *kama* yang akan dicari  
Lakukan ajaran *dharma* terlebih dahulu  
*Artha* dan *kama* pasti akan diperoleh  
Kecuali jika menyimpang dari kebenaran

Makna kedua sloka di atas adalah kehidupan yang hanya sebentar sebaiknya dijalani dengan penuh *dharma*. Ketika hidup telah diniatkan untuk ibadah atau pengabdian pada Tuhan, maka rejeki berupa *artha* (materi) dan *kama* (kesejahteraan lahir dan batin) pasti akan tercapai pula. Dalam hal ini ada banyak cara manusia sebagai WP untuk melakukan *dharma* yang selaras dengan kewajibannya sebagai warga negara.

*Dharma* atau pengabdian yang bisa dilakukan oleh WP sebagai warga negara salah satunya melalui ketaatannya pada regulasi perpajakan secara ikhlas. Sebaliknya DJP sebagai otoritas juga harus melakukan *dharma* serupa. *Dharma* yang dapat dilakukan oleh DJP antara lain dengan memformulasikan regulasi perpajakan yang adil serta membenahi kualitas institusi agar tidak ada lagi oknum otoritas perpajakan yang melakukan *moral hazard*.

**Artha** merupakan harta benda yang bersifat materiil yang merupakan tujuan hidup kedua berdasarkan CPA. Dalam hal ini *artha* merupakan sarana bagi WP untuk melakukan *dharma* kepada negara. Menekankan *dharma* yang dilakukan oleh WP berupa pembayaran pajak yang berasal dari *artha* miliknya.

Dijelaskan dalam *rgveda V.76.5*

*A visvani amrta saubhagani*

Artinya:

Ya Tuhan, limpahkanlah kepada kami kekayaan yang suci atau bersifat kedewataan.

Dalam *rgveda X.117.5*

*Prnyad id nadhamanaya tavyan*

*draghiyamsam anu pasyeta pantham*

*o hi vartante rathyeva cakra*

*anyam anyam up tisthanta rayah*

Artinya:

Bermurah hatilah untuk memberi sesuatu sebagai dana punia kepada orang miskin. Kekayaan itu berputar bagaikan roda, demikian pula *Artha* atau kekayaan itu bergulir dari seseorang kepada orang lain.

Umat Hindu sebagaimana umat Islam memiliki ajaran serupa dalam hal bagaimana harta diperoleh dan mekanisme mengenai membagikan harta pada pihak lain. *Artha* atau harta harus diperoleh melalui jalan *dharma* dan harus disedekahkan sebagai bentuk *dharma* pula. Istilah sedekah pada harta ini disebut sebagai dana punia dalam Hindu atau zakat dalam Islam.

Mekanisme dana punia atau zakat ini kemudian dibuat suatu pengandaian oleh Triyuwono (2009) melalui Metafora Zakat (MZ) dalam pemungutan pajak. Sehingga pajak merupakan bagian dari *dharma* WP dengan mengasumsikan pajak yang dikeluarkan diniatkan sebagai dana punia atau zakat. Sehingga ketika pembayaran pajak dilakukan, kewajiban sebagai warga negara terpenuhi sekaligus melaksanakan perintah Tuhan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kholifah (2013) bahwa pajak adalah lembaganya, zakat adalah jiwanya.

Analogi zakat ini dirumuskan secara lebih terperinci yang dimasukkan sebagai pengembangan kebijakan fiskal oleh Alim (2013 : 69). Sehingga organisasi pengelola zakat harus memiliki sistem yang terintegrasi dengan DJP. Setiap kali zakat yang dibayarkan oleh WP, akan otomatis mengurangi kewajiban pajaknya sebagai bentuk kompensasi (Alim 2013 : 51-52). Jumlah pembayaran zakat di Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata sebab tren penerimaan zakat setiap tahunnya terus mengalami kenaikan 15-35% (Firatmaja 2015). Data penerimaan zakat bulan September tahun 2015 menunjukkan nominal yang cukup besar yakni Rp 78.7 Triliun (Republik Indonesia 2016).

**Kama** merupakan tujuan hidup yang ketiga dalam CPA yakni hawa nafsu atau keinginan. Dalam artikel ini makna *Kama* merujuk pada keinginan atau kebutuhan

jasmani maupun rohani. Kontribusi *artha* yang dilakukan oleh WP melalui pembayaran pajak akan menjadi sumber penerimaan negara untuk belanja kebutuhan publik. Kebutuhan publik ini ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini kemakmuran yang wajib dipenuhi oleh pemerintah selaku otoritas adalah kemakmuran berupa kemakmuran jasmani maupun rohani (*kama*).

Bapak Arnaya menyampaikan pendapatnya mengenai visi hidup berdasarkan CPA dikaitkan dengan definisi pajak sebagai berikut:

“...harusnya DJP menggunakan ajaran Dharma dengan menyediakan sarana prasarana terlebih dahulu, selanjutnya biarkan iklim ekonomi tumbuh baru pungut pajak, setelah pajak terpungut maka distribusikan dengan niat baik (*kama*) dari DJP untuk kemakmuran rakyat”

Pendapat tersebut melihat konsep pajak dari sudut pandang *up to bottom*. Bahwa definisi pajak yang dikaitkan dengan konsep kepatuhan pajak diawali melalui segala fasilitas mendukung yang disediakan pemerintah yang diasumsikan sebagai wujud *dharma* pemerintah. Fasilitas dan sarana yang disediakan akan merangsang pertumbuhan ekonomi, sehingga kemampuan ekonomis warga negara sebagai WP juga akan meningkat, sehingga bisa dipajaki. Dari penerimaan pajak yang terkumpul, pemerintah memiliki kewajiban untuk mendistribusikan dengan niat baik secara merata dan adil. Niat baik dalam hal ini oleh informan diyakini sebagai bentuk *kama*.

Telah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab Sarasamuccaya sloka 12 bahwa untuk meraih *Kama* atau *Artha* maka harus melaksanakan *Dharma* terlebih dahulu. Makna sloka ini dapat dihubungkan dengan konsep perpajakan nasional dengan menggunakan Metafora Zakat (MZ). Menekankan pada pencapaian *Kama* sesuai dengan subbab ini, maka WP melakukan pembayaran pajak sebagai bentuk *dharma* dengan melakukan analogi zakat atau dana punia dalam Hindu, atas pajak yang dibayarkan. Melalui pembayaran pajak tersebut, maka pemerintah akan memiliki penerimaan untuk melakukan pembelanjaan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

**Moksa** ini selaras dengan asumsi utama artikel ini mengenai fitrah manusia untuk taat kepada Tuhan. Hindu memiliki paham mengenai Monisme, yakni paham yang memandang segala realitas adalah tunggal. Tuhan adalah tunggal, Maha Esa. Tuhan adalah sumber dan satu kesatuan dengan makhluknya. Semua yang ada di jagat raya ini adalah satu kesatuan. Rasa satu kesatuan antara manusia dengan sesama (*Tat Twam Asi*), dengan alam dan dengan Tuhan. Konsep kesatuan ini adalah *advaita*, yakni monisme meyakini bahwa seluruh jagat raya dipandang sebagai emanasi (mengalir) dari Tuhan (Mardiono 2016).

Dalam Kitab Weda dijelaskan :

*Moksartham jagadhita ya ca iti dharma*

Artinya:

Tujuan agama atau *dharma* adalah untuk mencapai *jagadhita* dan *moksa*

**Moksa** jika dihubungkan dengan perpajakan yakni semua *dharma* yang dilakukan oleh WP melalui kontribusi *artha* dilakukan dengan tujuan *moksa*. Yakni atas dasar ikhlas karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan berkah dari Yang di Atas.

**Dekonstruksi Definisi Pajak Berdasarkan CPA.** Pendapat pro maupun kontra dari informan-informan yang kami wawancara menghasilkan wacana yang memperkaya artikel ini. Berbagai pendapat, literatur, konsep CPA dan pemikiran kami disatukan untuk menghasilkan sebuah dekonstruksi definisi pajak. Sehingga

berdasarkan pembahasan empat prinsip hidup CPA yang kami kaitkan dengan perpajakan di atas menghasilkan sebuah dekonstruksi definisi baru pajak yaitu : **Pajak adalah *Dharma* dalam bentuk kontribusi uang yang dilakukan secara tulus ikhlas yang berasal dari *Artha* orang pribadi atau badan kepada negara yang didistribusikan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat berlandaskan *Kama*.**

Beberapa makna yang ingin kami sampaikan dari dekonstruksi definisi pajak yang diajukan tersebut bahwa 1) pajak merupakan pengabdian yang bentuknya adalah kontribusi *artha* dari orang pribadi atau badan pada negara, 2) kontribusi tersebut diatur dalam Undang-undang bagi keperluan negara untuk belanja publik bagi kemakmuran rakyat. 3) Yang mana kemakmuran rakyat dalam hal ini yang wajib dipenuhi negara adalah kemakmuran *kama*, yakni kemakmuran berupa jasmani maupun rohani.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Definisi pajak berdasarkan UU KUP saat ini dinilai sarat dengan modernitas. Semangat modernitas yang ditunjukkan dalam definisi tersebut nampak dalam pengarusutamaan materialitas, pendikotomian Tuhan atau agama serta menunjukkan ketidakadilan bagi WP. Definisi pajak merupakan hal penting sebab akan menunjukkan sifat, tujuan, dasar dan mekanisme pemungutan pajak. Berawal dari definisi pajak yang akan dimaknai oleh WP maka akan mampu mempengaruhi keputusan tindakan WP apakah akan taat pada regulasi perpajakan atau sebaliknya.

Beberapa gerakan telah dilakukan sebagai upaya untuk melakukan dekonstruksi definisi pajak. Namun kami menilai wacana definisi baru yang muncul masih sarat dengan materialitas. Sehingga perlu mengajukan sebuah definisi pajak yang mampu menunjukkan keadilan serta akan dapat mendorong kepatuhan pajak.

Menggunakan salah satu konsep Hindu-Bali yakni CPA sebagai lensa dekonstruksi. Definisi pajak yang diajukan menggunakan fitrah manusia untuk taat pada Tuhan sebagai bentuk *divine consciousness* atau kesadaran Ilahi sebagai landasan. Empat konsep dalam CPA yakni *dharma*, *artha*, *kama* dan *moksa* kemudian dijadikan sebagai lensa untuk memahami definisi pajak saat ini yang menghasilkan definisi pajak yang baru. Sehingga berdasarkan lensa tersebut definisi pajak yang diajukan adalah **Pajak adalah *Dharma* dalam bentuk kontribusi uang yang dilakukan secara tulus ikhlas yang berasal dari *Artha* orang pribadi atau badan kepada negara yang didistribusikan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat berlandaskan *Kama*.**

Konsep religiusitas yang kami bawa sebagai lensa dekonstruksi definisi pajak menekankan pada *Manunggaling kawulo Gusti* (Triyuwono 2009). Kedudukan *kawulo* dalam konteks religiusitas membutuhkan adanya sikap yang bernama kepatuhan dan keikhlasan (Suyatno 2016). Sehingga hasil dekonstruksi ini menekankan pada “tulus ikhlas” yang dalam konsep perpajakan mengarah pada kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*).

Beberapa makna yang muncul dari dekonstruksi definisi pajak yang diajukan tersebut adalah 1) pajak merupakan pengabdian yang bentuknya adalah kontribusi *artha* dari orang pribadi atau badan pada negara, 2) kontribusi tersebut diatur dalam undang-undang bagi keperluan negara untuk belanja publik bagi kemakmuran rakyat. 3) Yang mana kemakmuran rakyat dalam hal ini yang wajib dipenuhi negara adalah kemakmuran *kama*, yakni kemakmuran berupa jasmani maupun rohani.



## DAFTAR REFERENSI

- Alim, Mohammad Nizarul. 2013. *Analogi Fiskal Syariah Di Indonesia Perspektif Zakat*. Madura: UTM Press Universitas Trunojoyo Madura.
- Alim, Mohammad Nizarul. 2015. "Pajak Dan Prinsip Keadilan." Madura: Disampaikan dalam Simposium Nasional Perpajakan (SNP) 5, Universitas Trunojoyo Madura 12 November 2015.
- Aneswari, Yuyung Rizka, I. Nyoman Darmayasa, dan Elana Era Yusdita. 2015. "Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% Pada UMKM." in *Simposium Nasional Perpajakan 5 Fakultas Ekonomi - Universitas Trunojoyo Madura, 12 November 2015*. Madura: Universitas Trunojoyo, 12 Nopember 2015.
- Bawazier, Fuad. 2011. "Reformasi Pajak Di Indonesia." *Jurnal Legesi Indonesia* 8(1):1-12.
- Brañas-garza, Pablo, Antonio M. Espín, and Shoshana Neuman. 2013. "Effects of Religiosity on Social Behaviour : Experimental Evidence from a Representative Sample of Spaniards." *IZA Discussion Paper* (7683).
- Budiasih, I. Gusti Ayu Nyoman. 2014. "Fenomena Akuntabilitas Perpajakan Pada Jaman Bali Kuno: Suatu Studi Interpretif." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5(3):409-20.
- Darmayasa, I. Nyoman dan Yuyung Rizka Aneswari. 2015. "The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211(September):142-48.
- Djamhuri, Ali. 2011. "Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Berbagai Paradigma Dalam Kajian Akuntansi." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2 No 1(April):147-85.
- Firatmaja, Fian. 2015. "Setiap Tahun Penerimaan Zakat Baznas Meningkat." *Republika*. Retrieved March 1, 2016 (<http://republika.co.id>).
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2012. *Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak: Analisis Yuridis Terhadap Teori Dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Kamayanti, Ari. 2015. "'Sain' Memasak Akuntansi: Pemikiran Udayana Dan Tri Hita Karana." *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen* 1(2):73-80.
- Kholifah, Dewi. 2013. "Studi Komparatif Antara Pemikiran Fazlur Rahman Dan Masdar Farid Mas'udi Tentang Pajak Dan Zakat." Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Mardiono, Bambang In. 2016. "Pandangan Keagamaan Bung Karno Untuk Persatuan Bangsa Dan Perdamaian Dunia Yang Abadi." in *Diskusi Pembaca Aktif di Perpustakaan Bung Karno 02 Maret 2016 dengan Tema Religiusitas Soekarno*. Blitar: UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syari'ah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syari'ah Dari Wacana Keaksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Okello, Andrew. 2014. "Managing Income Tax Compliance through." *IMF Working Paper* 41(March):4–32.
- Plasschaert, Sylvain R. F. 1988. "Scholar, Global and Dualistic Patterns of Income Taxation."
- Republik Indonesia. 2016. *BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PENERIMAAN DAN PENYALURAN TAHUN 2015 BULAN SEPTEMBER 2015*. Retrieved (<http://pusat.baznas.go.id>).
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2014. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiyaji, Gunawan dan Hidayat Amir. 2005. "Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia." *Jurnal ekonomi* 7(November):1–13.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Karnia Sugiharti. 2004. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suyatno. 2016. "Religiositas Sukarno: Sebuah Pengantar Diskusi Forum Kunitas Pembaca Aktif Koleksi Khusus Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Perpustakaan Nasional RI." in *Diskusi Pembaca Aktif Di Perpustakaan Bung Karno 17 Februari 2016*. Blitar: UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.
- Tolkah. 2012. "Pembayaran Zakat Pada Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Kaitannya Dengan Pajak Penghasilan." *Majalah Ilmiah Widya*, March, 22–27.
- Torgler, Benno. 2003. "The Importance of Faith : Tax Morale and Religiosity." *Center for Research in economics, Management and the Arts (CREMA)* 08:1–35.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, Dan Teori Akuntansi Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Triyuwono, Iwan. 2009. "SEANDAINYA Refleksi Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Dalam Perspektif Teori Kemanunggalan Dan Metafora Zakat." in *Simposium Nasional Perpajakan II*. Universitas Trunojoyo, 9-10 Desember 2009.
- Triyuwono, Iwan. 2011. "Sususaya" Melampaui Paradigma-Paradigma Metodologi Penelitian." Pp. 1–15 in *Pelatihan Penelitian Kualitatif Two Days Workshop*

*Center of Training for Research and Publication (CRP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 2-3 Oktober 2015. Malang.*

- Triuwono, Iwan. 2015. "Taqwa: Deconstructing Triple Bottom Line (TBL) to Awake Human's Divine Consiusness." in *2nd Global Conference on Business and Social Science-2015, GCBSS-2015, 17-18 September 2015, Bali, Indonesia.*
- Widiastuti, Ni Putu Eka, Eko Ganis Sukoharsono, Gugus Irianto, dan Zaki Baridwan. 2015. "Yadnya - Hinduism Philosophy to Achieve Spiritual Awareness of SME Owners as Taxpayers: A Literary Discourse." *International Journal of Business and Management Invention* 4(5):38–43.

# PENERAPAN AKUNTANSI, AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA GEREJA KRISTEN JAWA WEDI

Wahyu Jati Agung Prabowo<sup>1)</sup>  
Lulus Kurniasih<sup>2)</sup>

Universitas Sebelas Maret Surakarta<sup>1,2)</sup>

## *Abstract*

*Abstrac : This study discusses the application of accounting, accountability and internal control contained in the Gereja Kristen JawaWedi Klaten, because a lot of corruption in religious institutions. The purpose of this study was to analyze and evaluate the implementation of accounting, accountability and internal controls exist in Gereja Kristen JawaWediKlaten. The method used in this research is qualitative descriptive method, that is by direct observation, interviews, and literature. This research was conducted in Gereja Kristen JawaWediKlaten which is a non-profit religious organization. Research results obtained Gereja Kristen JawaWediKlaten namely the application of accounting, accountability, and internal controls are already well underway, but there are some shortcomings that reporting is not in accordance with IAS 45, the employee who is not competent, and yet there is a good division of labor*

*Keywords : Nonprovit organization, church accounting, accountabilty, internal control*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan pidana yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah di berbagai negara. Menurut Abdullah Hehamahua dalam Ermansjah Djaja, korupsi tergolong dalam kategori *extra-ordinary crimes*, karena tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga pilar – pilar sosial budaya, moral, politik dan tatanan hukum dan keamanan nasional.Kejahatan korupsi selalu identik dengan lembaga pemerintahan, namun sekarang telah berkembang hingga lembaga keagamaan yang dianggap “suci” oleh masyarakat. Seperti yang tertulis di dalam tempo.com pada bulan November tahun 2015, masyarakat singapura dikejutkan dengan ditangkapnya tokoh Gereja City Harvest, salah satu gereja terbesar di Singapura dengan jemaat berjumlah 17.500 orang. Hakim pengadilan singapura menetapkan Kong Hee selaku pendiri sekaligus pendeta Gereja City Harvest bersalah, hal itu dikarenakan Kong Hee menggelapkan uang sumbangan dengan nilai 35 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 350 miliar untuk mendanai karier bernyanyi istrinya yang bernama Sun Hoo (bbc.com). Di Indonesia sendiri, kasus penyalahgunaan uang di gereja juga pernah terjadi. Pada Tahun 2013, Pdt. Abraham Alex Tanuseputra diduga melakukan pencucian uang dengan nilai 4,7 triliun rupiah dan pemalsuan akta pendirian bangunan gereja (detiknews.com). Adanya kasus korupsi dalam lingkungan gereja menimbulkan kecurigaan antara jemaat dengan pengelola keuangan gereja. Hal ini sesuai dengan penelitian Silvia (2011) yang mengatakan adanya kecurigaan jemaat bahwa persembahan yang mereka berikan digunakan oleh pribadi dan tidak dikelola dengan baik oleh majelis selaku pengelola keuangan gereja. Untuk menghindari adanya korupsi di dalam gereja dan meyakinkan jemaat, gereja perlu melakukan perbaikan. Perbaikan diharapkan tidak hanya sebatas bangunan dan sistem kepengurusan seperti saat ini, melainkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan yang transparan yang mengarah pada pertanggungjawaban.

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dalam organisasi keagamaan pernah dilakukan sebelumnya, beberapa diantaranya oleh Silvia dan Anshar (2011) yang membahas mengenai akuntabilitas pada Gereja Protestan Indonesia yang berada di Palu. Di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa “ketidakberesan” dalam administrasi gereja terjadi karena jemaat dan majelis sebagai pengelola tidak saling menopang, serta kepercayaan merupakan sesuatu yang diwajibkan karena sesuai dengan ajaran. Penelitian berikutnya oleh Pontoh (2013) meneliti tentang penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No 45 pada Gereja Bukit Zaitun Luwuk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Gereja Bukit Zaitun Luwuk belum melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan format laporan keuangan organisasi nirlaba yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi No. 45. Namun secara umum format laporan keuangan Gereja Bukit Zaitun Luwuk sudah dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi pihak internal dan eksternal. Pada tahun 1999 John B. Duncan melakukan penelitian dengan judul penelitian *Internal control systems in US churches (An examination of the effects of church size and denomination on systems of internal control)* yang bertujuan mengevaluasi efek dari ukuran gereja serta politik dan struktur denominasi pada sistem pengendalian internal. Pada tahun 2005, penelitian mengenai akuntansi di gereja juga dilakukan oleh Helen Irvine dengan judul *Balancing money and mission in a local church budget*. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana penyusunan anggaran dalam gereja dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya konflik antara ajaran dengan sifat sekuler dalam akuntansi.

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana pengelolaan dan akuntabilitas keuangan pada Gereja Kristen di Wedi. Penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pengelolaan dan akuntabilitas keuangan pada gereja dan pengendalian internal di dalamnya, hal itu dikarenakan munculnya kasus korupsi yang terjadi di gereja yang mengakibatkan turunnya kepercayaan jemaat terhadap pengelola keuangan. Padahal gereja merupakan salah satu organisasi nirlaba yang dipercaya jemaat untuk mengelola keuangan untuk tujuan spiritual. Untuk mencegah terjadinya kecurangan dan kecurigaan jemaat terhadap pengelola keuangan di dalam gereja, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan pengendalian internal yang baik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan di Gereja Kristen Jawa Wedi?
2. Bagaimana akuntabilitas keuangan di Gereja Kristen Jawa Wedi?
3. Bagaimana pengendalian internal di Gereja Kristen Jawa Wedi?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Organisasi Nirlaba**

Kata organisasi berasal dari kata *organization*, yang memiliki arti sebagai sesuatu hal yang mengatur dan menyusun bagian – bagian yang memiliki hubungan satu sama lain, yang setiap bagiannya memiliki fungsi tersendiri sesuai kapasitasnya (Sulistyorini, 2001). Secara sederhana, organisasi dapat dikatakan sebagai suatu wadah atau perserikatan kerjasama manusia yang didalamnya terdapat struktur organisasi, pembagian tugas, hak dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama

### **2.2 Akuntansi**

Warren (2008:10) mengungkapkan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak – pihak yang mempunyai kepentingan dalam aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

### 2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 45

PSAK No 45 diciptakan dengan tujuan untuk mengatur pelaporan keuangan dalam entitas nirlaba, sehingga pelaporan keuangan entitas nirlaba lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan dapat dibandingkan. Pernyataan yang terdapat dalam PSAK No 45 berlaku bagi Entitas nirlaba yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Sumber daya yang dimiliki entitas berasal dari pemberian pemberi sumber daya, yang tidak mengharapkan adanya pengembalian yang sebanding dengan pemberiannya dari entitas
- b. Entitas menghasilkan barang/jasa tanpa tujuan menghasilkan laba, dan jika entitas mendapatkan laba, maka laba yang di dapatkan tidak dibagikan kepada pemilik entitas.
- c. Kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak boleh sama dengan entitas binsin, artinya kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual belikan atau dialihkan seperti entitas bisnis.

Selain entitas yang memiliki karakteristik diatas, PSAK 45 dapat digunakan untuk pemerintahan, dan unit lain yang tidak berlawanan dengan perundang – undang yang berlaku. IAI (2011:45) menetapkan komponen laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK no. 45, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

### 2.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang meminta pertanggungjawaban. Menurut Koopel (2005) dalam penelitiannya yang berjudul *Pathologies Of Accountabilty ICANN and the Challenge of "Multiple Accountability Disorder"*, *Public Administration Review*, akuntabilitas terdiri dari lima dimensi. Lima dimensi yang dimaksud adalah transparansi, liabilitas, pengendalian, responsibilitas, dan responsivitas.

### 2.5 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal dapat diartikan sebagai rencana organisasi serta metode – metode terkait dan pengukuran yang digunakan organisasi untuk melindungi aset dari pencurian, perampokan dan penyalahgunaan oleh pihak tertentu serta meningkatkan keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi (Weygandt et al. 2007:454). COSO (Picket,2003) mendefinisikan di dalam unsur – unsur pengendalian internal terdapat lima komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring.

### 2.6 Penelitian Terdahulu

1. Komang (2015) dengan judul Konsep Akuntabilitas Keuangan dalam Organisasi Keagamaan (Studi Kasus pada Gereja Kerasulan Baru di Indonesia, Distrik Jawa Timur dan Bali), penelitian ini didasari banyaknya gereja yang membuat sistem pengelolaan keuangan yang bersifat sentralistik tetapi hampir tidak ada masalah keuangan yang terkuak, dan kepercayaan jemaat terhadap keuangan gereja yang mereka sendiri tidak ikut terlibat. Berkaitan dengan hal tersebut, komang dalam penelitiannya membahas mengenai proses keuangan di Gereja Kerasulan Baru distrik Jawa Timur dan Bali, dan bagaimana sistem keuangan Gereja Kerasulan Baru distrik Jawa Timur dan Bali mampu menjamin terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel.
2. Janets (2011) melakukan penelitian terhadap akuntabilitas keuangan Gereja dengan judul Akuntabilitas dalam Perspektif Gereja Protestan (Studi Fenomenologis pada Gereja Protestan Indonesia Donggala Jemaat Manunggal Palu). Penelitian Janets bertujuan untuk mengamati serta mendeskripsikan akuntabilitas yang ada di gereja

protestan, sehingga peneliti mampu memperoleh solusi dalam mewujudkan pelaksanaan keuangan yang baik.

3. John (1999) melakukan penelitian terhadap internal kontrol yang terdapat di Gereja yang terletak di Amerika Serikat. Penelitian John diberi judul *Internal control systems in US churches, An examination of the effects of church size and denomination on systems of internal control*. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi efek dari ukuran gereja, kepengurusan, dan struktur demonisasi terhadap pengendalian internal Gereja.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data berupa data kualitatif. Didalam melakukan penelitian kualitatif, penulis diharuskan lebih fokus terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial, yang nantinya akan dianalisis menggunakan teori yang sudah ada (Bambang dan Melia, 2008:78-79). Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Di dalam penelitian kuantitatif penulis melakukan pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif dengan perhitungan ilmiah, sedangkan di dalam penelitian kualitatif data yang digunakan tidak berbentuk angka, data dapat berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis maupun tidak tertulis.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Didalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Gerja Kristen Jawa (GKJ) Wedi yang terletak di Magersari Glodogan Klaten Selatan. Penelitian dilakukan selama empat bulan, mulai bulan November 2016 hingga Februari 2017. Penulis sendiri merupakan warga Gereja aktif di GKJ Wedi selama dua puluh tahun, sehingga memahami aktivitas yang ada di Gereja.

#### **3.3 Sumber Data**

Didalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data. Yaitu :

1. Data Primer  
Data primer merupakan data – data yang diperoleh penulis secara langsung dari pihak GKJ Wedi Klaten yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pencatatan, akuntabilitas, pengendalian internal dan data – data lain yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dari sumber – sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

#### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi Terus Terang  
Peneliti berterus terang pada pemberi data bahwa peneliti sedang melakukan pengumpulan untuk penelitian data. Sementara dalam suatu waktu peneliti tidak berterus terang kepada nara sumber.
2. Wawancara Tak Terstruktur  
Yang dimaksud dengan wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bersifat bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara dan pedoman dalam melakukan wawancara hanya berupa garis besar permasalahan.
3. Studi Pustaka  
Penulis mengumpulkan data berdasar literatur yang dapat berupa buku – buku, dokumen, maupun catatan lain yang memiliki hubungan dengan penelitian.

#### **3.5 Teknik Analisis Data**

Penulis didalam menganalisis data menggunakan teknik analisis interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2009: 92-99), yaitu:

1. Reduksi data (data reduction)  
Yang dimaksud dengan reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan mentransformasi data yang didapatkan dari lapangan. Proses reduksi data dilakukan penulis berlangsung terus menerus selama penulis melakukan penelitian di GKJ Wedi.
2. Penyajian Data (data display)  
Penyajian data merupakan proses penyusunan data ke dalam bentuk sistematis, membuat data menjadi lebih sederhana dan selektif sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.
3. Menarik Kesimpulan (verifikasi)  
Tahapan akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Dari proses analisis yang dilakukan penulis di GKJ Wedi, penulis berusaha menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam data kualitatif bersifat sementara, sewaktu-waktu dapat berubah jika ditemukan data yang baru.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

Objek dari penelitian ini adalah Gereja Kristen Jawa (GKJ) Wedi yang terletak di Magersari No.16, RT.01 RW.01, Glodogan, Klaten. GKJ Wedi merupakan salah satu Gereja terbesar di Klaten dengan jumlah jemaat 1422 warga dan memiliki satu gereja induk dan lima Gereja cabang yang biasa disebut Gereja Pewantran. GKJ Wedi juga memiliki depan blok, blok merupakan pembagian wilayah yang mempermudah dalam menjalankan pelayanan agar lebih efektif.

##### **4.2 Organisasi GKJ Wedi**

GKJ Wedi dalam menjalankan organisasi menganut sistem pemerintahan Presbyterial Sinodal seperti GKJ pada umumnya. Pemerintahan Presbyterial Sinodal berarti kepemimpinan Gereja dipegang oleh orang-orang yang dituakan, dan Gereja masih terikat dengan Gereja Kristen Jawa yang lain. Karena Gereja menganut sistem pemerintahan Presbyterial, para presbyter atau dalam hal ini adalah Majelis Gereja mempunyai wewenang untuk mengatur, memimpin, memerintah, mengembalikan dan memelihara jemaat.

Majelis Gereja terdiri dari Pendeta, Penatua dan Diaken memiliki tugas untuk mengemban tritugas Gereja, yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. (*koinonia, diakonia, dan marturia*). Majelis Gereja secara keseluruhan disebut dengan Majelis Pleno atau Majelis Lengkap yang melaksanakan tugas dan kewajiban secara umum. Untuk mengontrol agar kegiatan harian Gereja sesuai dengan ajaran Gereja dan keputusan Sidang Majelis Pleno, maka Gereja membentuk Majelis Harian yang terdiri dari ketua 1, ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, koordinator bidang ibadah, koordinator bidang pembinaan warga gereja (PWG), koordinator bidang kesaksian dan pelayanan (KesPel), koordinator bidang sarana dan prasarana (SarPras).

Untuk menjalankan tritugas Gereja, Majelis GKJ Wedi dibagi menjadi empat Majelis Bidang yang membawahi Komisi-komisi Gereja dan majelis pewantran yang mewakili setiap pewantran. Empat Majelis Bidang yang ada di GKJ Wedi antara lain :

1. Majelis Bidang Ibadah  
Majelis Bidang Ibadah membawahi tiga Komisi Gereja, yaitu :
  - a. Komisi Peribadatan
  - b. Komisi Konseling dan Doa
  - c. Komisi Kesenian
2. Majelis Bidang Pembinaan Warga Gereja  
Majelis Bidang Pembinaan Warga Gereja membawahi empat Komisi Gereja, yaitu :
  - a. Komisi Anak
  - b. Komisi Pemuda Remaja

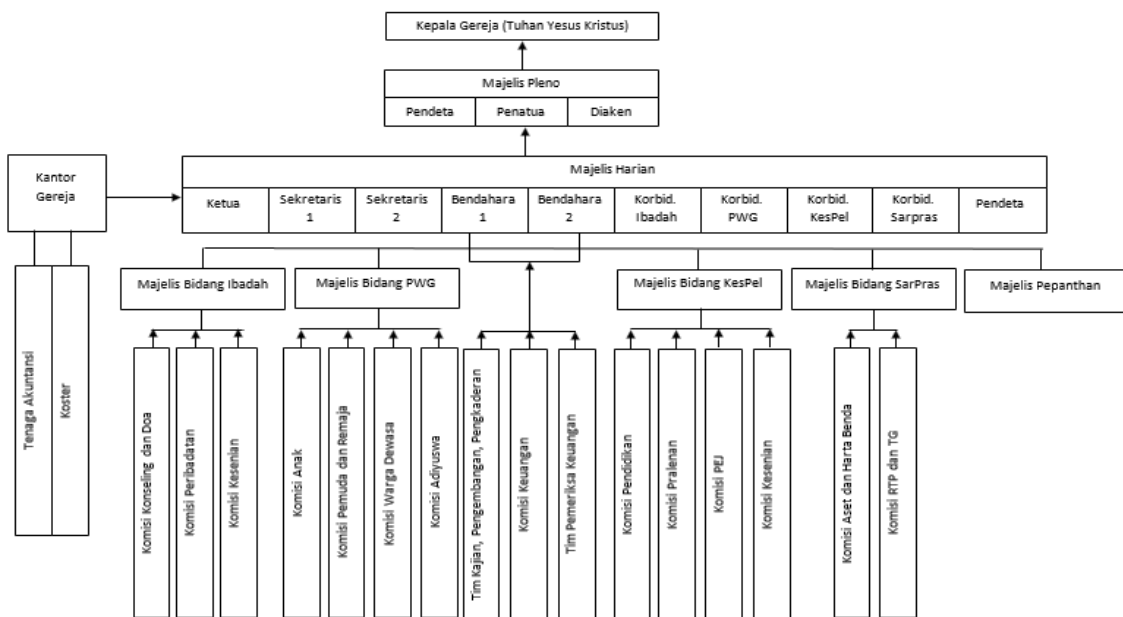


- c. Komisi Warga Dewasa
- d. Komisi Adiyuswa
- 3. Majelis Bidang Kesaksian dan Pelayanan
  - Majelis Bidang Kesaksian dan Pelayanan membawahi empat Komisi Gereja, yaitu :
    - a. Komisi Pendidikan
    - b. Komisi Pralenan
    - c. Komisi Pengembangan Ekonomi Jemaat (PEJ)
    - d. Komisi Kesehatan
- 4. Majelis Bidang Sarana - Prasarana
  - Majelis Bidang Sarana – Prasarana membawahi dua Komisi Gereja, yaitu :
    - a. Komisi Aset dan Harta Benda
    - b. Komisi Rumah Tangga Pendeta dan Karyawan Gereja

Selain komisi yang telah disebutkan sebelumnya, Gereja membentuk tim pemeriksa keuangan, membentuk tim kajian, pengembangan, pengkaderan, dan komisi keuangan yang bertanggung jawab kepada bendahara Gereja. Setiap Majelis Bidang dan Majelis Papanan mempertanggungjawabkan tugas yang dijalankan kepada Majelis Harian.

Untuk menyelesaikan permasalahan administrasi, di dalam Gereja terdapat kantor Gereja yang didalamnya terdiri dari tenaga akuntansi dan koster. Kantor Gereja dalam menjalankan tugas bertanggung jawab langsung kepada Majelis Pleno.

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi GKJ Wedi



### 4.3 Penerapan Akuntansi GKJ Wedi

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, GKJ Wedi hanya melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap kas saja, tidak melakukan pencatatan dan pelaporan aset yang lain seperti bangunan dan kendaraan. Kegiatan akuntansi di GKJ Wedi meliputi :

- 1) pengajuan program kerja berserta anggaran selama satu tahun dari komisi;
- 2) pembuatan anggaran gereja selama satu tahun;
- 3) pembuatan laporan bulanan GKJ Wedi;
- 4) pembuatan laporan realisasi anggaran.

Pemasukan utama GKJ Wedi di dapat dari persembahan yang diberikan oleh jemaat dan pendapatan yang lain seperti hibah. Pemasukan yang di dapat oleh gereja kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh gereja. Pemasukan yang diterima gereja terdiri dari :

1. Persembahan mingguan
2. Persembahan bulanan
3. Persembahan sakramen
4. Persembahan kebaktian hari raya gerejawi
5. Persembahan kebaktian khusus
6. Persembahan istimewa
7. Masa Paskah, Pentakosta, Bulan Keluaga, Advent, Pepenkris
8. Iuran pensiun
9. Penuaian
10. Persembahan lain – lain
11. Kayekten dan Dilah
12. Persembahan khusus

Setiap pemasukan yang diterima oleh gereja digunakan untuk membiayai kegiatan gereja dalam melayani. Pengeluaran GKJ Wedi di bagi menjadi beberapa kategori, yaitu :

1. Biaya Hidup Tenaga Kerja
2. Tunjangan Tenaga Kerja
3. Kebutuhan Majelis
4. Biaya tak terduga
5. Biaya lain – lain

#### **4.4 Pelaporan Keuangan GKJ Wedi**

Pelaporan keuangan merupakan hal penting bagi entitas. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kinerja entitas selama satu periode dan keadaan entitas yang terkait. Laporan keuangan GKJ Wedi dibuat oleh komisi keuangan dan terdiri dari laporan bulanan dan tahunan.

##### **a. Laporan bulanan GKJ Wedi**

Laporan bulanan merupakan laporan keuangan yang diterbitkan setiap bulan. Laporan bulanan berisi laporan keuangan bulanan yang berupa laporan kas masuk dan keluar pada bulan yang bersangkutan, rekapitulasi uang hari raya penuaian, keterangan pengeluaran pepantan bulanan, rekapitulasi uang jemaat, dan laporan kartu persembahan. Laporan bulanan dibuat oleh komisi keuangan berdasarkan laporan majelis pada rapat harian.

##### **b. Laporan tahunan GKJ Wedi**

Laporan tahunan GKJ Wedi berupa buku berjudul Materi Sidang Majelis Terbuka GKJ Wedi yang juga digunakan sebagai acuan dalam sidang terbuka.

#### **4.5 Evaluasi Penerapan Akuntansi Pada GKJ Wedi**

Gereja dalam menerapkan akuntansi sudah berjalan cukup baik, karena akuntansi yang diterapkan sudah mampu memenuhi kebutuhan Gereja. Tetapi akan lebih baik apabila akuntansi di GKJ Wedi sesuai dengan standar yang ada, khususnya dalam hal pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dalam GKJ Wedi sebaiknya sesuai dengan PSAK No.45. Dengan diterapkannya pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK No.45 akan membantu Gereja dalam memberikan informasi yang lebih lengkap bagi pihak yang membutuhkan. Pelaporan keuangan Gereja saat ini hanya dapat memberikan informasi mengenai kas yang masuk dan keluar. Jika GKJ Wedi menggunakan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK No.45, GKJ Wedi dapat memberikan informasi tidak hanya berkaitan dengan kas masuk dan keluar, tetapi juga mengenai jumlah aset, jumlah kewajiban, dan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Gereja dalam satu periode. Selain pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar, penulis juga meminta Gereja agar lebih memerhatikan dalam mengelompokkan pengeluaran dan pemasukan. Pada tahun 2015 ditemukan pengeluaran yang tak terduga dengan nominal yang cukup besar, hal ini dikarenakan di dalam pengeluaran tak terduga terdapat pengeluaran untuk membantu dalam pembangunan gedung Gereja Papanthan, dan

bantuan pengadaan kendaraan bagi Pendeta. Pengeluaran untuk bantuan pembangunan dan pengadaan motor seharusnya dapat dianggarkan terlebih dahulu, dan kelompok pengeluaran tidak terduga berisi pengeluaran yang benar – benar tidak di duga seperti kebakaran.

#### **4.6 Perapan Akuntabilitas di GKJ Wedi**

Penerapan akuntabilitas GKJ Wedi sesuai dengan dimensi akuntabilitas menurut Koopel (2005) adalah :

##### **1. Transparansi**

Transparansi merupakan nilai utama dari akuntabilitas, karena transparansi merupakan wujud keterbukaan agensi terhadap prinsipal. Gereja menginformasikan kinerja yang dilakukan kepada jemaat selaku pemberi dana dengan beberapa cara, yaitu pengadaan Warta Gereja, Warta Gereja merupakan pengumuman yang diberikan Gereja setiap minggu, warta Gereja disampaikan secara lisan maupun tertulis. Warta Gereja berisi informasi kegiatan yang dilakukan Gereja dan pemasukan yang diterima dari jemaat pada ibadah sebelumnya, dan pemasukan yang diterima Gereja selama satu bulan. Selain Warta Gereja, Gereja juga mengadakan Rapat harian. Rapat harian merupakan rapat yang diadakan Gereja setiap sebulan sekali. Rapat harian dihadiri oleh seluruh Majelis yang ada. Dalam rapat ini, setiap majelis melaporkan pemasukan dan pengeluaran Gereja selama satu bulan dan dicatat oleh komisi keuangan. Setelah proses pencatatan, komisi keuangan berkewajiban melaporkan setiap hasil pencatatan kepada semua majelis selaku wakil dari jemaat berupa laporan keuangan bulanan. Terakhir adalah Sidang Terbuka, Sidang Terbuka merupakan rapat yang diadakan oleh Gereja setiap akhir tahun. Sidang terbuka dapat diikuti oleh seluruh warga gereja, baik itu majelis maupun jemaat pada umumnya. Sidang Terbuka membahas kinerja Gereja selama satu tahun, dan rencana kerja Gereja pada tahun berikutnya.

##### **2. Liabilitas**

Liabilitas yang dimaksud Koopel dalam unsur akuntabilitas adalah konsepsi mengenai pemberian *reward* maupun hukuman kepada individu, untuk tindakan yang mereka lakukan. Setelah dilakukan wawancara dan observasi, konsep liabilitas tidak berjalan dalam proses pengelolaan keuangan GKJ Wedi. Hal ini dikarenakan, seluruh tindakan yang dilakukan oleh individu di dalam Gereja dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada majelis, tetapi dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai pimpinan Gereja

##### **3. Pengendalian**

Didalam GKJ Wedi, kontrol dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan adanya alur pertanggungjawaban. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh komisi akan diertanggungjawabkan kepada koordinator tiap komisi, tiap koordinator tiap komisi akan memberikan pertanggungjawaban kepada majelis harian. Selain dengan alur pertanggungjawaban, Gereja melakukan pengendalian dengan adanya anggaran. Setiap aktivitas yang dilakukan Gereja harus sesuai dengan anggaran yang ditetapkan pada awal tahun.

##### **4. Responsibilitas dan Responsivitas**

Responsibilitas mengharuskan penggunaan keahlian yang dibatasi oleh standar profesional dan moral. Mengacu pada hal tersebut, responsibilitas GKJ Wedi belum terlaksana dengan baik. Karena dalam mengelola keuangan, Gereja tidak melakukan pengelola keuangan sesuai dengan standar yang ada. Hal ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara laporan keuangan Gereja dengan standar yang ada, yaitu PSAK No 45.

Responsivitas berkaitan dengan kemampuan Gereja memenuhi kebutuhan dan kepentingan prinsipal, dalam hal ini adalah jemaat dan Tuhan. Agar kebutuhan dan kepentingan jemaat dan Tuhan terlaksana, maka kinerja Gereja didasarkan pada anggaran yang kegiatan didalamnya didasari Firman Tuhan.

#### **4.7 Evaluasi Penerapan Akuntabilitas di GKJ Wedi**

Akuntabilitas di dalam GKJ Wedi sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai tindakan yang dilakukan Gereja untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan. Upaya yang dilakukan Gereja berupa pengadaan warta Gereja

setiap minggu, yang menginformasikan jumlah pemasukan yang diterima Gereja pada ibadah. Selain itu, Gereja juga menginformasikan pemasukan dan pengeluaran Gereja secara rutin melalui rapat Majelis. Pengendalian di dalam GKJ Wedi juga sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya anggaran. Setiap pengeluaran yang dilakukan oleh Gereja harus sesuai dengan anggaran yang dibuat pada awal periode.

Dalam penerapan akuntabilitas, GKJ Wedi masih memiliki beberapa kekurangan. Kekurangannya yaitu, laporan keuangan yang dibuat oleh GKJ Wedi hanya sebatas pemasukan dan pengeluaran kas, dan tidak sesuai dengan PSAK 45. Hal tersebut mengakibatkan Gereja tidak dapat mengetahui dan menyampaikan nilai aset yang dimiliki Gereja selain kas, seperti gedung, kendaraan, dan komputer. Kekurangan yang kedua adalah tidak adanya penghargaan bagi pengelola dalam menjalankan tugasnya. Padahal, dengan adanya penghargaan, dapat memotivasi pengelola dalam menjalankan tugasnya.

#### **4.8 Sistem Pengendalian Internal GKJ Wedi**

Sistem pengendalian internal menurut Coso (2013) adalah sebagai berikut :

1. **Lingkungan Pengendalian**  
Dalam GKJ Wedi, lingkungan pengendalian sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Struktur organisasi di GKJ Wedi sudah disusun dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya pembagian tanggungjawab yang jelas. Pengelola di dalam Gereja juga memiliki etika yang baik, karena pengelola percaya tugas mereka bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk memuliakan nama Tuhan. Kekurangan yang ada dalam lingkungan pengendalian GKJ Wedi adalah pengelola kurang berkompeten dalam bidangnya, sehingga pengelola tidak dapat menjalankan tugas dengan maksimal, dan juga terdapat pembagian tugas yang kurang baik, khususnya dalam bagian keuangan.
2. **Penilaian Resiko**  
Penilaian resiko yang ada di GKJ Wedi sudah berjalan dengan baik, pihak pengelola sudah memahami resiko yang mungkin akan terjadi dan membentuk aktivitas –aktivitas yang mengurangi kemungkinan terjadinya resiko tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Gereja mewajibkan setiap komisi mengajukan rencana kegiatan dan anggaran, agar setiap kegiatan yang ada dapat dipantau. Dan dengan pengajuan rencana kegiatan, dapat mencegah adanya perbedaan tujuan antara komisi dengan Gereja.
3. **Aktivitas Pengendalian**  
Dalam aktivitas pengendalian, GKJ Wedi sudah melaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya otorisasi, pembagian tanggung jawab dan dokumen untuk setiap transaksi. Adanya otorisasi di GKJ Wedi dibuktikan dalam pembuatan rencana kerja setiap komisi. Setiap rencana kerja dan anggaran setiap komisi harus disetujui terlebih dahulu oleh Majelis Pendamping setiap komisi, dan koordinator bidang yang bertanggungjawab. Sedangkan dokumen dapat dilihat dengan adanya buku laporan bulanan yang berisi bukti kas masuk dan keluar setiap bulannya.
4. **Informasi dan Komunikasi**  
Sistem informasi dan komunikasi di GKJ Wedi sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya prosedur, dan pemberian tanggungjawab yang jelas. Pihak yang bertanggungjawab mencatat, dan membuat laporan mengenai keuangan Gereja adalah Komisi Keuangan. Setiap catatan dan laporan keuangan yang dibuat juga harus disertai bukti dan persetujuan dari pihak yang bertanggungjawab.
5. **Monitoring**  
Monitoring dilakukan agar dapat membantu manajer mengetahui ketidakefektifan pelaksanaan unsur –unsur pengendalian yang lain. GKJ Wedi melakukan pemantauan dengan cara evaluasi, agar penyimpangan yang ditemukan dapat ditanggapi dengan baik dan mencerminkan adanya kesadaran mengenai pentingnya pengendalian yang tertanam dalam diri pengelola.

## 4.9 Sistem dan Prosedur Pemasukan dan Pengeluaran Kas GKJ Wedi

### 1. Sistem dan Prosedur Pemasukan GKJ Wedi

Di dalam penerimaan kas , GKJ Wedi memiliki prosedur sebagai berikut:

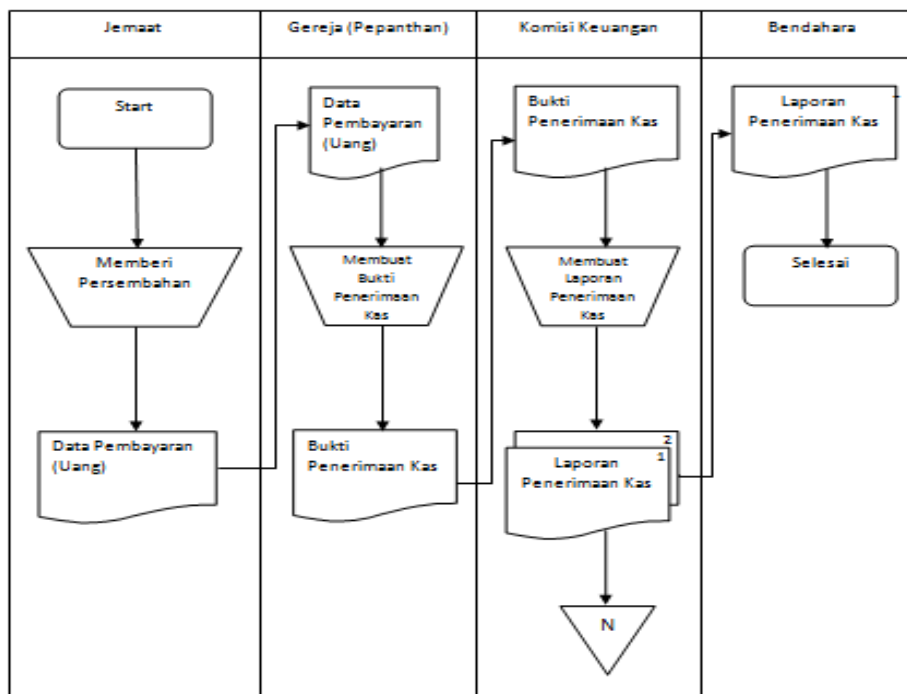
- Persembahan yang diterima Gereja dikumpulkan oleh anggota Komisi Keuangan Gereja yang ada di Gereja Penpanthan maupun Gereja Induk.
- Setiap anggota Komisi Keuangan Gereja yang mengumpulkan persembahan dari Gereja Penpanthan maupun Induk menyetorkan persembahan yang dikumpulkan pada rapat Komisi Keuangan.
- Persembahan yang terkumpul dalam rapat Komisi Keuangan disetorkan kepada Bendahara Gereja untuk disimpan.

### 2. Sistem dan Prosedur Pengeluaran GKJ Wedi

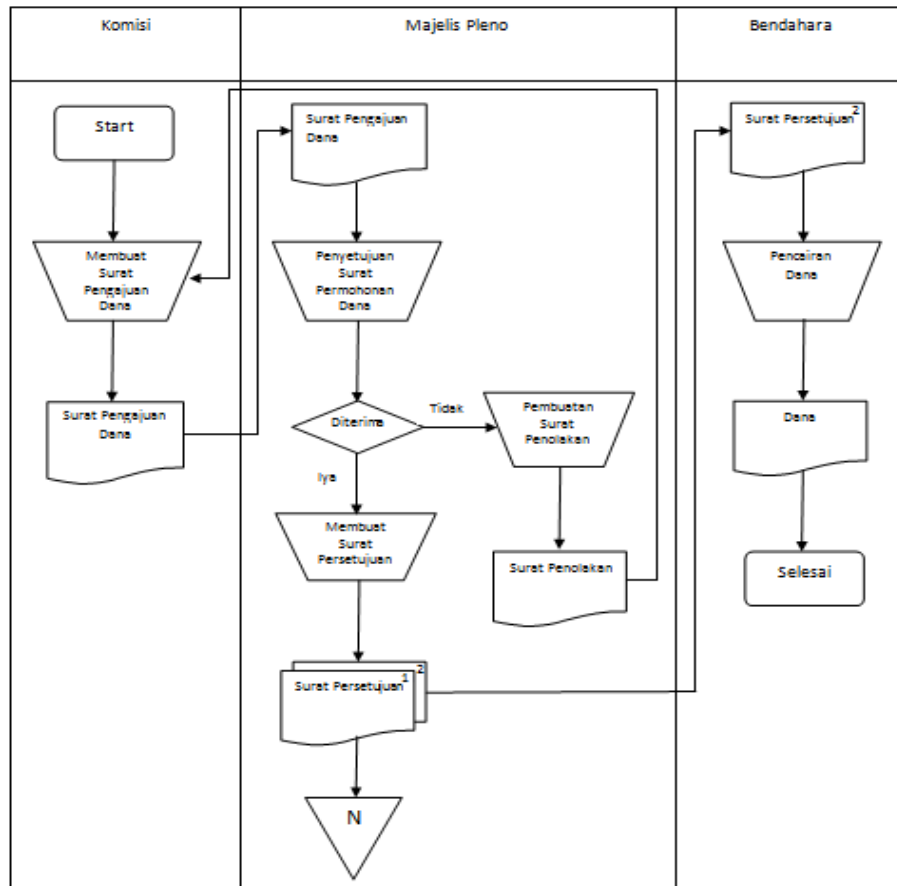
Di dalam melakukan pengeluaran , GKJ Wedi memiliki prosedur sebagai berikut:

- Komisi atau Majelis yang bersangkutan membuat surat permohonan dana yang diajukan kepada Majelis Pleno. Surat permohonan yang diajukan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan komisi atau majelis pada awal tahun, dan seandainya ada perbedaan maka harus terdapat alasan yang jelas.
- Majelis Pleno melakukan pembahasan mengenai surat permohonan dana dari komisi atau majelis pada rapat Majelis Pleno.
- Surat permohonan dana yang telah disetujui akan dilaporkan kepada Bendahara Gereja, agar Bendahara Gereja menyiapkan dana yang diminta.
- Komisi atau Majelis yang bersangkutan mengambil dana yang diminta kepada Bendahara Gereja.

Gambar 4.2  
Flowchat Proses Kas Masuk GKJ Wedi



Gambar 4.4  
Flowchart Proses Kas Keluar



Gambar 4.4  
Penjelasan Simbol Flowchart Proses Kas Masuk dan Keluar GKJ Wedi

Simbol	Nama	Penjelasan
	Terminal	Awal atau akhir dari suatu program
	Dokumen	Dokumen atau laporan
	Salinan dari satu dokumen	Satu dokumen di salin menjadi beberapa lembar
	Operasi Manual	Proses yang dilakukan secara manual
	File	File dari dokumen yang disimpan secara manual
	Keputusan	Memutuskan untuk langkah selanjutnya
	Alur Dokumen atau Proses	Arah alur suatu proses atau dokumen

#### **4.10 Proses Pemeriksaan Keuangan GKJ Wedi**

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Gereja, terdapat proses sebagai berikut :

1. Tim Pemeriksaan Keuangan mengadakan rapat mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan keuangan.
2. Setelah diadakan rapat, hasil rapat berupa usulan waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan keuangan diserahkan kepada Majelis Pleno.
3. Setelah disetujui oleh Majelis Pleno, Gereja membuat surat undangan yang ditujukan kepada pihak yang akan diperiksa. (Bendahara, Majelis yang bersangkutan, dan Komisi)
4. Pada hari pelaksanaan, pihak yang bersangkutan memberikan realisasi anggaran selama satu periode beserta bukti kas masuk dan keluar.
5. Tim Pemeriksa Keuangan mencocokkan pemasukan dan pengeluaran dengan bukti yang ada.
6. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa Keuangan memberikan hasil pemeriksaan berupa berita acara. Hasil dapat berupa baik, baik dengan ketentuan khusus seperti beberapa bukti belum ada, dan tidak baik.

#### **4.10 Evaluasi Pengendalian Internal GKJ Wedi**

Pengendalian internal di GKJ Wedi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pengendalian internal di GKJ Wedi adalah, yang pertama adanya pemisahan tanggung jawab yang jelas, sehingga tugas yang ada dapat dijalankan dengan lebih efisien. Yang kedua, setiap pemasukan dan pengeluaran yang terjadi harus disertai bukti dokumen seperti kwitansi, sehingga dapat meminimalisir kecurangan. Ketiga, adanya tim pemeriksaan keuangan yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi keuangan Gereja, sehingga jika terdapat pemasukan dan pengeluaran yang tidak wajar dapat segera diketahui.

Kekurangan dari pengendalian internal GKJ Wedi adalah di dalam lingkungan pengendalian, pengelola dalam GKJ wedi tidak kompeten sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan. Kedua, tidak adanya pemisahan tugas dalam beberapa bagian. Hal ini dapat dilihat dari kewenangan bendahara untuk menyimpan dan mencatat keuangan Gereja, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan.

Untuk meningkatkan pengendalian internal GKJ Wedi, penulis menyarankan pengelola GKJ Wedi agar merekrut tenaga ahli untuk membantu dalam mengelola keuangan GKJ Wedi, dan melakukan pemisahan tugas, khususnya dalam bagian – bagian yang memungkinkan terjadinya kecurangan, seperti pada pencatatan dan penyimpanan kas Gereja.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa terhadap penerapan akuntansi, akuntabilitas dan pengendalian internal yang dilakukan di GKJ Wedi maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Kegiatan akuntansi, akuntabilitas dan pengendalian internal pada GKJ Wedi sudah berjalan dengan baik walaupun belum sesuai dengan standar yang ada, yaitu PSAK No 45.
2. Terdapat perbedaan antara laporan keuangan GKJ Wedi dengan PSAK 45, diantaranya laporan keuangan GKJ Wedi berupa laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan yang dibuat hanya menginformasikan pengeluaran dan pemasukan yang diterima oleh Gereja, tidak menginformasikan mengenai nilai aset selain kas. Sedangkan menurut standar, laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
3. GKJ Wedi sudah menerapkan akuntabilitas dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya aspek transparansi, liabilitas, kontrol, dan responsivitas.
4. Pengendalian internal dalam GKJ Wedi sudah berjalan dengan baik, sehingga mampu mengurangi kemungkinan terjadi kecurangan, walaupun terdapat beberapa prosedur yang belum terlaksana dengan baik seperti lingkungan pengendalian, dimana karyawan

yang mengelola kurang berkompeten, dapat diandalkan, dan etis serta kurangnya aktivitas pengendalian karena belum adanya pemisahan tugas di beberapa bagian.

## 5.2 Saran

Penulis memiliki beberapa saran terhadap GKJ Wedi, yaitu :

1. GKJ Wedi sebaiknya membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45, sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh gereja dalam laporan keuangan lebih jelas, relevan, dapat dipercaya dan transparan dalam pelaporannya.
2. GKJ Wedi lebih memperhatikan dalam mengelompokkan pemasukan dan pengeluaran, agar tidak terjadi kesalahan seperti pada pengeluaran tidak terduga yang mengakibatkan pengeluaran tidak terduga menjadi tidak wajar.
3. GKJ Wedi memerlukan adanya tenaga ahli untuk membantu dalam mengelola keuangan dan pemeriksaan internal sehingga, sehingga keuangan Gereja lebih akuntabel dan dapat dipercaya.
4. Gereja perlu melakukan pemisahan tugas dan tanggung jawab, orang yang memiliki tugas menyimpan uang Gereja tidak boleh sama dengan orang yang bertugas melakukan pencatatan. Hal ini dapat meminimalisir terjadi penyalahgunaan uang Gereja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Hauriasi Karen Van-Peursem Howard Davey .(2016)."Budget processes in the Anglican Church of Melanesia: an emergent ethnic identity". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 29 Iss 8 pp. 1294 – 1319
- Catriona Paisey Nicholas J. Paisey. (2011)."Visibility, governance and social context". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 24 Iss 5 pp. 587 – 621
- Dewi, Atmadja, dan Addiputra.(2015). "Konsep Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan (Studi Kasus pada Gereja Kerasulan Baru di Indonesia, Distrik Jawa Timur dan Bali)". *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 3 No 1 Tahun 2015)*.
- Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini. (2005). *Pengantar Akuntansi I*. Bandung: UNIKOM.
- Ermansjah Djaja. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fransiskus, R. et al.(2011)."Studi Etnografi:Akuntabilitas Spiritual Pada Organisasi Gereja Katolik yang Terinkulturasi Budaya Lokal". Vol.2 no 1 2
- Funnell Warwick Williams Robert. (2014)."The religious imperative of cost accounting in the early industrial revolution". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 27 Iss 2 pp. 357 – 381
- Gavriel, I. (2013). Skandal "Gereja Bethany" Surabaya , Pendeta Gelapkan Dana Gereja 4,7 Triliun Terancam Penjara: Detiknews [Online]. Tersedia: <http://www.deliknews.com/2013/02/27/skandal-gereja-bethany-surabaya-pendeta-gelapkan-dana-gereja-47-triliun-terancam-penjara/> [08 November 2016].
- H. Lili M. Sadeli. (2009). *Dasar-Dasar Akuntans*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Helen Irvine, (2005),"Balancing money and mission in a local church budget", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 18 Iss 2 pp. 211 – 237
- Horngren, Harrison. (2007) *.Akuntansi Edisi Ke-7*.Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia.(2009). Standar Akuntansi Keuangan revisi 2009. Jakarta:Salemba Empat.



- John B. Duncan Dale L. Flesher Morris H. Stocks. (1999). "Internal control systems in US churches". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 12 Iss 2 pp. 142 – 164
- Jonathan, Koppel. (2005). "Pathologies Of Accountabilty ICANN and the Challenge of Multiple Accountability Disorder". *Public Administration Review*. Vol. 65 No. 1.
- Levita, P.L.(2015). *Analisis Penerapan Akuntansi Organisasi Nirlaba Entitas Gereja Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45 (Studi Kasus Gereja Masehi Injili di Minahasa Baitel Kolongan)*. Tugas Akhir pada Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Negeri Manado.
- Mechos, D.L. (2015). Korusi Uang Gereja, Pendeta Ini Dipenjara 8 Tahun: Tempo [Online]. Tersedia: <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/21/118720890/korupsi-uang-gereja-pendeta-ini-dipenjara-8-tahun>. [08 November 2016].
- Merystika Kabuhung.(2013). "Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Pada Organisasi Nirlaba Keagamaan". *EMBA*. Vol 1 No 3. 339-348.
- Moleong, L.J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2014). *Audit 1*. Edisi ke-6. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2014). *Audit 2*. Edisi ke-6. Jakarta: Salemba Empat.
- Onny S, Priyono dan A. M. W. Pranarka (1996). *Pemberdayaan : Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Peter Booth. (1993). "Accounting in Churches: A Research Framework and Agenda". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 6 Iss 4 pp.
- Pontoh, C.R. (2013). "Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No.45 Pada Gereja BZL". ISSN.2303-1174.
- Rmc. (2013). Pdt Abraham Alex Dilaporkan Gelapkan Dana Rp 4,7 T: Surabaya Pagi.com [Online]. Tersedia: <http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962d2b1298f73a79b173c34553b88860696>. [08 November 2016].
- Rudito, Bambang dan Famiola. (2008). *Social Mapping*. Bandung: PT. Rekayasa Sains.
- Sawyer. (2005). *Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Silvia dan Ansar. (2011). "Akuntabilitas Dalam Prespektif Gereja Protestan (Studi Fenomenologis Pada Gereja Protestan Indonesia Dongala Jemaat Manunggal Palu)". *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*.
- Simanjuntak, dan Januarsi.(2011). "Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid". *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*.
- Soemarso S. R. (2004). "Akuntansi Satu Pengantar". Bukusatu. Edisi lima. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Warren, Reeve, dan Fess.(2008) *Accounting (Pengantar Akuntansi)*. Buku Satu. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Wilopo. (2006). "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia." *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*. 23-26 Agustus 2006.

# RASIO KEUANGAN DALAM MEMREDIKSI KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

Eva Lisnawati Sidabalok<sup>1)</sup>  
Dwi Risma Deviyanti<sup>2)</sup>  
Yoremia Lestari Ginting<sup>3)</sup>

Universitas Mulawarman Samarinda<sup>1,2,3)</sup>

## *Abstract*

*The purpose of this study was to analyzed how much influence the return on assets (ROA), current ratio (CR), and debt ratio (DR) to the financial distress of coal mining companies listed in Indonesian Stock Exchange the period of 2010 – 2015.*

*This study used secondary data obtained from IDX website with data collection method of purposive sampling then obtained 35 data sample research. Method of data analysis in this research is multiple linear regression analysis.*

*Result of this research is return on assets (ROA) have significant positive effect to financial distress, current ratio (CR) has no positive significant effect on financial distress, and debt ratio (DR) has a significant negative effect on financial distress of coal mining company. The results of this study obtained R square value of 0.869 which means the company's financial distress condition can be predicted by using the four independent variabls.*

*Keywords: financial distress, return on assets, current ratio, and debt ratio.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Akibat dari fluktuasi harga batubara di pasar Internasional yang semakin menurun, beberapa perusahaan pertambangan batubara di Indonesia mengurangi tingkat produksinya. Bahkan tidak hanya produksi batubara saja yang dikurangi tetapi pengurangan karyawan atau PHK juga terjadi di beberapa perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Produksi batubara yang semakin menurun dapat berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu bertahan dalam krisis global seperti ini, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang dapat berujung pada masalah atau kesulitan keuangan (*financial distress*). Menurut Platt dan Platt dalam Fahmi (2012:93) mendefinisikan *financial distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi dimulai dari ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas serta ditandai dengan laba operasi perusahaan negatif selama dua tahun berturut-turut.

Dalam penelitian ini ada beberapa rasio yang digunakan untuk memprediksi *financial distress*. Yang pertama adalah rasio profitabilitas (*Return On Assets*) yaitu salah satu dari bentuk rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset (Kasmir,2014:196). Kedua adalah rasio likuiditas yang diukur dengan *current ratio* yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dan dihitung dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar (Kasmir,

2014:134). Ketiga, rasio leverage atau rasio solvabilitas yang diukur dengan *debt ratio* yang dicari dengan cara membagi total hutang dengan total aset (Kasmir, 2014:151).

*Financial distress* dapat terjadi pada seluruh jenis perusahaan meskipun itu perusahaan besar sekalipun. Demikian pula dengan perusahaan pertambangan batubara yang tidak luput dari kondisi *financial distress*. Melihat kondisi perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang belum stabil hingga saat ini, maka penting untuk dilakukan penelitian pengaruh rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan (*financial distress*) pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Tahun 2010-2015.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015?
2. Apakah *current ratio* berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015?
3. Apakah *debt ratio* berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015?

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Signalling Theory

*Signalling theory* (teori sinyal) menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Berdasarkan teori sinyal, jika manager mengharapkan pertumbuhan perusahaan di masa depan pada tingkat yang tinggi, mereka akan mencoba memberikan sinyal kepada investor melalui laporan keuangan (Marlinah,2014).

### 2.2. Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2012) laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan.

### 2.3. Analisis Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2014;104) analisis rasio merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya, sedangkan rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, sehingga dari hasil rasio ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.

### 2.4. Financial Distress

*Financial distress* merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis yang akan berujung pada kebangkrutan jika tidak segera diatasi. Fahmi (2012:93) mendefinisikan *financial distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan yang dimulai dari

ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas.

## 2.5. Mengukur *Financial Distress* Dengan Menggunakan Model Altman Z-Score

Edward I Altman di *New York University* adalah salah satu peneliti awal yang mengkaji pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dan menghasilkan rumus yang disebut *Z-Score*, rumus ini adalah model rasio yang menggunakan *multiple discriminate analysis* (MDA) yang memerlukan lebih dari satu rasio keuangan yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan untuk membentuk suatu model yang komprehensif (Rudianto,2013:254).

## 2.6. Pengembangan Hipotesis

### **Pengaruh *Return on Assets* terhadap *Financial Distress***

*Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Kasmir,2014:196). Dengan meningkatnya rasio profitabilitas perusahaan berarti perusahaan tersebut memiliki laba yang besar pula, sehingga kondisi perusahaan yang demikian mampu terhindar dari kondisi *financial distress*.

H<sub>1</sub>: *Return on Assets* berpengaruh terhadap *financial distress*.

### **Pengaruh *Current Ratio* terhadap *Financial Distress***

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan, yang berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban/utang pada saat ditagih atau jatuh tempo (Kasmir,2014:145). Dengan semakin kecilnya nilai dari *current ratio* maka menunjukkan keadaan perusahaan masih mampu untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya dan perusahaan dapat terhindar dari *financial distress*.

H<sub>2</sub>: *Current Ratio* berpengaruh terhadap *Financial Distress*.

### **Pengaruh *Debt Ratio* terhadap *Financial Distress***

Rasio leverage adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio leverage dalam penelitian ini adalah *debt ratio*, dimana rasio ini diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total aset. Dengan semakin meningkatnya nilai dari *debt ratio* maka menandakan perusahaan dalam keadaan *financial distress* dikarenakan kewajibannya perusahaan yang terlalu tinggi.

H<sub>3</sub> : *Debt ratio* berpengaruh terhadap *financial distress*.

## III. METODE PENELITIAN

### 3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 - 2015. Data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan *time series* (Ridha, dkk,2016). Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang bertujuan untuk memperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2015 secara terus menerus.
2. Perusahaan pertambangan batubara menyampaikan laporan keuangan 31 Desember secara rutin selama 6 tahun sesuai dengan periode penelitian yang

diperlukan (laporan keuangan per 31 Desember merupakan laporan keuangan yang telah diaudit).

3. Perusahaan pertambangan batubara yang tidak berubah sektor selama periode 2010-2015.

4. Perusahaan pertambangan batubara yang mengalami *financial distress* selama periode 2010-2015.

Diperoleh sebanyak 35 data yang memenuhi kriteria sampel tersebut selama tahun 2010 sampai dengan 2015.

### 3.2. Variabel Independen

*Return on Assets* (ROA) dihitung dengan rumus sebagai berikut (Kasmir,2014:110):

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

*Current Ratio* (CR) dihitung dengan rumus sebagai berikut (Kasmir,2014:135):

$$CR = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

*Debt Ratio* (DR) dihitung dengan rumus sebagai berikut (Kasmir,2014:156):

$$DR = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

### 3.3. Variabel Dependen

*Financial distress* diukur dengan menggunakan metode Altman *Z-score* khusus untuk perusahaan *go public* dengan rumus sebagai berikut (Rudianto,2013:254):

$$Z\text{-score} = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 0,99X_5$$

Keterangan:

X<sub>1</sub> = Modal Kerja/Total Aset

X<sub>2</sub> = Laba Ditahan/Total Aset

X<sub>3</sub> = EBIT/Total Aset

X<sub>4</sub> = Nilai Pasar Modal Saham (MVE)/Nilai Buku Hutang (BVD)

X<sub>5</sub> = Total Penjualan/Total Aset

Dasar klasifikasi dalam metode altman ini adalah sebagai berikut:

1.  $Z > 2,99$  = Zona "Aman"
2.  $1,81 < Z < 2,99$  = Zona "Rawan"
3.  $Z < 1,81$  = Zona "*Distress*"

### 3.4. Alat Analisis

#### 3.4.1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah bagian dari statistik yang berkaitan dengan pengumpulan suatu data yang bertujuan untuk mendeskripsikan data lalu disajikan baik secara *numeric* (distribusi frekuensi, nilai sentral, penyimpangan data, ukuran penempatan dan distribusi data) maupun grafis (grafik, table atau diagram) agar lebih mudah dibaca dan disimpulkan, namun penarikan kesimpulan hanya terbatas pada data yang diolah (Yudaruddin,2014:37).

### 3.4.2. Uji Asumsi Klasik

#### 3.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki variabel residual (*error*) yang berdistribusi normal. Hal ini karena dalam uji t untuk melihat tingkat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen tidak dapat diaplikasikan jika residual tidak mempunyai distribusi normal (Yudaruddin,2014:129).

#### 3.4.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  dan nilai VIF  $\geq 10$  maka terjadi gejala multikolinieritas, sebaliknya jika nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali,2016:103-104).

#### 3.4.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali,2016:107). Jika terjadi autokorelasi maka dilakukan transformasi data dan penambahan data, salah satu uji untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan Durbin Watson . jika  $DW < d_L$  maka ada autokorelasi positif atau  $DW > 4 - d_L$  maka ada autokorelasi negatif, sedangkan bila  $d_u < DW < 4 - d_u$  tidak terjadi autokorelasi (Yudaruddin,2014:138).

#### 3.4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Yudaruddin,2014:142). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali,2016:134).

#### 3.4.3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali,2016:95).

#### 3.4.4. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model (Uji F) digunakan untuk melihat ketelitian/kelayakan model yang dapat diketahui dari *p-value* (nilai peluang) hasil uji F hitung atau nilai

signifikansi F pada ANOVA (menguji koefisien regresi keseluruhan) (Yudaruddin,2014:121).

### 3.4.5. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2016:97). Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya.

### 3.4.6. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode kuadran terkecil akan menghasilkan suatu model/persamaan yang akan digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen terhadap dependen. Analisis regresi linier berganda untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu pengaruh *return on assets*, *current ratio*, dan *debt ratio* terhadap *financial distress* perusahaan. Persamaan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = *financial distress*
- a = konstanta
- b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub>,b<sub>3</sub>,b<sub>4</sub> = koefisien regresi
- X<sub>1</sub> = *return on assets*
- X<sub>2</sub> = *current ratio*
- X<sub>3</sub> = *debt ratio*
- e = *standar error*

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Statistik Deskriptif

**Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
ROA	35	-,64	,04	-,0666	,13106
CR	35	,10	3,26	1,5249	,69047
DR	35	,27	1,86	,6949	,30220
FD	35	-5,09	1,71	,6703	1,25222
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Data sekunder yang diolah (SPSS 22)

### 4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 4.2.1. Hasil Uji Normalitas

**Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal	Mean	,000000
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	,45262106
Most Extreme	Absolute	,121
Differences	Positive	,121
	Negative	-,079
Test Statistic		,121

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200<sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder yang diolah (SPSS 22)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi telah terdistribusi secara normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > signifikansi 0,05.

#### 4.2.2. Hasil Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas**

		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	ROA	,699	1,431
	CR	,744	1,344
	DR	,716	1,397

a. Dependent Variable: FD

Sumber: Data sekunder yang diolah (SPSS 22)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai VIF masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10. Hasil pengujian model regresi tersebut menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas dalam model regresi. Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas layak digunakan sebagai prediktor.

#### 4.2.3. Hasil Uji Autokorelasi

**Tabel 4.4 Hasil Runs Test**

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,05793
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	14
Z	-1,369
Asymp. Sig. (2-tailed)	,171

a. Median

Sumber: Data sekunder yang diolah (SPSS 22)

Berdasarkan hasil pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai test adalah -0,05793 dengan probabilitas 0,171 dan tidak signifikan pada 0,05 yang berarti hipotesis



nol diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

#### 4.2.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	,282	,233			1,210	,235
ROA	,232	,488	,098		,476	,638
CR	-,072	,090	-,160		-,802	,428
DR	,239	,210	,231		1,138	,264

a. Dependent Variable: Absolute

Sumber: Data sekunder yang diolah (SPSS 22)

Berdasarkan hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$  yaitu 0,638 (ROA), 0,428 (CR), dan 0,264 (DR) sehingga data tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

#### 4.3. Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.6 Hasil Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,932 <sup>a</sup>	,869	,857	,47402

a. Predictors: (Constant), DR, CR, ROA

b. Dependent Variable: FD

Sumber: Data sekunder yang diolah (SPSS 22)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,932 yang berarti tingkat keeratan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen adalah tinggi. Nilai R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,869 menunjukkan bahwa 86,9% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 13,1% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. *Standar error of the estimate* sebesar  $0,47402 < 1,25222$  (standar deviasi *financial distress*) berarti model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

#### 4.4. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 4.7 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	46,316	3	15,439	68,711	,000 <sup>b</sup>
	Residual	6,965	31	,225		
	Total	53,282	34			

a. Dependent Variable: FD

b. Predictors: (Constant), DR, CR, ROA

Sumber: Data sekunder yang diolah (SPSS 22)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 68,711 dan hasil ini lebih besar daripada F tabel yaitu sebesar 2,87 dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi *financial distress* atau dapat dikatakan bahwa model regresi adalah model yang baik/layak (*goodness of fit*).

#### 4.5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,461	,352		4,149	,000
ROA	7,210	,737	,760	9,788	,000
CR	,188	,136	,104	1,381	,177
DR	-,852	,318	-,206	-2,681	,012

a. Dependent Variable: FD

Sumber: Data sekunder yang diolah (SPSS 22)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh signifikan terhadap FD, hal ini dapat dilihat dari signifikansi ROA sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Variabel CR tidak berpengaruh signifikan terhadap FD, hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,177 yang lebih besar dari 0,05. Variabel DR berpengaruh signifikan terhadap FD, hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi 0,012 lebih kecil dari 0,05.

#### 4.6. Hasil Regresi Linear Berganda

Tabel *coefficients* di atas menunjukkan data hasil regresi linear berganda, dan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,461 + 7,210ROA + 0,188CR - 0,850DR + e$$

Dari model persamaan tersebut, maka diperoleh penjelasan hasil sebagai berikut:

1. Konstanta

Konstanta sebesar 1,461 menyatakan bahwa jika variabel *return on assets* ( $X_1$ ), *current ratio* ( $X_2$ ), dan *debt ratio* ( $X_3$ ) diperhitungkan, maka nilai *financial distress* ( $Y$ ) perusahaan akan meningkat sebesar 1,461 persen.

2. Pengaruh *Return on Assets* ( $X_1$ ) terhadap *financial distress* ( $Y$ )

Hasil pengujian menunjukkan nilai variabel *return on assets* ( $X_1$ ) sebesar 7,210 dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  berarti bahwa model tersebut signifikan. Nilai variabel *return on assets* (ROA) sebesar 7,210 berarti bahwa bila terjadi kenaikan *return on assets* sebesar 1% maka nilai *financial distress* (*z-score*) akan mengalami peningkatan sebesar 7,210 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan.

3. Pengaruh *current ratio* ( $X_2$ ) terhadap *financial distress* ( $Y$ )

Hasil pengujian menunjukkan nilai variabel *current ratio* ( $X_2$ ) sebesar 0,188 dengan tingkat signifikansi  $0,177 > 0,05$  berarti bahwa model tersebut tidak signifikan. Nilai variabel *current ratio* (CR) sebesar 0,188 berarti bahwa setiap kenaikan *current ratio* sebesar 1% maka nilai *financial distress* (*z-score*) akan mengalami peningkatan sebesar 0,188 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan.

4. Pengaruh *debt ratio* ( $X_3$ ) terhadap *financial distress* ( $Y$ )

Hasil pengujian menunjukkan nilai variabel *debt ratio* ( $X_3$ ) sebesar -0,852 dengan tingkat signifikansi  $0,012 < 0,05$  berarti bahwa model tersebut signifikan. Nilai variabel *debt ratio* (DR) sebesar -0,852 berarti bahwa setiap kenaikan *debt ratio* 1% maka nilai *financial distress* (*z-score*) akan mengalami penurunan sebesar 0,852 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan.

#### 4.7. Pembahasan

$H_1$ : *Return on assets* berpengaruh terhadap *financial distress*

Hasil pengujian untuk variabel ROA terhadap *financial distress* memberikan hasil *t* hitung sebesar 9,788 dengan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian menunjukkan bahwa ROA mempunyai pengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress*, hal ini berarti hipotesis satu ( $H_1$ ) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhtar dan Aswan (2017) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress* perusahaan. Berdasarkan konsep, semakin tinggi ROA

perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami *financial distress* dan sebaliknya, apabila profitabilitas (ROA) perusahaan menurun maka akan menyebabkan perusahaan mengalami *financial distress*.

H<sub>2</sub>: *Current ratio* berpengaruh terhadap *financial distress*

Hasil pengujian untuk variabel CR terhadap kondisi *financial distress* memberikan hasil t hitung sebesar 1,381 dengan signifikansi sebesar  $0,177 > 0,05$ . Dengan demikian menunjukkan bahwa CR tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress* perusahaan, hal ini berarti hipotesis dua (H<sub>2</sub>) ditolak. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanto (2013), Atika, dkk (2013) dan Khaliq *et al* (2014) yang menyatakan bahwa variabel CR berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* perusahaan. Dalam penelitian ini CR tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress* karena perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimilikinya.

H<sub>3</sub>: *Debt ratio* berpengaruh terhadap *financial distress*

Hasil pengujian untuk variabel DR terhadap *financial distress* memberikan hasil t hitung sebesar -2,681 dengan signifikansi sebesar  $0,013 < 0,05$ . Dengan demikian menunjukkan bahwa DR berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress* perusahaan, hal ini berarti hipotesis tiga (H<sub>3</sub>) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardiyanto (2011), Andre (2013), Martha (2013), Atika, dkk (2013), dan Khaliq *et al* (2014) yang menyatakan bahwa DR berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress* perusahaan. Berdasarkan konsep, penggunaan hutang yang terlalu tinggi dapat membahayakan perusahaan berpotensi mengalami *financial distress*.

## V. PENUTUP

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. *Return on assets* (ROA), *current ratio* (CR), dan *debt ratio* (DR) memiliki kemampuan memprediksi kondisi *financial distress* sebesar 86,9% dimana secara umum hasil tersebut menunjukkan bahwa model ini cukup bagus untuk memprediksi *financial distress*.

2. *Return on assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap prediksi kondisi *financial distress* pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2015. Variabel ROA merupakan variabel yang paling dominan dalam memprediksi kondisi *financial distress*.
3. *Current ratio* (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2015. Sehingga *current ratio* (CR) tidak dapat digunakan untuk memprediksi kondisi *financial distress*.
4. *Debt ratio* (DR) berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2015.

## 5.2. Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada perusahaan sektor pertambangan batubara saja, sehingga hasil penelitian dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian belum bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pada sektor lainnya dan periode penelitian ini juga hanya selama 6 tahun penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andre, Orina. 2013. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Dalam Memprediksi *Financial Distress* (Studi Empiris Pada Perusahaan Aneka Industri yang Terdaftar di BEI). Padang, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Ardiyanto, Feri Dwi dan Presetiono. 2011. Prediksi Rasio Keuangan terhadap kondisi *Financial Distress* Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol.8 No.1
- Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur. 2014. *IUP Kalimantan Timur*.  
[http://pertambangan.kaltimprov.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=133%3Aaiup-kalimantan-timur&catid=40%3Apertambangan-umum&Itemid=103&lang=in](http://pertambangan.kaltimprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=133%3Aaiup-kalimantan-timur&catid=40%3Apertambangan-umum&Itemid=103&lang=in). Diakses tanggal 12 Maret 2017.
- Dwijayanti, S, Patricia Febrina. 2010. Penyebab, Dampak, dan Prediksi dari *Financial Distress* Serta Solusi untuk Mengatasi *Financial Distress*. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, Vol. 2 No. 2, Juli 2010, hal. 191-205.
- Fachrudin, Khaira Amalia. 2008. Kesulitan Keuangan Perusahaan dan Personal. Medan: USU Press.

- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*, Cetakan Kesatu. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan Keempat. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan VIII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Hery. 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Investments, Indonesia. *Produksi dan Ekspor Batubara Indonesia*. <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batubara/item236>. Diakses 14 Maret 2017.
- Irfan, Mochamad. 2014. Analisis *Financial Distress* Dengan Pendekatan Altman Z-Score untuk Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan Telekomunikasi. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen* Vol. 3 No. 1 (2014)
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan ke-7. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Khaliq, Ahmad *et al.* 2014. *Identifying Financial Distress Firms: A Case Study of Malaysia's Government Linked Companies (GLC)*. *International Journal of Economics, Finance and Management* Vol. 3 No. 3
- Lokollo, Antonius. 2013. Pengaruh Modal Kerja Dan Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Pada Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Marlinah, Aan. 2014. Pengaruh Kebijakan Modal Kerja Dan Faktor Lainnya Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 16, No. 2.
- Martani Dwi, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mas'ud, Imam dan Srengga, Reva Maymi. 2011. Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi *Financial Distress* Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jember, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Muhtar dan Aswan. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Terjadinya Kondisi *Financial Distress* Pada Perusahaan Telekomunikasi di Indoneisa. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Informatika* Vol 13 No. 3 Februari 2017.
- Prihtiyani, Eny. 17 Juli 2012. *Harga Batubara Acuan Terus Menurun*. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/07/17/16273582/Harga.Batu.Ba.ra.Acuan.Terus.M.enurun>. Diakses 14 Maret 2017.

- Rahayu, dkk. 2016. Analisis *Financial Distress* Dengan Menggunakan Metode *Altman Z-score, Springate, Dan Smijewski* Pada Perusahaan Telekomunikasi. E-journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Vol.4.
- Ridha, dkk. 2016. Pengaruh Laba Bersih, Laba Operasi, Arus Kas Operasi Terhadap Aktivitas Volume Perdagangan Saham. Jurnal Magister Akuntansi. ISSN 2302-0199
- Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Vitarianjani, Novadea. 2015. Prediksi Kondisi *Financial Distress* dan Faktor Yang Mempengaruhi Studi Empiris Pada Perusahaan Batubara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014, Jember, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), diakses tanggal 05 Mei 2017.
- Yudaruddin, Rizky. 2014. *Statistik Ekonomi*. Cetakan Pertama. Interpena. Yogyakarta.

# TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN BAGI PARA “PENDOSA”

Sudrajat Martadinata<sup>1)</sup>

Arya Zulfikar Akbar<sup>2)</sup>

Universitas Teknologi Sumbawa<sup>1,2)</sup>

## **Abstract**

*This study aims to determine the form of transparency and financial accountability at the Coin Foundation Sumbawa. Using a qualitative approach with qualitative data analysis techniques as well. Where we collect data directly plunge into the field. Interviewing informants, studying the literature, and doing triangulation of sources, data, and research time. Our successful research result concludes that the Sumbawa Coin Foundation utilizes print and online media as a means of effective, efficient, transparent and accountable information dissemination.*

**Keywords :** *print media, online, transparency, accountability.*

## **1. PENDAHULUAN**

Sebagai makhluk paling mulia yang telah diciptakan Tuhan dengan kesempurnaan, semestinya tiap diri manusia berjalan dengan kemuliaanya. Bentuk kemuliaan itu ialah dengan senantiasa memelihara hubungan baik atas seluruh makhluk Tuhan. Di mana hal tersebut merupakan salah satu aspek kekayaan manusia dan menjadi kewajibannya (Martadinata, 2014). Baik dengan hewan, tumbuhan, air, tanah, terutama sekali dengan sesama manusia. Salah satu bentuk upaya dalam memelihara hubungan baik dengan sesama manusia, hendaknya selalu berlaku jujur dan bertanggung jawab. Maka dari itu sikap jujur dan tanggung jawab menjadi penting untuk dilakukan dalam tiap-tiap aktivitas manusia.

Jujur identik dengan transparansi sementara bertanggung jawab sangat dekat dengan makna akuntabilitas. Secara parsial akan kami sampaikan di sini. Transparansi mengandung arti bahwa adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya (Kholmi, 2010). Transparansi harus memenuhi indikator-indikator berikut : terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset, tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang mudah diakses, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat, serta terdapat sistem pemberian informasi kepada publik (Mardisamo, 2002). Transparansi adalah pemberian informasi kepada masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat juga berhak untuk mengetahui ke mana saja aliran dana yang telah dibayarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Nasim dan Romdhon, 2014). Organisasi yang tidak mengedepankan transparansi akan menjadi rentan dengan kritik dari *stakeholder*, karena mereka dapat melihat potret mengenai gambaran organisasi secara terbuka (Ridha dan Basuki, 2012).

Transparansi dalam praktiknya juga membutuhkan kepercayaan (Rawlins, 2008). Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain di mana kita memiliki keyakinan padanya (Nasim dan Romdhon, 2014). Terdapat dialektika psikologis yang sangat kuat dalam jalinan kepercayaan. Antara pihak yang dipercayai dengan pihak yang mempercayai. *Agency theory* (Jensen dan Meckling, 1976) menjelaskan bahwa antara *agent* dengan *principal* memiliki tingkatan kepentingan yang



setara, yakni untuk memperoleh kepuasan yang maksimal. Akan tetapi kuantitas dan kualitas informasi yang dimiliki masing-masing berbeda. Perbedaan informasi yang dimiliki ini menuntut *principal* untuk menjadi lebih amanah di dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan oleh *agent* kepadanya. Dikatakan amanah apabila *agent* itu kapabel, akuntabel, profesional, transparan, dan tepat sasaran (Hakim, 2017). Maka dari itu transparansi yang merupakan salah satu unsur pembentuk amanah, menjadi mutlak untuk dilakukan oleh *principal* kepada *agent*. Agar *level* kepentingan yang dicita-citakan bersama sebagaimana dijelaskan di atas dapat terealisasi dengan baik. Tuntutan untuk menginformasikan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan sumber daya dengan membuat laporan keuangan tidak hanya dilakukajin oleh organisasi bisnis, namun juga organisasi nirlaba (Permatasari, C.L., Yanto, H., Widyanto, 2016). Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik, untuk suatu tujuan yang tidak komersil tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (Agustina, G.W., Herawati, N.T., Atmaja, A.T., 2017). Pelayanan sosial yang sebagian orang menyebutnya dengan usaha-usaha kesejahteraan sosial merupakan perwujudan konsep-konsep kesejahteraan sosial dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. (Raharjo, S.T., 2017) ST RAHARjo jurnal sosio humaniora 2017 vol 4 nomor 3 150-173).

Berikutnya penjelasan tentang akuntabilitas. Mardiasmo (2002) menegaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Rasul (2002) berpendapat bahwa akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawab kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Ketika terjadi permufakatan antara dua pihak, di mana satu pihak pemberi amanah, dan pihak lain berperan sebagai penerima amanah. Maka tuntutan akuntabilitas itu secara otomatis telah mulai berjalan sejak saat itu. Akuntabilitas muncul sebagai kosekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) (Kholmi, 2010).

Di dalam tulisan ini kami akan menyampaikan bagaimana transparansi dan akuntabilitas keuangan pada organisasi nirlaba juga, yakni Coin Foundation Sumbawa. Dengan menghimpun uang dan barang dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan, terutama kepada fakir miskin, anak yatim, dan janda, serta korban bencana alam. Organisasi dengan basis *sosial entrepreneurship* mencoba melayani pasar yang belum digarap, menghilangkan kesenjangan dalam kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, demografis, dan peluang kerja (Kusumasari, B., Setianto, W.A., Suyatna, H., Susanto, E., Yunik, P., 2015).

Coin Foundation Sumbawa terbentuk, berawal dari peristiwa banjir yang menerjang Kota Sumbawa Besar pada Maret 2017. Di mana seluruh jenis bantuan yang didistribusikan kepada korban, pendanaannya bersumber dari koin-koin yang dikumpulkan. Mengapa koin-koin di Sumbawa dapat terkumpul hingga mencapai jumlah yang cukup besar ? Pertama, uang koin di Sumbawa oleh sebagian masyarakat dirasakan kurang bernilai. Sehingga mereka sedikit mengabaikan keberadaan uang koin. Uang koin di Sumbawa bisa dengan mudah kita temukan di rumah-rumah masyarakat. Biasanya tergeletak di atas lemari TV, di atas kulkas, di meja makan, di lantai, di halaman rumah warga, bahkan di jalanan.

“Di beberapa tempat itu masih banyak, terutama di desa-desa tidak dipakai dengan baik. Itu beberapa kasus di beberapa tempat kita temukan. Justru mereka ini kan, apa koin-koin ini kan biasanya *pang bawa dipan ne*, di bawah kolong, kasur, kemudian di tong-tong sampah. Dan beberapa tempat kita sering, salah satu relawan yang sering jalan. Di dalam tasnya kan ada celengan. Dia punya tugas ngantar jemput salah satu siswa yang kita tangani. Salah satu siswa fakir miskin yang kita tangani dan kita beasiswa, dia punya tugas untuk antar jemput. Nah, kita sering temukan di jalan banyak koin. Kadang-kadang di trotoar, kadang-kadang di...banyak kita temukan. Kerjanya dia sudah memungut itu. Salah satu kerjanya kenapa sering dibawa, karena sering kita temukan itu. Karena sebetulnya kita kan membangun kesadaran di sini. Kita membangun kesadaran. “(Kutipan wawancara bersama Aik, pendiri Coin Foundation Sumbawa)

Kedua, pendiri Coin Foundation Sumbawa merasa prihatin dengan hadirnya “warung-warung” di Sumbawa. Di mana pada akhir transaksi seringkali uang sisa belanja dalam bentuk koin, diharap untuk didonasikan ke manajemen “warung-warung” tersebut. Dua fenomena di atas kian memperkuat tekad sang pendiri, agar Coin Foundation Sumbawa digerakkan secara massif.

“Jadi kembali ke fakta tentang pengabaian koin, itu kita saya lakukan pengamatan di “warung” terutama. Salah satu kenapa Coin Foundation berdiri juga karena isu koin yang digalang oleh “warung” donasi koin. Eee menurut informasi cuma saya belum dalam sepenuhnya. Itu kan di NTB itu mereka bisa mendapatkan sampai 700 juta per tahun, di NTB dari koin. Kita sendiri tidak tahu seperti apa manajemen mereka, arahnya ke mana. Meskipun memang kita belum riset sejauh itu. Cuma kan kita mengamati ini menjadi resah teman-teman di Sumbawa. Nah kemudian karena isu itu akhirnya saya amati di beberapa “warung”. Pada masa-masa awal, fase-fase awal mereka ketika minta donasi masih bertanya. Pak kembaliannya mau didonasikan? karena masyarakat Sumbawa yang abai dengan koin itu oke-oke saja, klik. Kemudian setelah sekian bulan, “warung” ini dan konsumen sudah merasa terbiasa dengan permintaan donasi, kalimat kedua yang diucapkan sudah bukan mau didonasikan nggak? Pak kembaliannya silahkan...klik karena sudah terbiasa. Dan itu dengan angka, memang dalam satu konsumen tidak dengan angka luar biasa. Ya 300 ya 500. Nah, ini kalau dikali banyak ketemu dengan nominal yang banyak juga.”

(Kutipan wawancara bersama Aik, pendiri Coin Foundation Sumbawa)

Kutipan wawancara di atas menjelaskan tentang pemicu Coin Foundation Sumbawa didirikan. Setelah peristiwa banjir tersebut, Coin Foundation Sumbawa tetap konsisten di dalam melanjutkan aktivitas pengumpulan koin. Secara teknis mereka menitipkan celengan kepada para penyantun dan donator. Setiap bulan para relawan yang tergabung dalam Coin Foundation Sumbawa kembali mengumpulkan celengan yang telah diisi koin. Setelah mencapai jumlah yang cukup untuk disalurkan, maka koin tadi langsung didistribusikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Dalam perkembangannya Coin Foundation Sumbawa tidak hanya menerima koin, tetapi barang dalam bentuk sembako ikut dikumpulkan dan didistribusikan. Dalam usia yang relatif muda, Coin Foundation Sumbawa telah menjadi gerakan baru. Gerakan yang memberikan kebermanfaatn kepada masyarakat luas. Secara ringkas ingin kami gambarkan, bahwa ada tiga pihak yang terlibat secara langsung di dalam gerakan ini. Pihak pertama Coin Foundation Sumbawa, kedua para penyantun dan donator, ketiga adalah masyarakat sasaran yang membutuhkan. Ada koin dan barang yang mengalir pada ketiga pihak tersebut. Di mana uang dan barang bersumber dari para penyantun dan donator. Lalu diamankan kepada Coin Foundation Sumbawa, untuk didistribusikan kepada sesama yang membutuhkan. Mengamati geliat yang terjadi dari aliran koin dan barang dalam tiga pihak yang terlibat secara langsung tersebut. Guna menjaga keberlanjutannya, kami penulis merasa tertarik untuk melihat lebih dalam lagi tentang pengelolaan keuangan dilakukan oleh Coin foundation Sumbawa. Sehingga di dalam tulisan ini kami memfokuskan pada sebuah rumusan masalah. Dengan pertanyaan sebagai berikut : bagaimana transparansi dan akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh Coin Foundation Sumbawa ?

## 2. METODE

Dalam tulisan ini kami menggunakan desain penelitian kualitatif. Di mana kami secara langsung terjun ke lapangan. Menemui pendiri Coin Foundation Sumbawa dan beberapa relawan yang tergabung di dalamnya. Metode ini kami pilih dengan maksud agar kami dapat menggali secara lebih mendalam dan lebih real tentang pokok permasalahan yang telah kami ajukan pada bagian lain di dalam tulisan ini. Myers (2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dirancang untuk membantu memahami orang dan apa yang mereka perkatakan dan lakukan, sehingga dapat memahami konteks sosial dan budaya dengan lebih mendalam dimana orang tersebut hidup.

Data kami kumpulkan melalui wawancara kepada informan, melakukan studi literatur dengan mempelajari berbagai tulisan yang terkait dengan tulisan kami. Selain itu kami juga melakukan pengamatan sebagian aktivitas yang dilakukan oleh informan di lapangan. Terakhir kami melakukan triangulasi guna mengkonfirmasi seluruh teknik pengumpulan data, informan yang terlibat, serta intensitas waktu dalam kami mengumpulkan data. Informan terdiri dari pendiri Coin Foundation Sumbawa sendiri dan relawan yang berhasil kami temui di lapangan.

Untuk analisa data kami menggunakan analisa data kualitatif. Moleong (2007) menjelaskan bahwa analisa data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam ranah penelitian kualitatif tidak lain ialah peneliti itu sendiri (*human instrument*). Lincoln dan Guba (1985) menyampaikan

bahwa manusia sebagai instrumen dalam pengumpulan data memberikan keuntungan, karena bersifat fleksibel dan adaptif, serta dapat menggunakan inderanya dalam memahami sesuatu.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kami memulai wawancara dengan menggali kilasan sejarah terbentuknya Coin Foundation Sumbawa. Setiap organisasi jenis apa pun, sebelum didirikan sudah pasti memiliki alasan dan latar belakang yang memicunya. Latar belakang merupakan titik tolak terpenting bagi organisasi untuk memastikan arah dan tujuan yang hendak dicapai.

**Interviewer** : “Eee...Ik..ade pertama mungkin..(yang pertama mungkin) ..ee bagaimana awalnya ini terbentuk ?”

**Informan** : “Awal Coin Foundation Sumbawa terbentuk itu ketika banjir bandang 2016 kemarin.”

**Interviewer** : “Tahun lalu ya ?”

**Informan** : “Ya,..(terlihat mengingat-ingat sesuatu). Tahun ini sekitar bulan..,”

**Interviewer** : “Lupa saya..”

**Informan** : “Maret kemarin. Nah, saat itu saya kan berposisi sebagai relawan *freelance* saat banjir, saya tidak membawa nama lembaga mana pun. Karena saya sendiri sebagai korban dan merasakan sekali bagaimana rasanya menjadi korban banjir itu. Karena tahun 2006 di sini juga korban banjir. Nah, jadi berangkat dari kondisi korban banjir yang tidak tertangani dengan baik saat itu. Terutama urusan ransum, urusan obat-obatan, akhirnya saya banyak bergerak, saya bergerak sendiri. Saya datang ke BPBD, saya datang ke lembaga mana pun. Bahkan saya membuka informasi tentang banjir di sini lewat media sosial. Itu direspon oleh banyak orang tetapi tidak mengirim dalam bentuk uang, langsung barang dikirimkan. Nah, akhirnya saya pun waktu itu mengajak kawan-kawan korban banjir di sini untuk menjadi relawan...untuk jadi relawan...itu awalnya. Nah saat itu rumah juga *kam yam anung ne (sudah seperti..)* rumah sudah kayak, kayak, kayak kantor BPBD sudah. Kayak kantor BPBD di sini.

**Interviewer** : “Hahahaha.....”

(Kutipan wawancara bersama Aik, pendiri Coin Foundation Sumbawa)

Menyimak kutipan wawancara di atas, bahwa Coin Foundation Sumbawa diprakarsai oleh seorang yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Dapat dibayangkan sebagai korban banjir, tetapi masih berfikir untuk menjadi relawan guna membantu korban banjir lainnya yang terdampak pada saat itu. Dapat kita sepakati bahwa Cin Foundation Sumbawa merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial. Organisasi sosial adalah sebuah organisasi yang memahami permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*) untuk melakukan perubahan sosial (*sosial change*), terutama meliputi bidang kesejahteraan, pendidikan,

lingkungan, dan kesehatan (Kusumasari, B., Setianto, W.A., Suyatna, H., Susanto, E., Yunik, P., 2015). Betapa Coin Foundation Sumbawa ini terbentuk oleh suasana yang memprihatinkan. Dalam kondisi psikologis yang terkejut. Dikepung banjir, di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan. Semangat solidaritas antar sesama mempertemukan banyak orang dan aktivis dari kalangan mana pun. Pertemuan-pertemuan itu memunculkan ide dan kesepakatan baru.

**Informan** : “Banyak bantuan yang datang, termasuk dari LMI masuk ke sini. Diantar oleh teman-teman.....kawan-kawan jaringan, komunitas-komunitas masuk ke sini. ....

Dari baju bekas, kemudian semualah kayak indomie, telur, sembako, obat-obatan, itu masuk. Nah, sehingga paada waktu itu hari terakhir saya menjadi relawan karena sudah tertangani kan, sudah tertangani. Bantuan juga sudah habis saya drop, distribusikan. Akhirnya waktu itu datanglah relawan dari Coin Foundation, relawan dari Coin Foundation dia mengantarkan bantuan.”

**Interviewer** : “Memang ada pusatnya Coin Foundation ?”

**Informan** : “Ya, ada Coin foundation Mataram, kan. Jadi pendiriya ini kan orang Bali yang berdomisili di Mataram.

**Interviewer** : “Jadi pusatnya di Mataram ? bukan di Jakarta ? “

**Informan** : “Bukan, yang menginisiasi ini justru orang-orang NTB.

**Interviewer** : “Mmmm...Ya ya ya “

**Informan** : “Secara kebetulan waktu itu saya sendiri sebagai alumni PMII kan waktu itu. jadi si relawan ini juga ternyata alumni PMII...”

**Interviewer** : “Ketemu sudah di situ ya”

**Informan** : “Ketemu di situ. Jadi dia menggandeng kader-kader aktif PMII, kemudian nyari titik-titik banjir yang belum tertangani dengan baik. Sehingga dibawalah ke sini, menunjukkan bahwa ada satu senior yang jadi korban banjir sekaligus relawan,,hehehehe”

**Interviewer** : “Ya ya ya”

**Informan** : “Akhirnya dibawa ke sini, sehingga waktu itu rumah kita jadikan *basecamp*.... kiita jadikan *basecamp*. Awalnya relawan itu, buat dirikan tenda itu di situ, di RT 3 di belakang ini karena lokasi terparah kan di situ. Cuman untuk mempermudah makan minum, istirahatnya relawan itu kita jadikan rumah sebagai *basecamp*. Nah, dari situlah bantuan ini kan datang terus,,datang terus. Kita buat lagi, atur ulang. Yang sudah saya katakan tuntas saya tangani sebagai relawan freelance, yang sudah distop, sudah kondisi oke, sudah beres, kita buat perencanaan ulang lagi karena bantuan ini masuk.”

**Interviewer** : “Berarti sampai juga ke Moyo utara segala ?”

**Informan** : “ Moyo Utara masuk, masuk distribusi. Bahkan sebelum dia ke sini, relawan itu ke sini, duluan ke sana. Kan

mereka sudah keliling dulu survey, yang belum tertangani itu justru dalam pandangan mereka Brang Bara yang belum tertangani. Nah, akhirnya waktu itu karena banyaknya bantuan, saya diajak hitung sama-sama. Yang saya hitung itu waktu itu yang masuk ke RW ini, itu ada tujuh puluhan juta nilainya. Secara nominal cuman dalam bentuk barang kan. Nah saya tanya, ini datangnya dari mana kok bisa sebanyak ini ? Akhirnya dijelaskan oleh dia. Oleh I Gusti Abdul Aziz namanya. I Gusti Abdul Aziz dijelaskan bahwa....”

**Interviewer** : “Dia pimpinan di Mataram, bukan ?”

**Informan** : “Dia memang pimpinannya, dia Direktur Utama nya kan. Akhirnya dia jelaskan bahwa semuanya ini dari koin yang digalang. 80% bantuan yang datang itu dari koin yang digalang, sementara 20% dari bantuan lembaga-lembaga lain yang dititipkan lewat Coin Foundation. Awalnya kita kan nggak percaya, akhirnya saya diajak berhitung. Diajak berhitung manual pakai kalkulator, gaya bodoh kita berhitung. Coba kamu hitung katanya, coba ente itung satu juta koin berarti satu juta keping koin. Kalau satu keping itu nilainya seratus rupiah, berarti satu utu dikali dengan seratus rupiah. Maka ketemu dengan angka berapa di situ, pertanyaannya dia. Seratus juta. Artinya kalau dengan eksistensi Coin Foundation di sana menurut dia waktu itu yang sudah jalan tiga tahun. Kalau hanya mengejar seratus juta itu sangat gampang. Ya gak tau ya, faktanya betul nggak dia sudah bisa sampai seratus juta per bulan itu. Nah sehingga dari sini saya terinspirasi. Ini kalau didirikan di Sumbawa ini, sangat menarik ini. Karena memang di Sumbawa bukan hanya banjir kan. Karena memang faktanya bahwa Coin Foundation berdiri itu karena dua fakta. Pertama banyaknya koin yang beredar di Sumbawa yang tidak dipakai untuk bertransaksi oleh masyarakat konsumen. Yang kedua, fakta kedua masih banyak kasus yang belum tertangani dengan baik. Persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan ekonomi, dan lain sebagainya.”

(Kutipan wawancara bersama Aik, pendiri Coin Foundation Sumbawa)

Mulai dari orang terdekat, tetangga, sahabat, teman, bergabung bergerak bersama untuk mengatasi kondisi yang terjadi saat itu, mereka yang bergerak hanya yang terpanggil jiwanya untuk melakukannya. Inilah yang disebut dengan modal sosial. Modal sosial adalah hasil dari hubungan antar individu yang memfasilitasi satu tindakan bersama. Modal sosial merupakan modal sama halnya dengan pengetahuan yang bersifat intangible, yang akan berkembang dan lebih produktif apabila digunakan terus-menerus (Nasution, A., Rustiadi, E., Juanda, B., Hadi, Setia., 2014).

Kerja sosial ini dilakukan untuk masyarakat-masyarakat sasaran. Masyarakat sasaran tersebut diidentifikasi sendiri oleh Coin Foundation Sumbawa. Dengan berbagai pola dan metode yang didasarkan kesepakatan di internal mereka sendiri. Masyarakat

sasaran yang dianggap layak untuk mendapat bantuan akan diprioritaskan. Hingga saat ini relawan berjumlah 20 orang yang tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa.

**Interviewer** : “Ini se kabupaten kan Ik ya, kalau ngurus kayak begini kan butuh banyak tim , butuh banyak personil. Sejauh ini sudah berapa teman-teman yang ikut bergabung dan menjadi relawan ke sana ke mari. ?”

**Informan** : “Jadi yang gabung ke tim Cabang itu sudah 20 orang.”

**Interviewer** : “ Oke, berarti kita masuk ke ini dah sekarang...sasaran berarti ya. Setelah itu dikumpulkan, berarti target kita...pertama tadi disabilitas. Terus apakah harus muslim gitu ?”

**Informan** : “Oh nggak, nggak harus muslim. Cuma memang secara ini belum, kita belum menangani yang non muslim. Karena belum ada laporan. Karena kami bekerja berdasarkan laporan atau temuan kita di lapangan. Kan itu.”

**Interviewer** : “Disabilitas, terus apa lagi ?”

**Informan** : “Fakir miskin, anak yatim. Fakir miskin ini termasuk janda.”

**Interviewer** : “ Itu memang target sasaran Coin Foundation ya.”

**Informan** : “Karena kita kan punya tahapan yang harus dicapai. Di tahap-tahap awal seperti ini kita bisa menuntaskan. Target kita dalam 3 tahun kita sudah bisa menangani dan menuntaskan, anak yatim sudah sekolah semua. Karena Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu belum bisa menjawab persoalan. Bukan hanya jumlah yang terbatas, tapi juga kapan itu keluar, cair itu menjadi persoalan. Sementara siswa ini mereka butuh dana stimulan begitu masuk sekolah. Mereka juga butuh sepatu, seragam, semua. Sehingga kemarin itu yang menyebabkan kenapa kita sampai dalam usia 2 bulan Coin Foundation itu kita sudah berani menyekolahkan 9 anak.”

**Interviewer** : “ Untuk wilayah Sumbawa aja, atau lingkup yang lebih luas ?”

**Informan** : “Se kabupaten.”

**Interviewer** : “9 itu se kabupaten ?”

**Informan** : “9 itu kita jaring se kabupaten. Cuma berdasarkan laporan dan yang bisa kita deteksi. Terutama kembali nke kemampuan finansial lembaga sendiri. “

**Interviewer** : “Bicara kemampuan finansial, mereka masuk sekolah apakah biaya awal saja atau seterusnya ditanggung oleh Coin Foundation ?”

**Informan** : “Kalau seperti dari 9 anak ini, ada 5 yang harus kita tangani samapai selesai. Yang 4 mereka butuh hanya stimulant. Paling-paling nanti di pertengahan semester, atau

di tahun ajaran baru mereka ada tambahan biaya kita akan pantau terus, kita akan selalu mendampingi siswanya. Dari situ kita bisa mendeteksi kebutuhan mereka selama sekolah. Seperti 2 anak yang kita sekolahkan di pondok pesanteren Tahfiz Qur'an di Bengkel. Itu kita setiap bulan selalu ngirim ke pengasuhnya, pengelola podok. Untuk biaya makan, untuk transportasi dari pondok ke sekolah formal, dan lain sebagainya, aktivitas ekstra kurikuler, itu kita biyai. Saya ngirim paling rendah 1 juta per bulan. “

**Interviewer** : “ Nah kemudian skala prioritas Ik. Tadi kan 9 anak, yang 5 ditanggung sampai selesai, 4 nggak ?”

**Informan** : “Yang 4 tetap ditanggung samapai selesai sebetulnya. Cuma sementara waktu ini, 4 anak ini, belum ada keluhan. Jadi kami tidak memberikan sesuatu jika mereka nggak butuh. Karena kami juga pertama dana kami masih sangat kecil hasil galangan. Kedua adalah mereka tidak bisa kami manjakan. Paling kamin hanya bis memberikan kebutuhan dasar mereka untuk saat ini. Yang 4 ini masih punya keluarga. Kami hanya memberikan stimulan seperti sepatu, seragam, alat tulis, sampai mendampingi mereka daftar sekolah. Itu kami lakukan. Gak taulah besok. Nanti juga pihak sekolah, kalau ada persoalan akan menghubungi Coin Foundatio Sumbawa. ”

(Kutipan wawancara bersama Aik, pendiri Coin Foundation Sumbawa)

Ada hal menarik yang kami dapatkan dalam proses wawancara dengan informan di Coin Foundation Sumbawa. Mereka tidak mengambil satu rupiah pun dari koin yang terkumpul untuk operasional sehari-hari. Insentif, gaji, dan imbalan lain tidak pernah diharapkan dari seluruh rangkaian aktivitas sosial ini. Dilakukan dengan tulus ikhlas demi membantu sesama. Kami melakukan wawancara ketika beberpa relawan sibuk dengan pembuatan celengan yang akan dibagikan kepada donator.

**Informan** : “Celengan sudah masuk 1 ke Desa Mamak. Kita masuk lewat media sscial. Jadi orang banyak minta celengan lewat sana. Kita juga tidak seperti lembaga-lembaga kebanyakan bahwa hasil penggalangan itu dijadikan sebagai operasional. Teman-teman di sini benar-benar menjadi relawan.”

**Interviewer** : “Ooo...tanpa insentif 1 rupiah pun?”

**Informan** :” Tanpa insentif .”

**Interviewer** : “Luar biasa, masih ada ya jaman sekarang yang begini ya ?”

**Interviewer** : “ Ya Gy? Motivasinya apa Gy ? tanpa insentif kan, tanpa gaji, apalagi tanpa gaji gitu kan. Apalagi gaji.”

**Informan** : “ Banyak hal pak. Selain kita belajar bagaimana melihat masalah sosial, kita juga bisa ada sumbangsih skill kita di sini. Tapi yang paling menarik menurut saya itu sistem



kekeluargaan modelnya. Ini yang membuat teman-teman sampai begitu intens di sini. Bahkan setiap hari kadang-kadang ngumpul.”

**Interviewer** : “Ya luar biasa juga ya tanpa insentif. Saya pikir dari yang terkumpul ada sekian persen lah buat bensin gitu. “

**Informan** : “Pengalaman teman-teman, jadi uang saku yang dikantong mereka itu dipakai jadi operasional.”

**Interviewer** : “Ini kan baru berapa bulan ?”

**Informan** : “5 bulan. “

**Interviewer** : “Dari yang dilakukan seperti itu gitu ya, tanpa insentif, tanpa gaji, kira-kira ada ndak dirasakan kompensasi lain yang dirasakan secara tidak langsung. Wah, ternyata ini manfaatnya gitu lho .”

**Informan** : “ Sangat terasa pak. Contohnya saya, selain hobi nulis saat ini saya mendalami hypnoterapi. Jadi saya dapati teman-teman yang cacat mental. Contohnya kemarin di Semamung ada orang yang cacat mental, kondisi ekonominya kurang baik, kondisi psikologisnya juga sudah nol. Jadi selain saya bisa ini bantu dengan skill apa yang saya punya gitu, saya juga bisa nulis tentang dia. Saya rasa itu sudah jadi manfaat yang bisa kita rasakan. “

**Interviewer** : “Oke, sekarang kita masuk celengan deh. Kok tiba-tiba idenya celengan, bukan yang lain ?”

**Informan** : “Secara ini kembali lagi ke operasional. Kalau kita membuat kotak amal dengan bahan kaca ada berapa uang. *Costnya* cukup tinggi. Sementara dari bahan celengan seperti ini, itu dari bahan yang gratis karena sampah-sampah dari percetakan. Gulungan fineel kta dapat gratis. Kemudian covernya juga. Biaya cetak cover berapa sih. Selama kita buat celengan, koin tidak pernah kita ambil. “

(Kutipan wawancara bersama Egy, relawan Coin Foundation Sumbawa).

Sejak awal berdiri sampai dengan saat ini Coin Foundation Sumbawa berusaha untuk tertib administrasi. Semua pemasukan dan pengeluaran yang terjadi diukukan dengan baik dan rapih. Format pencatatan disusun berdasar inisiatif sendiri. Dengan cermat dan teliti menyusun daftar pecahan koin ke dalam tabel masing-masing. Dari pecahan terkecil hingga pecahan terbesar. Setiap celengan yang terkumpul, satu per satu dihitung jumlahnya. Lalu dimasukkan ke daftar pecahan-pecahan yang sesuai.

**Interviewer** : “Nah jumlah ini Ik. Jumlah donator terdata tidak ?”

**Informan** :”Donatur terdata.”

**Interviewer** : “Sampai berapa sekarang ?”

**Informan** :” Sekarang sudah di angka 500an celengan. “

**Interviewer** ;” Woww....se kabupaten itu ya ?”

**Informan** : “Ya data se kabupaten. Itu yang membuat saya optimis sampai menyekolahkan 9 anak yatim, karena itu angka penyebaran celengan. Karena kalau angka per 10,000 saja per celengan sudah ketemu angka 5.000.000. per bulan. Ini saya punya data yang selalu saya catat. “

**Interviewer** : “ Ada tanggal tutup buku gak Aik tiap bulan ?”

**Informan** : “Ketika akhir bulan kita rekap. Ini data baru saya input karena ini kesalahan format. Ini ada hitungan. Model data kita punya. Misalnya dalam satu celengan kita buat per satuan uangnya. ”

**Interviewer** : “Format dari Mataram ya ? “

**Informan** : “Nggak, inisiatif sendiri. Malah Mataram belajar ke sini. “

(Kutipan wawancara bersama Aik, pendiri Coin Foundation Sumbawa).

Coin Foundation Sumbawa sebagai pemegang amanah masyarakat Sumbawa, merasa berkewajiban untuk menyampaikan seluruh aktivitasnya. Dari proses penggalangan koin sampai ke tahap pendistribusian ke masyarakat sasaran. Dari hasil pengamatan kami, Coin Foundation Sumbawa selalu mendokumentasikan setiap tahapan aktivitas mereka. Dibuat dalam bentuk gambar dan narasi yang menjelaskan rangkaian aktivitas yang telah dilakukan. Termasuk menyampaikan informasi anggaran dana yang digunakan untuk masing-masing aktivitas pendistribusian kepada masyarakat sasaran.

**Interviewer** : “Nah mungkin terakhir Ik. Ada nggak upaya dari Coin Foundation untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau sekedar informasi kepada para donator ? Misalnya uang bapak ibu pada bulan ini terkumpul sekian dan telah kami salurkan ke sini ke sini gitu. ”

**Informan** : : ”Ada, bahkan di bulan tujuh dan Agustus lewat suara NTB. “

**Interviewer** : “ Baru lewat media itu saja ya ?”

**Informan** : ” Kami sedang persiapan menuju ke sana. Pertama ini lembaga baru. Kedua ini lembaga yang dibangun atas dasar kekeluargaan. Jadi untuk dipaksakan untuk menuju professional itu butuh waktu. Kalau sudah menggaji orang, jadi gampang saya perintah orang. Karena di sini tidak ada kompensasi apa-apa, butuh proses, butuh masukan, arahan.”

**Interviewer** : “ Jadi minimal salah satu cara lewat media itu ya ? yang pernah saya amati itu melalui gambar gitu ya. Saya baru lihat yang Karang Lapan”

**Informan** : “Ya, kalau di FB sudah banyak sekali postingan. Berapa kasus yang kita tangani. Buka saja Coin Foundation Sumbawa. Cuma kami belum pernah menyebutkan nominalnya. Instagram juga ada. ”

(Kutipan wawancara bersama Aik, pendiri Coin Foundation Sumbawa).

“Jadi kemarin kita sudah menerbitkan bulletin pak dari Coin Foundation. Di situ sudah tercantum tercantum laporan keuangannya pak, dan siapa siapa saja yang dibantu oleh Coin Foundation. Bulletin itu kami posting secara *on line* dan bisa didownload di link ini <https://tusfiles.net/f0penpjys53k>.” (Kutipan wawancara bersama Ikhsan, relawan Coin Foundation Sumbawa).

“Bentuk pertanggungjawaban dana, Coin Foundation Sumbawa selalu menulis dengan teliti segala pemasukan dengan disaksikan oleh beberapa anggota Coin Foundation Sumbawa. Namun, karena kami dan banyak pihak merasa itu belum cukup pak, dan perlu adanya transparansi dana. Maka akhirnya Coin Foundation Sumbawa menerbitkan buletin yang di dalamnya terdapat catatan keuangan. Termasuk catatan siapa saja penerima bantuan dari donator yang disalurkan oleh Coin Foundation Sumbawa, bisa diakses on line juga pak melalui link <https://tusfiles.net/f0penpjys53k>” (Kutipan wawancara bersama Marsa, relawan Coin Foundation)

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, Coin Foundation Sumbawa telah berbuat nyata bagi masyarakat. Didirikan dalam suasana yang sulit, mengumpulkan teman dan kerabat untuk bergabung, dan meyakinkan relawan untuk bekerja dengan baik. Melakukan penggalangan koin, mendeteksi masyarakat sasaran yang dinilai layak untuk menerima santunan, dan mempertanggungjawabkan seluruh bentuk aktivitas dengan metode yang diinisiasi oleh Coin Foundation Sumbawa sendiri. Mereka yang tergabung di dalam Coin Foundation Sumbawa ini tanpa gaji, insentif, atau imbalan. Bahkan uang saku sendiri digunakan untuk operasional. Di masa seperti sekarang ini, ternyata masih ada manusia-manusia seperti mereka.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari berbagai pembahasan yang kami sampaikan di atas, Coin Foundation Sumbawa memandang penting untuk menyampaikan informasi aktivitas mereka kepada masyarakat luas. Terbukti dengan cermat dan teliti dicatat dan dibukukan. Dirangkum dalam bentuk gambar, data, dan narasi yang menjelaskan tiap-tiap aktivitas. Terakhir Coin Foundation Sumbawa menerbitkan buletin untuk hal tersebut. Coin Foundation Sumbawa belum sepenuhnya menjadi organisasi profesional. Namun jika melihat dari geliatnya, harapan menuju ke arah profesional tidak pernah berhenti diupayakan. Sebagai penerima amanah masyarakat, Coin Foundation Sumbawa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk berkomunikasi secara tidak langsung dengan seluruh pihak. Dengan membuat akun-akun di dunia maya seperti facebook, instagram juga link yang dapat diunduh oleh siapa pun.

Mari kita kembali ke tujuan awal kami mengangkat tulisan ini. Bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas Coin Foundation Sumbawa telah dilakukan dengan baik. Melalui koran Suara NTB, akun facebook, akun instagram, menyusun buletin, serta membuat link khusus. Ini cara yang dipilih dan ditempuh oleh

Coin Foundation Sumbawa. Media cetak dan *online* menjadi pilihan utama mereka untuk mewujudkan pengelolaan keuangan organisasi yang efektif, efisien transparan dan akuntabel. Dengan teknologi internet dapat digunakan fasilitas teknologi yang disediakan untuk membuat laporan keuangan yang lebih memiliki nilai manfaat yang tinggi, misalnya dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan (Almilia, L.S., 2009). Efektivitas dan kepercayaan terhadap teknologi sistem informasi secara signifikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja individual (R. Sari., M.Maria, 2008). Akhirnya kami sebagai penulis berkesimpulan bahwa Coin Foundation Sumbawa memanfaatkan “metanol”(media cetak dan *online*) sebagai sarana penyampaian informasi keuangan bagi para “pendosa”(penyantun donasi sesama). Karena informasi keuangan merupakan sumber pengambilan keputusan bagi mereka untuk masa-masa selanjutnya. Coin Foundation Sumbawa telah berupaya memelihara hubungan baik antar sesama makhluk, khususnya sesama manusia.

Sebagai saran dari kami penulis agar Coin Foundation Sumbawa terus mempertahankan dan meningkatkan aktivitasnya secara kuantitas dan kualitas. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan ke depannya, agar menyesuaikan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yakni merujuk kepada PSAK 45 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan organisasi nirlaba.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, G. H. (2017). Analisis Sumber Dana Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pura Khayangan Tiga Di Desa Pakraman Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *JIMAT*.
- Almilia, L. (2009). Analisa Kualitas Isi Financial and Sustainability Reporting Pada Website Perusahaan Go Publik di Indonesia. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi*.
- Carolina Lita Permatasari, H. Y. (2016). Penerimaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Oleh Pengelola Keuangan Yayasan Pendidikan : Analisis Technology Acceptance Model. *Journal of Economic Education*, 90-98.
- Hakim, R. (2017). Studi Implementatif Nilai Amanah Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Malang : sebuah Ikhtiar Menuju Pengelolaan Zakat Berkemajuan. *SenasPro*.
- Kholmi, M. (2017). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 215-226.
- Kusumasari, B. S. (2015). *Memahami Model Bisnis Organisasi Sosial (Social Entrepreneurship di Indonesia)*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. *Andi. Jakarta*.
- Martadinata, S. (2014). Kekayaan Itu "Tampak" Seperti Bintang. *IMANENSI*, 51-60.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

- Myers, M. (2009). *Qualitative Research in Business and Management*. 1: Andi.
- Nasim, A. R. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. . *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan.*, 550-561.
- Nasution, A. R. (2014). Dampak Modal Sosial Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perdesaan di Indonesia . *MIMBAR*, 137-148.
- Permatasari, C. Y. (2016). Penerimaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Oleh Pengelola Yayasan Pendidikan : Analisis Technology Acceptance Model. *Journal of economic Education*, 90-98.
- Puspitaningtyas, Z. (2012). Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dan Manfaatnya Bagi Investor. *EKUITAS*.
- Rawlins, B. (2008). Measuring The Relationship Between Organizational Transparency and Employee Trust. *Publi Relation Journal*.
- Ridha, M. B. (2012). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Managemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Seminar Nasional Akuntansi*.
- Sari, R. M. (2008). Pengaruh Efektivitas Penggunaan dan Kepercayaan Terhadap Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual Pada Pasar Swalayan di Kota Denpasar. *JIMAT*.

# PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, PENEKANAN ANGGARAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN PADA SUKU DINAS PEMERINTAHAN DI DKI JAKARTA

I Gede Eka Dharma Putra<sup>1)</sup>

Danang Mintoyuwono<sup>2)</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta<sup>1,2)</sup>

## *Abstract*

*The study aims to determine the influence of budgetary participation, budget emphasis and organisation commitment on budgetary slack. Respondents were studied were departement chief, head of subsection, and section chief in departements at west jakarta, south jakarta, north jakarta, central jakarta, and east jakarta . Data collection techniques in this research using primary data by distributing questionnaires to 211 respondents. Technique data processing was performed using SPSS 21 and assisted by using microsoft office 2010. The variables studied consisted of budgetary participation, budget emphasis, organisation commitment and budgetary slack. The analysis used to test this research is multiple linear regression test. Partial results of the study showed absence of budgetary participation significant effect on budgetary slack, the absence of budget emphasis on budgetary slack, and absence of organisation commitment on budgetary slack. From the results of simultaneous studies showed a significant effect between the variables of budgetary participation, budget emphasis, organisation commitment on budgetary slack.*

**Keywords :** *budgetary participation, budget emphasis, organisation commitment and budgetary slack.*

## 1. PENDAHULUAN

Di zaman modern dengan kecanggihan teknologi seperti ini, organisasi berbasis sektor publik tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan organisasi berbasis *profit*. Hal ini dibuktikan dengan pemberitaan baik di media elektronik, cetak, bahkan media sosial yang sangat gencar dengan pemberitaan mengenai organisasi berbasis sektor publik baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai pengguna laporan keuangan pemerintah diantaranya masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pijaman serta pemerintah itu sendiri.

‘Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik’ (Mardiasmo 2009, hlm. 61).

Anggaran sektor publik yang bersifat terbuka terhadap masyarakat luas tidak kalah penting daripada anggaran yang biasanya bersifat tertutup didalam organisasi berbasis *profit*. Dalam penyusunan anggaran, perilaku-prilaku manusia akan timbul seiring dengan berjalannya proses-proses penganggaran baik yang bersifat positif maupun negatif. Menurut Anggraeni (2008) dalam Dewi & Sudana (2013) perilaku positif akan muncul jika karyawan memiliki motivasi tinggi untuk mencapai anggaran tersebut yang berakibat pada penilaian peningkatan kinerja mereka. Sedangkan perilaku

negatif akan muncul ketika karyawan merasa terbebani dengan anggaran yang harus dicapai sehingga berakibat terjadinya senjangan anggaran.

Pada akhir tahun 2015 persoalan mengenai anggaran di DKI Jakarta kembali memanas. Anggota badan anggaran DPRD DKI Jakarta memberikan kritik terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membuat anggaran untuk program senam tahun 2016 di Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan. Anggaran yang diajukan oleh Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan untuk program pembinaan jasmani dan rohani yang memang dianggarkan sebesar Rp. 258 juta. Menurut anggota DPRD, biaya yang dikeluarkan sebesar RP. 258 juta sangatlah memberatkan dan tidak sejalan dengan semangat gurbanur yang menginginkan efisiensi dalam anggaran yang digunakan.

Anggaran yang dibuat oleh atasan dan bawahan seharusnya bisa meminimalisir terjadinya senjangan anggaran. Dalam pembuatan anggaran di instansi pemerintahan, semua pihak baik pemda DKI maupun DPRD DKI terlibat langsung dalam proses penyusunan hingga pengesahannya. Sehingga partisipasi yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini DPRD seharusnya mampu meminimalisir terjadinya senjangan anggaran. Selain itu jika berbicara tentang komitmen organisasi, maka kemauan untuk bekerja di organisasi sektor publik khususnya di DPRD maupun pemda sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya orang-orang yang berebut kursi setiap ada pemilihan anggota DPRD maupun perekrutan sebagai CPNS di SKPD DKI Jakarta. Dengan motivasi tinggi untuk berada di lingkungan kerja sektor publik, maka seharusnya senjangan anggaran dapat dikurangi.

Dalam instansi pemerintah, setiap pihak baik DPRD maupun pemda DKI wajib bekerjasama dalam proses pembuatan anggaran. Sehingga istilah penekanan anggaran seharusnya tidak ada. Hal ini disebabkan atasan atau DPRD tidak berhak untuk memberikan *reward* atau sanksi jika anggaran yang telah disetujui tidak tercapai. Jadi seharusnya senjangan anggaran dalam instansi pemerintah dapat di minimalisir bahkan seharusnya tidak ada.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Apakah Partisipasi Anggaran memiliki pengaruh terhadap Senjangan Anggaran?
- b. Apakah Penekanan Anggaran memiliki pengaruh terhadap Senjangan Anggaran?
- c. Apakah Komitmen Organisasi memiliki pengaruh terhadap Senjangan Anggaran ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Penjelasan tentang anggaran dapat dimulai dari teori sinyal (*signaling theory*) di mana anggaran publik yang telah di publikasikan dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk berinvestasi di suatu daerah atau negara, jika rencana program dalam anggaran yang ditetapkan akan memberikan sinyal positif terhadap para investor. Menurut Fahmi & Hadi (2009, hlm. 83) tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif akan sangat mempengaruhi kondisi suatu objek tertentu, dalam hal ini suatu daerah atau suatu negara.

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Harahap (2012, hlm. 532) teori ini menyebutkan bahwa organisasi adalah tempat bagi hubungan kontrak yang terjadi antara beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Dalam organisasi sektor publik, DPR/DPRD bertindak sebagai prinsipal sementara Pemerintah pusat maupun daerah bertindak sebagai agen. Pemerintah pusat dan daerah terlibat dalam proses penyusunan hingga pelaporan anggaran sedangkan pihak DPR dan DPRD terlibat dalam proses pengesahan dan pengawasan yang aktif dilakukan.

### **Senjangan Anggaran (*Budgetary Slack*)**

Senjangan anggaran adalah praktik yang dilakukan oleh penyusun anggaran dengan sengaja memasukkan jumlah pengeluaran lebih besar dan jumlah pendapatan lebih kecil ke dalam anggaran. Jika jumlah biaya atau pendapatan aktual di realisasikan dan dibandingkan dengan figur yang dianggarkan maka menunjukkan penampilan usaha yang berhasil (Blocher, Stout & Cokins 2011, hlm. 612).

Senjangan anggaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti partisipasi anggaran, penekanan anggaran, komitmen organisasi, kejelasan sasaran anggaran, locus of control, budgetary control, ketidakpastian strategis, informasi asimetri, ketidakpastian lingkungan, *Group Cohesivness* dan lain-lain.

### **Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran**

Partisipasi anggaran merupakan proses dimana satuan kerja baik itu atasan maupun bawahan yang terlibat dan mempunyai pengaruh dalam menentukan target anggaran' (Apriantini dkk, 2014).

Penelitian tentang pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran telah banyak dilakukan diantaranya: Young (1985), Ikhsan & Ane (2007), Triana dkk, (2012), Dewi & Sudana (2013), dan Apriantini dkk, (2014) yang menunjukkan variabel partisipasi anggaran berpengaruh secara signifikan positif terhadap senjangan anggaran. Artinya senjangan anggaran terjadi karena pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran memberikan informasi yang bias dengan cara melaporkan biaya yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih rendah agar target anggaran tercapai.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Senjangan Anggaran.

### **Pengaruh Penekanan Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran**

Menurut Savitri & Sawitri (2014) menyatakan bahwa 'penekanan anggaran merupakan desakan dari atasan pada bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik'. Jadi penekanan anggaran dilakukan oleh atasan terhadap bawahan untuk menjalankan suatu anggaran tersebut dengan baik, sehingga anggaran yang ditetapkan dapat tercapai. Jika anggaran tersebut dapat tercapai, maka bawahan akan diberikan *reward* atau kompensasi namun jika target anggaran tidak terpenuhi maka bawahan akan diberikan sebuah sanksi. Penelitian tentang hubungan antara penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran telah banyak dilakukan diantaranya: Triana dkk, (2012) dan Apriantini dkk, (2014) yang menunjukkan variabel penekanan anggaran berpengaruh secara signifikan positif terhadap senjangan anggaran. Artinya semakin



tinggi penekanan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan untuk menjalankan anggaran tersebut dengan baik, maka tingkat kesenjangan anggaran juga semakin besar.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Penekanan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Senjangan Anggaran.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran**

Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotannya dalam organisasi tersebut (Lubis 2010, hlm. 54). Penelitian tentang hubungan antara komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran telah banyak dilakukan diantaranya: Dewi & Sudana (2013), Apriantini dkk, (2014), Dewi & Erawati (2014), dan Mahadewi (2014) yang menunjukkan variabel komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan negatif terhadap senjangan anggaran. Artinya semakin tinggi komitmen organisasi setiap individu, maka tingkat kesenjangan anggaran juga semakin menurun.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap Senjangan Anggaran

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Definisi Dan Pengukuran Variabel**

Senjangan anggaran adalah praktik yang dilakukan oleh penyusun anggaran dengan sengaja memasukkan jumlah pengeluaran lebih besar dan jumlah pendapatan lebih kecil ke dalam anggaran (Blocher et.al 2011, hlm. 612). Variabel senjangan anggaran yang digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Dunk (1993) dalam Triana dkk, (2012).

#### **a. Partisipasi Anggaran (X<sub>1</sub>)**

‘Partisipasi anggaran merupakan proses dimana satuan kerja baik itu atasan maupun bawahan yang terlibat dan mempunyai pengaruh dalam menentukan target anggaran’ (Apriantini dkk, 2014). Variabel partisipasi anggaran yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Milani (1975) dalam penelitian Triana dkk, (2012).

#### **b. Penekanan Anggaran (X<sub>2</sub>)**

‘Penekanan anggaran merupakan desakan dari atasan pada bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik’ (Savitri & Sawitri 2014). Variabel penekanan anggaran yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Hopwood (1972) dalam Triana dkk, (2012).

#### **c. Komitmen organisasi (X<sub>3</sub>)**

‘komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotannya dalam organisasi tersebut’ (Lubis 2010, hlm. 54). Variabel komitmen organisasi yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Cook & Wall (1980).

## Populasi Dan Sampel

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Suku Dinas Pemerintahan di wilayah DKI Jakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkaitan langsung dalam proses penyusunan anggaran seperti kepala suku dinas, kepala sub bagian, kepala seksi, sehingga sesuai dengan teknik *purposive sampling* dimana mengharuskan seorang ahli sebagai sampel yang benar-benar menguasai suatu masalah yang akan di teliti.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jumlah kuesioner yang disebar	211	100%
Jumlah kuesioner yang kembali	139	66%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	72	34%
Jumlah kuesioner tidak dapat diolah	36	17%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	103	49%

Dari data di atas jumlah kuisisioner yang berhasil disebar sebanyak 211 kuisisioner. Sementara itu kuisisioner yang kembali sebanyak 139 kuisisioner yang berarti 72 kuisisioner tidak kembali dikarenakan beberapa alasan seperti kuisisioner hilang dan salah responden. Sedangkan kuisisioner yang dapat diolah untuk digunakan dalam penelitian ini berjumlah 103 kuisisioner.

## Uji Kualitas Data

Tabel 2. Statistik Deskriptif  
*Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Senjangan Anggaran	103	13	30	20,63	3,378
Partisipasi Anggaran	103	16	30	23,83	3,142
Penekanan Anggaran	103	20	40	33,42	3,996
Komitmen Organisasi	103	25	45	37,37	4,111
<i>Valid N (listwise)</i>	103				

Sumber: Data diolah dari SPSS 21

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa N sebesar 103 artinya jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 103 responden.

Tabel 2 menunjukkan nilai minimum Senjangan Anggaran sebesar 13, nilai maksimum sebesar 30, dan nilai mean (rata-rata) sebesar 20,63 yang apabila dibagi dengan 6 butir pernyataan diperoleh nilai sebesar 3,44 yang dibulatkan menjadi 3, maka dapat diperoleh rata-rata jawaban responden adalah pada skala 3 (cukup benar). Dapat disimpulkan bahwa rata-rata jawaban responden tentang senjangan anggaran adalah 3 atau cukup benar artinya senjangan anggaran terjadi.

Pada variabel Partisipasi Anggaran menunjukkan nilai minimum 16, nilai maksimum sebesar 30, dan nilai mean (rata-rata) sebesar 23,83 yang apabila dibagi dengan 6 butir pernyataan diperoleh nilai sebesar 3,97 yang dibulatkan menjadi 4, maka dapat diperoleh

jawaban responden adalah pada skala 4 (benar). Dapat disimpulkan bahwa responden sudah ikut berpartisipasi dalam pembuatan anggaran dalam suatu organisasi.

Pada variabel Penekanan Anggaran menunjukkan nilai minimum 20, nilai maksimum sebesar 40, dan nilai mean (rata-rata) sebesar 33,42 yang apabila dibagi dengan 8 butir pernyataan diperoleh nilai sebesar 4,18 yang dibulatkan menjadi 4, maka dapat diperoleh jawaban responden adalah pada skala 4 (penting). Dapat disimpulkan bahwa penekanan yang ada dalam anggaran tinggi.

Pada variabel Komitmen Organisasi menunjukkan nilai minimum 25, nilai maksimum sebesar 45, dan nilai mean (rata-rata) sebesar 37,37 yang apabila dibagi dengan 9 butir pernyataan diperoleh nilai sebesar 4,15 yang dibulatkan menjadi 4, maka dapat diperoleh jawaban responden adalah pada skala 4 (benar). Dapat disimpulkan bahwa responden memiliki komitmen organisasi yang tinggi.

### Uji Validitas Dan Reliabilitas

Setelah mendapatkan hasil data kuesioner dari responden, maka dilakukan uji validitas, sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Butir Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
<b>Variabel Partisipasi Anggaran <i>per item</i> (X<sub>1</sub>)</b>			
PA1	0,726**	0,000	<i>Valid</i>
PA2	0,779**	0,000	<i>Valid</i>
PA3	0,745**	0,000	<i>Valid</i>
PA4	0,752**	0,000	<i>Valid</i>
PA5	0,752**	0,000	<i>Valid</i>
PA6	0,760**	0,000	<i>Valid</i>
<b>Variabel Penekanan Anggaran <i>per item</i> (X<sub>2</sub>)</b>			
PEA1	0,617**	0,000	<i>Valid</i>
PEA2	0,653**	0,000	<i>Valid</i>
PEA3	0,681**	0,000	<i>Valid</i>
PEA4	0,680**	0,000	<i>Valid</i>
PEA5	0,735**	0,000	<i>Valid</i>
PEA6	0,553**	0,000	<i>Valid</i>
PEA7	0,703**	0,000	<i>Valid</i>
PEA8	0,689**	0,000	<i>Valid</i>
<b>Variabel Komitmen Organisasi <i>per item</i> (X<sub>3</sub>)</b>			
KO1	0,567**	0,000	<i>Valid</i>
KO2	0,723**	0,000	<i>Valid</i>
KO3	0,608**	0,000	<i>Valid</i>
KO4	0,743**	0,000	<i>Valid</i>
KO5	0,733**	0,000	<i>Valid</i>
KO6	0,747**	0,000	<i>Valid</i>
KO7	0,722**	0,000	<i>Valid</i>
KO8	0,730**	0,000	<i>Valid</i>
KO9	0,651**	0,000	<i>Valid</i>
<b>Variabel Senjangan Anggaran <i>per item</i> (Y)</b>			
SA1	0,511**	0,000	<i>Valid</i>
SA2	0,695**	0,000	<i>Valid</i>
SA3	0,574**	0,000	<i>Valid</i>
SA4	0,554**	0,000	<i>Valid</i>
SA5	0,473**	0,000	<i>Valid</i>
SA6	0,684**	0,000	<i>Valid</i>

Berdasarkan tabel 3 diatas, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan terkait variabel partisipasi anggaran, penekanan anggaran, komitmen organisasi serta senjangan anggaran dikatakan valid karena hasil signifikan Sig. (2-tailed) di bawah 0,01.

### Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran jawaban yang diberikan responden adalah konsisten. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach Alpha*. Pengambilan keputusan yang mengatakan reliable berdasarkan nilai *Cronbach Alpha*  $\geq 0,60$ .

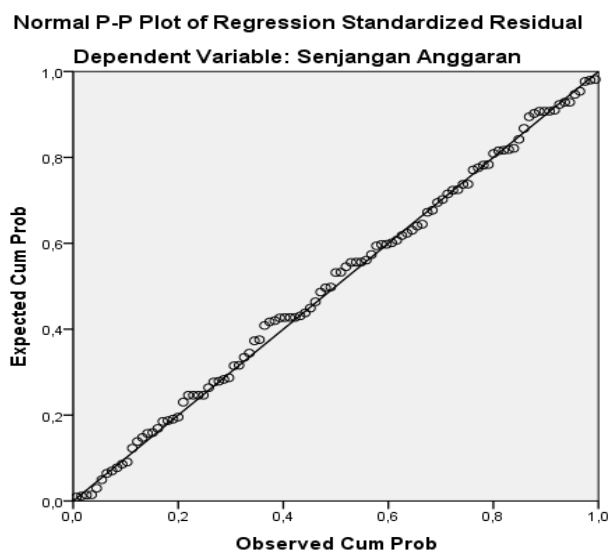
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Senjangan Anggaran	0,605	<i>Reliable</i>
Partisipasi Anggaran	0,844	<i>Reliable</i>
Penekanan Anggaran	0,809	<i>Reliable</i>
Komitmen Organisasi	0,849	<i>Reliable</i>

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa variabel Senjangan Anggaran, Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, dan Komitmen Organisasi memiliki status reliabel. Hal ini dikarenakan nilai *Cronbach Alpha* semua variabel tersebut  $\geq 0,60$ . Kondisi ini juga memberikan arti bahwa seluruh variabel tersebut dapat digunakan pada analisis berikutnya.

### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis P-Plot *Regression Standarized Residual* dan *Kolmogorov Smirnov (K-S)*. Hasil normalitas dengan menggunakan analisis P-Plot *Regression Standarized Residual* ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut :



Gambar 1. Grafik P-Plot

Berdasarkan tampilan grafik Normal P-P Plot diatas, terlihat dari titik–titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran mengikuti arah garis dan terlihat bahwa grafik membentuk garis yang mengarah ke angka 0 (nol) dan berdistribusi secara normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		<i>Unstandardize d Residual</i>
N		103
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3,08467555
	<i>Absolute</i>	,048
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	,026
	<i>Negative</i>	-,048
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		,488
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,971

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

Sumber: Data diolah dari SPSS 21

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hal ini dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai sig atau signifikansi (nilai probabilitas) > 0,05 yaitu (0,971 > 0,05) artinya data berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Multikolonieritas terjadi jika nilai VIF diatas 10 dan *tolerance* dibawah 0,10 maka salah satu variabel harus dikeluarkan dari persamaan. Namun jika VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,10 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih bisa di tolerir.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas  
*Coefficients<sup>a</sup>*

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
<i>(Constant)</i>		
1		
Partisipasi Anggaran	,513	1,950
Penekanan Anggaran	,486	2,059
Komitmen Organisasi	,534	1,873

a. *Dependent Variable: Senjangan Anggaran*

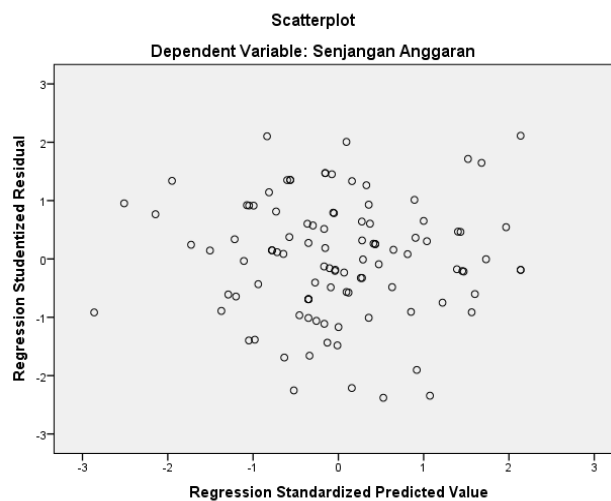
Sumber: Data diolah dari SPSS 21

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* pada seluruh variabel independen lebih dari 0,10 yang berarti tidak terjadi korelasi antar variabel independen dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing–masing

variabel independen lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya masalah atau hubungan multikolinieritas diantara variabel independen dari pernyataan untuk variabel senjangan anggaran, partisipasi anggaran, penekanan anggaran serta komitmen organisasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot.



Gambar 2. Grafik Scatterplot

Berdasarkan grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selain menggunakan grafik scatterplot, pengujian heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan melakukan uji glejser yang dinilai lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan grafik scatterplot.

Tabel 7. Hasil Uji Glejser

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>	
Model	Sig.
1	(Constant) ,152
	Partisipasi Anggaran ,372
	Penekanan Anggaran ,291
	Komitmen Organisasi ,733

a. *Dependent Variable: AbsUt*

Sumber: Data diolah dari SPSS 21

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa variabel partisipasi anggaran memiliki nilai signifikansi 0,372, penekanan anggaran memiliki nilai signifikansi 0,291, dan

komitmen organisasi memiliki nilai signifikansi 0,733. Dari hasil ketiga variabel independen tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, karena nilai signifikansinya diatas  $> 0,05$ .

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, dan Komitmen Organisasi terhadap variabel dependen yaitu Senjangan Anggaran. Berikut ini merupakan hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

<i>Model Summary<sup>b</sup></i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,408 <sup>a</sup>	,166	,141	3,131

a. *Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran*

b. *Dependent Variable: Senjangan Anggaran*

Sumber: Data diolah dari SPSS 21

Berdasarkan tabel 8 hasil uji koefisien determinasi yang digunakan adalah angka *adjusted R<sup>2</sup>* yaitu sebesar 0,141 atau 14,1% yang menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran, penekanan anggaran, dan komitmen organisasi dapat menjelaskan variasi variabel senjangan anggaran sebesar 14,1% sedangkan sisanya adalah 85,9% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti kejelasan sasaran anggaran, *locus of control*, *budgetary control*, ketidakpastian stratejik, informasi asimetri, ketidakpastian lingkungan, *group cohesiveness* dan lain-lain.

### Uji Simultan (Uji F)

Pengujian menyeluruh atau uji F pada dasarnya bertujuan untuk menunjukan apakah seluruh variabel independen (Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasi) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Senjangan Anggaran).

Tabel 9. Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	193,428	3	64,476	6,577	,000 <sup>b</sup>
1 <i>Residual</i>	970,553	99	9,804		
<i>Total</i>	1163,981	102			

a. *Dependent Variable: Senjangan Anggaran*

b. *Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi, Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran*

Sumber: Data diolah dari SPSS 21

Berdasarkan tabel 9, dapat membandingkan nilai F hitung sebesar  $6,577 > F$  tabel (2,70) dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukan bahwa Partisipasi Anggaran, Penekanan

Anggaran, dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Senjangan Anggaran.

### Uji t (Uji Parsial)

Pengujian statistik t ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, dan Komitmen Organisasi) secara individual atau parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Senjangan Anggaran). Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Berikut adalah hasil pengujian secara parsial (Uji t):

Tabel 10. Hasil Uji t  
*Coefficients<sup>a</sup>*

	Model	T	Sig.
	<i>(Constant)</i>	2,531	,013
1	Partisipasi Anggaran	1,708	,091
	Penekanan Anggaran	,156	,877
	Komitmen Organisasi	1,746	,084

a. *Dependent Variable:* Senjangan Anggaran

Sumber: Data diolah dari SPSS 21

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa variabel partisipasi anggaran mempunyai t hitung sebesar  $1,708 < 1,98422$  dengan signifikansi  $0,091 > 0,05$ , hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran.

Variabel penekanan anggaran mempunyai t hitung sebesar  $0,156 < 1,98422$  dengan signifikansi  $0,877 > 0,05$ , hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penekanan anggaran tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran.

Variabel komitmen organisasi mempunyai t hitung sebesar  $1,746 < 1,98422$  dengan signifikansi  $0,084 > 0,05$ , hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran.

### Model Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis uji regresi berganda dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, dan Komitmen Organisasi terhadap variabel dependen yaitu Senjangan Anggaran.

Tabel 11. Hasil Regresi Linier Berganda  
*Coefficients<sup>a</sup>*

	Model	<i>Coefficients<sup>a</sup></i>			t	Sig.
		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
		B	<i>Std. Error</i>	Beta		
	<i>(Constant)</i>	7,710	3,046		2,531	,013
1	Partisipasi Anggaran	,235	,138	,219	1,708	,091
	Penekanan Anggaran	,017	,111	,021	,156	,877
	Komitmen Organisasi	,180	,103	,219	1,746	,084

a. *Dependent Variable:* Senjangan Anggaran

Sumber: Data diolah dari SPSS 21



Dari hasil analisis maka dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut:

$$SA = 7,710 + 0,235 PA + 0,017 PEA + 0,180 KO$$

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran**

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran. Artinya pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran tidak memberikan informasi bias yang biasa dilakukan dengan meninggikan biaya dan merendahkan pendapatan, sehingga senjangan anggaran yang dapat merugikan suatu instansi tidak terjadi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfebriano (2013) dan Amiruddin & Auzair (2014) yang menunjukkan partisipasi anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya partisipasi anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap senjangan anggaran.

### **Pengaruh Penekanan Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran**

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa variabel penekanan anggaran secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran. Artinya penekanan di dalam anggaran yang dialami oleh penyusun anggaran tidak membuat pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran merasa terbebani dengan target anggaran yang ditetapkan. Sehingga praktik senjangan anggaran yang dapat merugikan suatu instansi tidak terjadi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfebriano (2013) dan Amiruddin & Auzair (2014) yang menunjukkan penekanan anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya penekanan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap senjangan anggaran.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran**

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran. Artinya komitmen organisasi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran tidak dapat mempengaruhi senjangan anggaran, hal ini bisa disebabkan karena masih banyaknya faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang mampu mempengaruhi senjangan anggaran seperti informasi asimetri, ketidakpastian lingkungan, kejelasan sasaran anggaran dan lain-lain. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfebriano (2013) yang menunjukkan komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap senjangan anggaran.

## **Keterbatasan Penelitian**

Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini umumnya pada saat penyebaran kuisioner, diantaranya waktu yang terbatas dalam proses penyebaran kuisioner, masih minimnya kepedulian calon responden terhadap dunia pendidikan

seperti pengisian kuisioner dan sulitnya untuk mengetahui kejujuran responden dalam menjawab setiap pernyataan-pernyataan yang ada didalam kuisioner.

## 5. SIMPULAN

- a. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh angka adjusted  $R^2$  yaitu sebesar 0,141 atau 14,1% yang menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran, penekanan anggaran, dan komitmen organisasi dapat menjelaskan variasi variabel senjangan anggaran sebesar 14,1% sedangkan sisanya adalah 85,9% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti kejelasan sasaran anggaran, *locus of control*, *budgetary control*, ketidakpastian stratejik, informasi asimetri, ketidakpastian lingkungan, *group cohesiveness* dan lain-lain.
- b. Secara simultan variabel partisipasi anggaran, penekanan anggaran, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. Jadi partisipasi dalam penyusunan anggaran, adanya penekanan dari atasan terhadap bawahan serta tingkat komitmen organisasi yang dimiliki responden akan meningkatkan senjangan anggaran.
- c. Secara parsial variabel partisipasi anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran, artinya tinggi atau rendahnya partisipasi anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap naik atau turunnya senjangan anggaran atau tidak mempengaruhi senjangan anggaran.
- d. Secara parsial variabel penekanan anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran, artinya tinggi atau rendahnya penekanan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap naik atau turunnya senjangan anggaran atau tidak mempengaruhi senjangan anggaran.
- e. Secara parsial variabel komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran, artinya tinggi atau rendahnya komitmen organisasi setiap individu tidak memiliki pengaruh terhadap naik atau turunnya senjangan anggaran atau tidak mempengaruhi senjangan anggaran.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang diperoleh saat penyebaran kuisioner, dapat diajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak legislatif harus turut aktif dalam proses penyusunan anggaran dan pengawasan anggaran. Sehingga praktik senjangan anggaran yang dapat membuat kerugian negara dapat di minimalisir.
- b. Penilaian kinerja sebaiknya tidak hanya dinilai melalui pencapaian target anggaran saja, sehingga pihak penyusun anggaran tidak merasa terbebani dengan target anggaran yang dibuat.
- c. Kordinasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran harus ditingkatkan, hal ini bertujuan untuk terciptanya anggaran yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Ajibolade, S.O. (2013). *The Influence of Organisational Culture and Budgetary Participation on Propensity to Create Budgetary Slack in Public Sector Organisations*. *British Journal of Arts and Social Sciences*, vol.13, no.1. page. 69-83.
- Alfebriano. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Slack* Anggaran Pada PT. BRI di Kota Jambi. *E-Jurnal Binar Akuntansi*, vol. 2, no. 1, Januari 2013, hlm. 10-18.
- Amiruddin, R., & Auzair, S.M. (2014). *Impact of Organisational Factors on Budgetary Slack*. *E-proceedings of the Conference on Management and Muamalah*, (CoMM 2014), 26-27 May 2014, page. 20-34.
- Apriantini, N.K.E., Adiputra, I.M.P., & Sujana, E. (2014). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel *Moderating*. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 2, no. 1 Tahun 2014.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. edisi ketiga, Yogyakarta: Erlangga.
- Blocher, E.J., Stout, D.E., & Cokins, G. (2011). *Manajemen Biaya Penekanan Strategis*. edisi 5, buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Bulan, R.F. (2011). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap *Job Relevant Information* Serta Implikasinya Pada Senjangan Anggaran. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, vol. 4, no. 1, Januari 2011, hlm. 33-50.
- Carina, J. (2015). DPRD Sentil Dinas Kelautan DKI, Anggaran Olahraga Jumat Pagi Rp. 258 Juta. Diakses 26 Desember 2015. Dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/17/09020951/DPRD.Sentil.Dinas.Kelautan.DKI.Anggaran.Olahraga.Jumat.Pagi.Rp.258.Juta>.
- Cook, J., & Wall, T. (1980). *New Work Attitude Measures of Trust, Organizational Commitment and Personal Need Non-Fulfilment*, *Journal of Occupational Psychology*. 1980, 53, Printed in Great Britain, page. 39-52.

- Dewi, N.M.C., & Sudana, I.P. (2013). Pengaruh Penganggaran Partisipatif Pada Senjangan Anggaran Dengan *Budgetary Control* dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol. 5, no. 3, hlm. 707-722.
- Dewi, N.P., & Erawati, N.M.A. (2014). Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Informasi Asimetris, Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasi Pada Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol. 9, no.2, hlm. 467-486.
- Fahmi, I., & Hadi, Y.L. (2009). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Bandung: Alfabeta.
- Garrison, R.H., Norren, E.W., & Brewer, P.C. (2013). *Akuntansi Manajerial*. edisi 14, buku 2, Jakarta: Salemba empat.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, H.S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S.S. (2012). *Teori Akuntansi, Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ikhsan, A., & Ane, L. (2007). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Menggunakan Lima Variabel Pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar 2007, hlm. 1-27.
- Lubis, A.I. (2010). *Akuntansi Keperilakuan*. edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Mahadewi, A.A.S.S. (2014). Pengaruh Partisipasi Penganggaran Pada Senjangan Anggaran Dengan Asimetri Informasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.3, hlm. 458-473.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putranto, Y.A. (2012). Pengaruh Moderasi Informasi Asimetri dan *Group Cohesiveness* Terhadap Hubungan Partisipasi Penganggaran Dengan *Budgetary Slack*. *Jurnal Economia*, Volume 8, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 116-125.
- Rahayu, S., & Rachman, A.A. (2013). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Savitri, E., & Sawitri, E. (2014). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, dan Informasi Asimetri Terhadap Timbulnya Kesenjangan Anggaran. *Jurnal Akuntansi*, vol. 2, no. 2, April 2014, hlm. 210-226.

- Siregar, B., Suropto, B., Hapsore, D., Lo, E.W., Biyanto., & Frasto. (2013). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2012). *SPSS Untuk Paramedis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Triana, M., Yuliusman., & Putra, W.E. (2012). Pengaruh Partisipasi Anggaran, *Budget Emphasis*, dan *Locus of Control* Terhadap *Slack* Anggaran. *e-Jurnal Binar Akuntansi*, vol. 1, no. 1, September 2012, hlm. 51-56.
- Young, S.M. (1985). *Participative Budgeting: The Effects of Risk Aversion and Asymmetric Information on Budgetary Slack*. *Journal of Accounting Research*, vol. 23, no. 2, Januari 2008, page. 829-842.

# PENGARUH DEWAN KOMISARIS, *LEVERAGE*, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)*

Jetmi Ade Cecasmi<sup>1)</sup>  
Samin<sup>2)</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta<sup>1,2)</sup>

## **Abstract**

*The purpose of this study was to examine the influence of Board of Commissioner, Leverage, and Ownership Structure on the Enterprise Risk Management disclosure of banking firm listed in Indonesian Stock Exchange for the period from 2013 to 2015. Sampling technique using purposive sampling (purposive sampling method). The sampel used in this study is a banking company that meets the criteriaas set out in this study to obtain 21 banking. The data obtained derived from the annual report and financial report of the banks publishe. The analysis technique used in this research is multiple linear regression to test the classical assumption first. The result showed that the Board of Commissioner have a significant influence on the Enterprise Risk Management Disclosure. Leverageand Ownership Structure is not significantly effects on Enterprise Risk Management Disclosure.*

**Keywords:** *Enterprise Risk Management Disclosure, Board of Commissioner, Leverage, Ownership Structure*

## **1. PENDAHULUAN**

Risiko merupakan penghambat pencapaian suatu tujuan perusahaan. Setiap risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang tentu tidak bisa dihindari oleh perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menyatakan bahwa risiko yang dihadapi oleh perbankan meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Risiko-risiko tersebut mengindikasikan pentingnya menentukan suatu strategi dalam mengantisipasi risiko demi keberlangsungan dan tercapainya tujuan perusahaan. Penerapan manajemen risiko tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan *good corporate governance*, yaitu prinsip transparansi yang menuntut diterapkannya *Enterprise Risk Management* (Meizaroh & Lucyanda, 2011).

Keberadaan risiko dalam setiap kegiatan usaha, mendorong perusahaan untuk melakukan pengelolaan risiko yang efektif. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerugian yang terjadi pada perusahaan dan investor (Prayoga & Almilia, 2013). Pengungkapan risiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para *stakeholder* untuk pengambilan keputusan dalam menanamkan saham. Pengungkapan risiko juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para *stakeholder*-nya. Melalui pengungkapan risiko, perusahaan dapat memberikan informasi mengenai risiko yang terjadi diperusahaan. Luas pengungkapan manajemen risiko menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan dalam mengelola manajemen risikonya dan membuktikan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder* (Kumalasari, 2014).

Dalam kasus perusahaan Bank BNI dan Bank Syariah Mandiri yang terdapat risiko operasional dimana mengalami kredit fiktif yang menimbulkan kredit macet.

Pada media *Okezone.com* yang diakses pada tanggal 19 Februari 2014 oleh F Anggiawan, perusahaan Bank Syariah Mandiri menyalurkan kredit fiktif sebesar Rp. 102 Milyar kepada 197 debitur fiktif. Akibatnya Bank Syariah Mandiri berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 59 Milyar. Bermula dari pengajuan kredit seorang pengusaha properti bernama Iyan Permana tahun 2011 senilai Rp. 1 Milyar. Namun dalam proses pengajuannya, Iyan dan tiga pegawai Bank Syariah Mandiri melakukan penyimpangan kredit, mereka kemudian membuat nasabah, memanipulasi sejumlah dokumen dan tidak menjalani prosedur perbankan yang seharusnya dalam mengajukan kredit.

Di tahun yang sama, pada media *Liputan6.com* yang diakses pada tanggal 12 September 2014 oleh M Syukur, perusahaan Bank BNI pada tahun 2007 melakukan pencairan sebesar Rp. 17 miliar, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp. 14.445 juta dan tahun 2008 terdapat pencairan sebesar Rp. 23 miliar, yang kemudian menimbulkan kerugian negara lagi sebesar Rp. 22.650 juta. Total kerugian negara mencapai Rp. 37 miliar lebih. Berawal dari PT Barito Riau Jaya yang mengajukan kredit Rp 40 miliar ke BNI 46. Sebagai agunan, Esron melampirkan beberapa surat tanah di Kabupaten Kampar. Tanpa tinjauan di lapangan, pegawai Bank BNI menyetujui kredit. Hasil penyelidikan, sebagian tanah yang diagunkan tidak ada.

Dari kasus Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI tersebut, membuktikan bahwa manajemen risiko perusahaan atau *Enterprise Risk Management (ERM)* merupakan strategi yang dibutuhkan perusahaan untuk mengevaluasi dan mengelola serta membantu menemukan jalan keluar yang tepat dalam setiap risiko yang muncul (Meizaroh & Lucyanda, 2011).

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Namun, terdapat hasil yang tidak konsisten seperti pada hasil penelitian dari Meizaroh & Lucyanda (2011) pada variabel Dewan Komisaris menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* namun berbeda dengan hasil penelitian Jatiningrum & Fauzi (2012) , dan Husaini, dkk (2013) yang menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Hasil penelitian dari Syifa (2013) pada variabel *Leverage* menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* namun berbeda dengan hasil penelitian Onder & Ergin (2012) dan Marhaeni & Yanto (2015) yang menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Hasil penelitian dari Ashuri, Nia, & Asadpour (2014) pada variabel Struktur Kepemilikan menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*, sedangkan hasil penelitian Syifa (2013), dengan Sari (2013) menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal. Pertama, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris, *Leverage*, Struktur Kepemilikan. Sedangkan pada penelitian Meizaroh & Lucyanda (2011) menggunakan variabel Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Keberadaan *Risk Management Committee*, Reputasi Auditor, dan Konsentrasi Kepemilikan. Kedua, penelitian ini menggunakan periode penelitain tahun 2013-2015. Sedangkan pada penelitian Meizaroh & Lucyanda (2011) menggunakan periode penelitian 2009. Ketiga,

penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Sedangkan pada penelitian Meizaroh & Lucyanda (2011) menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan fenomena dan *gap research* tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut “Apakah Dewan Komisaris, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Dalam menjalankan sebuah bisnis, biasanya dapat terjadi sebuah konflik, baik konflik dengan pihak eksternal maupun pihak internal. Konflik kepentingan yang dimungkinkan terjadi karena adanya keadaan asimetri informasi. Pihak *principal* berkepentingan agar perusahaan memiliki risiko seminimal mungkin sedangkan pihak agent berkepentingan untuk mendapatkan penilaian yang baik dari *principal* (Sari, 2013).

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau intersection point bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemerintah (Harahap, 2012).

Menurut Meizaroh & Lucyanda (2011) menyatakan bahwa teori keagenan (*agency theory*) mengusulkan serangkaian mekanisme untuk menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer seperti adanya mekanisme pengawasan internal oleh dewan komisaris dan komite audit, pemegang saham mayoritas, adanya pengendalian internal, serta pengawasan eksternal yang dilakukan auditor atas laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Rusdianto 2013, hlm. 46).

### **Teori Sinyal (*Signalling Theory*)**

Salah satu teori yang melatarbelakangi masalah asimetri informasi adalah *signalling theory*. Ketika digunakan dalam praktek pengungkapan perusahaan, *signalling theory* secara umum menguntungkan bagi perusahaan dalam praktek *corporate governance* yang baik (Andarini & Januarti, 2010).

Menurut Houston & Brigham (2011, hlm. 186) menjelaskan bahwa ‘Sinyal merupakan suatu tindakan yang diambil oleh manajemen suatu perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek perusahaan tersebut’. Dikarenakan pihak manajer lebih mengetahui informasi perusahaan lebih baik dibandingkan dengan investor atau pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban manajemen untuk memberikan sinyal berupa informasi mengenai perusahaan kepada stakeholder (Godfrey 2010, hlm. 376).

Salah satu sinyal perusahaan dalam pelaksanaan *corporate governance* adalah penerapan dan pengungkapan *Enterprise Risk Management* dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini memberikan informasi bahwa perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan perusahaan lain karena telah menerapkan prinsip transparansi (Meizaroh & Lucyanda, 2011).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari pengungkapan *Enterprise Risk Management* memberikan sinyal kepada pemegang saham bahwa



perusahaan tersebut lebih baik karena telah menerapkan manajemen risiko di dalam perusahaannya. mengenai risiko yang terjadi di perusahaan.

$$\text{ERM} = \frac{\text{Jumlah Item yang Diungkapkan}}{\text{Perusahaan}} \\ 108$$

### ***Enterprise Risk Management (ERM)***

*Enterprise Risk Management* berdasarkan *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (2004) yaitu :

Sebuah proses yang dipengaruhi oleh jajaran direktur entitas, manajemen dan personil lain, yang diterapkan dalam penentuan strategi dalam perusahaan, didesain untuk mengidentifikasi kemungkinan – kemungkinan yang potensial yang mungkin mempengaruhi entitas, dan mengelola resiko – resiko dan kecenderungan resiko yang mungkin terjadi, untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian tujuan perusahaan.

Perhitungan item – item menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item ERM yang diungkapkan diberi nilai 1, dan nilai 0 apabila tidak diungkapkan. Setiap item akan dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan indeks ERM masing – masing perusahaan. Informasi mengenai pengungkapan ERM diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan situs perusahaan (Meizaroh & Lucyanda, 2011). Skala yang digunakan adalah skala rasio. Dengan persamaan sebagai berikut:

Rasio ini menggambarkan seberapa besar tingkat item yang telah diungkapkan mengenai penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan. Semakin besar nilai rasio maka semakin baik karena perusahaan telah sadar akan risiko yang akan dihadapi dan semakin transparan informasi yang diberikan mengenai manajemen risiko diperusahaannya.

### **Dewan Komisaris**

Pada Pasal 1 Ayat 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas menyatakan Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Pengukuran terhadap Dewan Komisaris diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris yang dimiliki perusahaan setiap satu tahun. Skala yang digunakan adalah skala rasio. dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang besar menambah peluang untuk saling bertukar informasi dan keahlian guna memberikan pengawasan yang efektif mengenai manajemen risiko perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas *Enterprise Risk Management*. Selain itu, banyaknya jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dapat mendorong perusahaan untuk lebih luas dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan kemudian dewan komisaris dapat mendiskusikannya bersama komite menejemen risiko untuk mencari solusi dalam memitigasi risiko tersebut.

### ***Leverage***

Menurut Kasmir (2011, hlm. 151) menyatakan bahwa '*Leverage* merupakan seberapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya'. Pengukuran terhadap *leverage* diukur dengan membandingkan total hutang

dengan total aset. Skala yang digunakan adalah skala rasio. Dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

Semakin tinggi tingkat *leverage* artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak dapat mampu menutupi utang – utangnya dengan aktiva yang dimilikinya.

### Struktur Kepemilikan

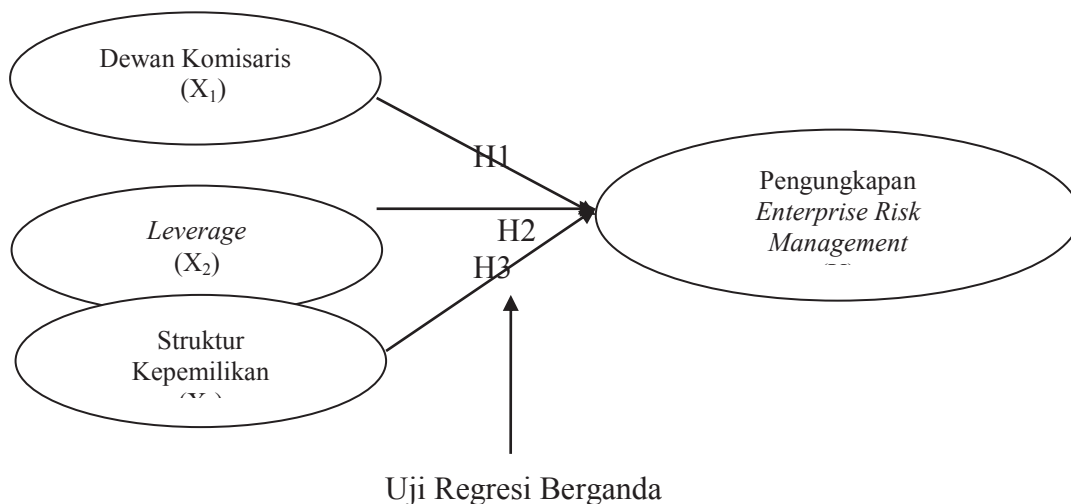
Menurut Ardiansyah & Adnan (2014) menyatakan bahwa ‘Struktur Kepemilikan adalah komposisi kepemilikan saham yang berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal yang bersama – sama dalam memajukan perusahaan. Pengukuran terhadap Struktur Kepemilikan diukur dengan membandingkan jumlah kepemilikan saham terbesar dengan total saham perusahaan dikalikan dengan seratus persen. Skala yang digunakan adalah skala rasio. Dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Konsentrasi Kepemilikan} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Total Saham Perusahaan}} \times 100\%$$

Semakin besar presentase kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin baik artinya perusahaan pada periode tersebut memiliki hak yang besar pula dalam memperoleh informasi dan memegang kendali yang besar atas aktivitas bisnis perusahaan tempat mereka investasi.

### Kerangka Model Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut.



### Hipotesis Penelitian

Dari rumusan masalah dan kerangka model penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Dewan Komisaris, *Leverage*, dan

Struktur Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Populasi dan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai yang dikehendaki oleh peneliti. Adapun kriteria – kriteria yang dipilih dalam penentuan sampel adalah:

- a. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah menerbitkan laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang sudah di audit dari tahun 2013 – 2015.
- b. Perusahaan perbankan yang telah menerapkan manajemen risiko dalam laporan tahunan secara konsisten dari tahun 2013 – 2015.
- c. Perusahaan perbankan yang memiliki kelengkapan data mengenai Dewan Komisaris, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan.
- d. Perusahaan perbankan yang terkonsentrasi kepemilikan sahamnya  $\geq 50\%$  pada tahun 2013 – 2015

#### Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung dari sumber utama (perusahaan), berupa publikasi dalam kurun waktu tiga tahun. Data tersebut berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan (*financial report*) dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 – 2015.

#### Sumber Data

Seluruh data bersumber dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan (*financial report*) perusahaan perbankan periode tahun 2013 – 2015 yang telah dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia (BEI) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website perusahaan terkait.

#### Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, yaitu analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara Dewan Komisaris, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management* maka digunakan metode regresi linier berganda. Untuk mempermudah melakukan perhitungan, penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 21 dan *Microsoft Excel* 2010.

#### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data dilihat dari nilai rata – rata (*mean*), nilai tertinggi (*maksimum*), nilai terendah (*minimum*), dan deviasi standar (Ghozali 2013, hlm. 19).

## Pengujian Hipotesis

### Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

‘Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama – sama terhadap variabel dependen’ (Ghozali 2013, hlm. 98).

### Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual)

‘Uji Statistik t dilakukan untuk menguji seberapa jauh suatu variabel independen berpengaruh atau tidak secara individu terhadap variabel dependen’ (Ghozali 2013, hlm. 98).

### Uji Koefisien Determinan (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Analisis determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen (Dewan Komisaris, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan) dalam menjelaskan Variabel dependen (Pengungkapan *Enterprise Risk Management*) (Ghozali 2013, hlm. 97).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 11. Statistik Deskriptif

	N	<i>Descriptive Statistics</i>		<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
		<i>Minimu m</i>	<i>Maximu m</i>		
Dewan Komisaris	63	3	10	5.19	2.031
<i>Leverage</i>	63	.09934	.94794	.8244434	.16454659
Struktur Kepemilikan	63	.51462	.99999	.7014188	.14630359
<i>Enterprise Risk Management</i>	63	.39815	.83333	.6788654	.09340778
<i>Valid N (listwise)</i>	63				

Sumber: Data diolah dari SPSS 21

Pada tabel 11, menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu *Enterprise Risk Management* (Y) pada sampel Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2015 jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 63 perusahaan dengan nilai maksimum dalam variabel dependen yaitu *Enterprise Risk Management* adalah sebesar 0.8333 atau 83,33% yaitu pada perusahaan Bank Mandiri (Persero), Tbk. (BMRI) pada periode 2014, sedangkan nilai minimum adalah sebesar 0,3981 atau 39,81% yang dimiliki oleh Perusahaan Bank Pan Indonesia Syariah, Tbk. (PNBS) pada periode 2013 Standar deviasi variabel dependen atau *Enterprise Risk Management* adalah sebesar 0,0934 atau 9,34%.

Variabel Dewan Komisaris (X1) pada 63 sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013 sampai dengan 2015 memiliki nilai maksimum pada variabel Dewan Komisaris adalah sebesar 10 pada perusahaan Bank CIMB Niaga, Tbk. (BNGA) pada periode 2014. Nilai minimum pada variabel Dewan Komisaris sebanyak 3 anggota pada perusahaan Bank Pundi Indonesia, Tbk. (BEKS) dan Bank Sinar Mas, Tbk. (BSIM) untuk periode 2013 sampai dengan periode 2015, Sedangkan standar deviasi pada variabel Dewan Komisaris sebesar 2,031.

Variabel *Leverage* (X2) pada 63 sampel perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013 sampai dengan 2015 memiliki nilai maksimum pada variabel *Leverage* adalah sebesar 0,9479 atau 94,79% pada perusahaan

Bank Pundi Indonesia, Tbk. (BEKS) pada periode 2015. Nilai minimum pada variabel *Leverage* sebesar 0,0993 atau 9,93% pada perusahaan Bank Pan Indonesia Syariah, Tbk (PNBS) pada periode 2013. Nilai standar deviasi pada variabel ini adalah sebesar 0,0350 atau 3,5%.

Variabel Struktur Kepemilikan (X3) pada 63 sampel perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013 sampai dengan periode 2015 memiliki nilai maksimum pada variabel Struktur Kepemilikan adalah sebesar 0,9999 atau 99,99% pada perusahaan Bank Pan Indonesia Syariah, Tbk (PNBS) pada periode 2013. Nilai minimum pada variabel Struktur Kepemilikan adalah sebesar 0,5146 atau 51,46% pada perusahaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. pada periode 2013 sampai dengan periode 2015, Sedangkan nilai standar deviasi pada variabel Struktur Kepemilikan adalah sebesar 0,1038 atau 10,38%.

### Uji Normalitas

Tabel 12. Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov*  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Dewan Komisaris	<i>Leverage</i>	Struktur Kepemilikan	<i>Enterprise Risk Management</i>	Unstandardiz ed Residual
<i>N</i>		44	44	44	44	44
<i>Normal Parameters<sup>a</sup> ,<sup>b</sup></i>	<i>Mean</i>	5.57	.861703 6	.6605416	.7148569	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.934	.035092 86	.10389218	.06272246	.05500200
	<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.200	.078	.193	.124
	<i>Positive</i>	.200	.076	.193	.070	.062
	<i>Negative</i>	-.146	-.078	-.099	-.124	-.112
	<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	1.329	.516	1.278	.825	.744
	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.058	.953	.076	.505	.637

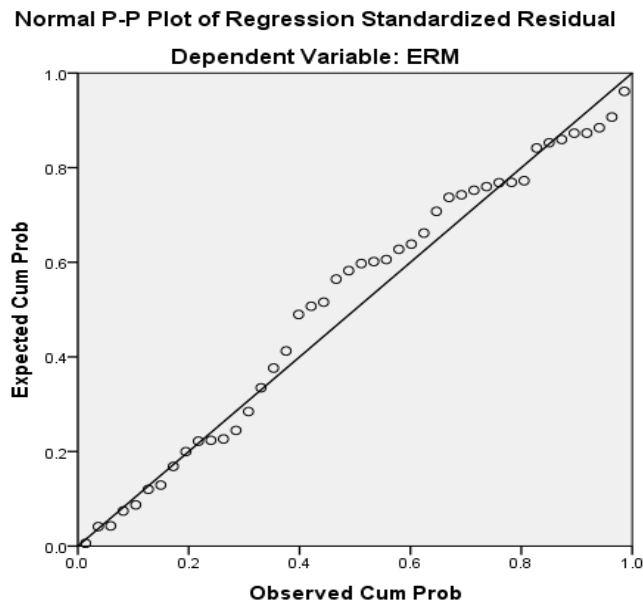
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data yang diolah oleh SPSS 21

Data ini telah melalui tahap *outlier*

Berdasarkan tabel 12 di atas terlihat bahwa seluruh variabel sudah berdistribusi normal yang ditunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0.637 yang lebih besar dari 0,05. Secara parsial seluruh variabel sudah terdistribusi normal yang ditunjukkan nilai signifikansi pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov* Dewan Komisaris sebesar 0,058, *Leverage* sebesar 0,953, Struktur Kepemilikan sebesar 0,76 dan *Enterprise Risk Management* sebesar 0,505 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa nilai sampel telah terdistribusi dengan normal. Namun selain uji Normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov* diatas, uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual juga dapat digunakan dengan *Probability Plot*.



Sumber: Data diolah dari SPSS 21  
 Data ini sudah melalui tahap *outlier*  
 Gambar 3. Normal Probability Plot

Berdasarkan gambar 3 di atas, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sehingga hal ini konsisten dengan analisis menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov* pada pengujian sebelumnya yang menyatakan memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinieritas

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinieritas  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Dewan Komisaris	.908	1.101
Leverage	.922	1.084
Struktur Kepemilikan	.981	1.019

Sumber: Data diolah dari SPSS 21  
 Data ini sudah melalui tahap *outlier*

Dari tabel 13 di atas, dapat diketahui bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel independen memiliki nilai kurang dari 10 ( $VIF < 10$ ) yaitu pada variabel Dewan Komisaris dan nilai Tolerance untuk seluruh variabel independen memiliki nilai lebih dari 0.10. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel Dewan Komisaris, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan tidak saling berhubungan ataupun tidak terkait satu sama lain sehingga model regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan multikolinieritas.

## Uji Autokorelasi

Tabel 14. Hasil Uji Autokorelasi  
*Model Summary*<sup>b</sup>

<i>Model</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	1.503

a. *Predictors: (Constant), Struktur Kepemilikan, Leverage, Dewan Komisaris*

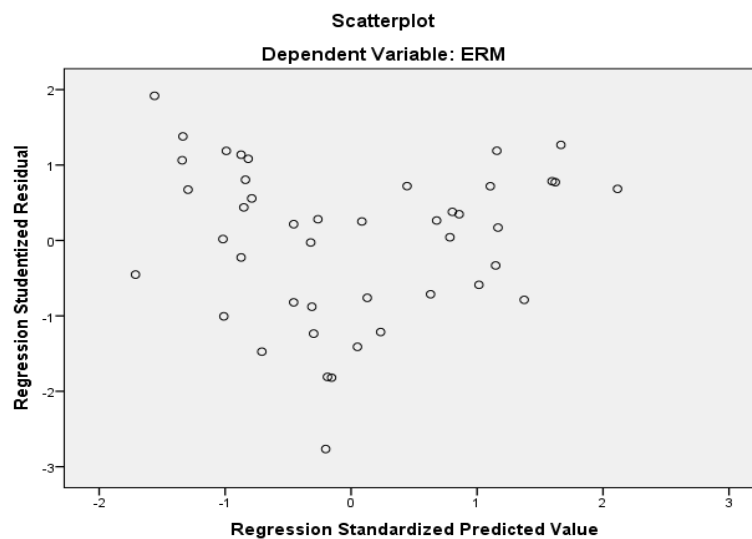
b. *Dependent Variable: Enterprise Risk Management*

Sumber: Data diolah dari SPSS 21

Data ini sudah melalui tahap *outlier*

Dari tabel 14 diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) diperoleh sebesar 1,503. Dimana angka Durbin-Watson (DW) berada diantara -2 dan +2, hal ini menunjukkan bahwa antara data tahun 2013, 2014, dan 2015 untuk variabel Dewan Komisaris, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan tidak saling berhubungan atau tidak terkait antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya sehingga model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

## Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah dari SPSS 21

Data ini sudah melalui tahap *outlier*

Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 5 diatas untuk hasil pengujian heteroskedastisitas pada pengujian terhadap 44 data menunjukkan bahwa seluruh variabel sudah tidak teridentifikasi adanya heteroskedastisitas yang ditunjukkan dengan tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar acak di atas dan dibawah pada angka 0 pada sumbu Y dalam grafik scatterplot. Hal ini berarti bahwa nilai data telah bebas dari heteroskedastisitas dan model regresi layak di pakai untuk memprediksi variabel dependen (Pengungkapan *Enterprise Risk Management*) berdasarkan masukan sejumlah variabel independen (Dewan Komisaris, *Leverage*, Struktur Kepemilikan).

**Uji Hipotesis**  
**Uji Simultan (Uji F)**

Tabel 15. Hasil Uji Simultan  
**ANOVA<sup>a</sup>**

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>	
1	<i>Regression</i>	.039	3	.013	4.006	.014 <sup>b</sup>
	<i>Residual</i>	.130	40	.003		
	<i>Total</i>	.169	43			

a. *Dependent Variable: Enterprise Risk Management*

b. *Predictors: (Constant), Struktur Kepemilikan, Leverage, Dewan Komisaris*

Sumber: Data diolah dari SPSS 21

Data ini sudah melalui tahap *outlier*

Dari tabel 15 di atas, dengan menggunakan tabel distribusi F dengan taraf signifikansi 0.05 maka diperoleh Ftabel sebesar 2,84 dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa Fhitung 4,006 > Ftabel 2,84 dengan tingkat signifikan 0,014 < 0.05. Hal ini berarti bahwa H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan secara bersama – sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

**Uji Parsial (Uji t)**

Tabel 16. Hasil Uji Parsial  
**Coefficients<sup>a</sup>**

<i>Model</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	
1	<i>(Constant)</i>	3.783	.001
	<i>Dewan Komisaris</i>	2.898	.006
	<i>Leverage</i>	-1.034	.307
	<i>Struktur Kepemilikan</i>	-.564	.576

a. *Dependent Variable: Enterprise Risk Management*

Sumber: Data diolah dari SPSS 21

Data ini sudah melalui tahap *outlier*

Dari tabel 16. di atas dapat diketahui bahwa variabel independen Dewan Komisaris memiliki t<sub>hitung</sub> 2,898 > t<sub>tabel</sub> 2,0210 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 < 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Variabel independen *Leverage* memiliki t<sub>hitung</sub> -1,034 < t<sub>tabel</sub> 2,0210 dengan nilai signifiknasi sebesar 0,307 > 0,05. Hal ini berarti Ho diterima dan Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprisde Risk Management*.

Variabel independen Struktur Kepemilikan memiliki t<sub>hitung</sub> -1,564 < t<sub>tabel</sub> 2,0210 dengan nilai signifikansi 0,576 > 0,05. Hal ini berarti Ho diterima dan Ha ditolak



sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Struktur Kepemilikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 17. Hasil Uji Koefisien Determinasi  
*Model Summary*<sup>b</sup>

<i>Model</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	.231	.173

a. *Predictors: (Constant), Struktur Kepemilikan, Leverage, Dewan Komisaris*

b. *Dependent Variable: Enterprise Risk Management*

Sumber: Data diolah dari SPSS 21

Data ini sudah melalui tahap *outlier*

Dari tabel 17 diatas, menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,173 atau 17,30%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase kemampuan variabel independen yaitu Dewan Komisaris, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan dalam menjelaskan variabel dependen yaitu Pengungkapan *Enterprise Risk Management* adalah sebesar 17,30%, sedangkan sisanya sebesar 82,70% dijelaskan oleh variabel lain seperti Komisaris Independen, Reputasi Auditor, *Risk Management Committee* dan Ukuran Perusahaan.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada variabel independen yaitu Dewan Komisaris, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan terhadap variabel dependen yaitu Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) secara simultan menunjukkan bahwa  $F_{hitung} 4,006 > F_{tabel} 2,84$  dengan tingkat signifikan  $0,014 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel Dewan Komisaris, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM).

Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Anggota dewan komisaris menambah peluang untuk saling bertukar informasi dan keahlian guna memberikan pengawasan yang efektif mengenai manajemen risiko perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas *Enterprise Risk Management*. Hasil penelitian variabel independen Dewan Komisaris mendukung penelitian sebelumnya yaitu Jatiningrum dan Fauzi (2012) serta penelitian Husaini, dkk (2013) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

*Leverage* berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Hal ini dapat disebabkan karena tingkat *Leverage* yang tinggi menandakan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam melunasi hutang serta bunganya. Oleh karena itu, perusahaan cenderung hati-hati dalam melakukan aktivitasnya sehingga perusahaan berusaha untuk mengurangi aktivitas yang sifatnya tidak optimal. Hasil penelitian variabel independen *Leverage* mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syifa (2013) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Struktur Kepemilikan berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Hal ini dapat disebabkan karena perusahaan yang memiliki Struktur Kepemilikan yang terkonsentrasi menimbulkan kegiatan pengawasan secara optimal yang dilakukan oleh pemegang saham terbesar terhadap kinerja manajemen perusahaan tempat mereka berinvestasi karena dapat mengendalikan perilaku manajemen dalam memberikan standar kinerja manajemen yang tinggi. Hal tersebut dapat mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashuri *et al.*, (2014) yang menyatakan bahwa Struktur Kepemilikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013 sampai dengan 2015.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara simultan diperoleh hasil bahwa Dewan Komisaris, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
- b. Secara individual (parsial) diperoleh bahwa variabel independen yaitu Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Variabel independen kedua yaitu *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak. Variabel independen ketiga yaitu Struktur Kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management*, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak.
- c. Melalui uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,173 atau 17,30%. Hal ini menunjukkan bahwa 17,30% Pengungkapan *Enterprise Risk Management* dapat dijelaskan oleh variabel Dewan Komisaris, *Leverage*, dan Struktur Kepemilikan sedangkan sisanya sebesar 82,70% Pengungkapan *Enterprise Risk Management* dijelaskan oleh variabel lain seperti *Chief Risk Officer*, Reputasi Auditor, *Risk Management Committee*, dan Ukuran Perusahaan.

## Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya  
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi sampel lain untuk menggambarkan *Enterprise Risk Management* pada sektor perusahaan lain. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan data primer berupa survey dalam bentuk kuisioner agar data yang dihasilkan lebih akurat.
- b. Bagi manajemen perusahaan  
Manajemen perusahaan disarankan untuk mengungkapkan informasi secara luas dan jelas agar para pengguna laporan keuangan dapat lebih memahami informasi yang

terdapat di dalam laporan keuangan dan laporan tahunan yang disajikan serta lebih memperhatikan manajemen risiko perusahaan serta pengendalian internal perusahaan dalam mengungkapkan berbagai risiko yang terjadi baik untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan pengungkapan risiko lainnya yang dianggap penting untuk bisa menjadi bahan pertimbangan serta untuk mewujudkan *good corporate governance*

c. Bagi investor

Bagi investor disarankan untuk lebih memperhatikan manajemen risiko yang diungkapkan perusahaan. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi

## DAFTAR PUSTAKA

\_\_\_\_\_, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

Andarini, P., & Januarti, I. (2010). Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risk Management Committee (RMC) pada Perusahaan *go public* Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*, hlm. 1-27

Anggiawan, F. (2014). *Okezone.com*. 4 Tersangka Kasus BSM Dilimpahkan ke Kejaksaan. Diakses 19 Februari 2014. Dari <http://news.okezone.com/read/2014/02/18/339/943005/4-tersangka-kasus-bsm-dilimpahkan-ke-kejaksaan>

Ashuri, N.N., & Asadpour, A.A. (2014). The impact of board composition, audit fees, and ownership concentration on risk management of listed companies in tehran exchange. *Academic Journal of Accounting and Economic Researches*, Vol. 3 No.1 Page 1-9.

Carolin, A.I., & Wardhani, R. (2011). The Effect of Accounting Disclosure, Concentrated Ownership, and Accounting Harmonization to Earnings Quality: The Case of Asia Pacific. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*. 21-22 Juli 2011.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2004). *Enterprise Risk Management-Integrated Framework Executive Summary*. Diakses 20 September 2016. Dari [http://www.coso.org/documents/coso\\_erm\\_executivesummary.pdf](http://www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary.pdf).

Effendi, M.A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi*. Edisi 2, Jakarta : Salemba Empat.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 2*, Semarang : Universitas Diponegoro.

- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). *Accounting Theory*, United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Gubernur Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance*.
- Gubernur Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*.
- Harahap, SS. (2013). *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi 2011, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Houston, F ., & Brigham, F. (2011). *Dasar - Dasar Management Keuangan*, Edisi 11, Jakarta : Salemba Empat.
- Husaini, S., Fadli, A & Aisyah. (2013). Corporate Governance and *Enterprise Risk Management* : An Empirica Evidence from The Unique Two-Tier Boards System of Indonesia Public Listed Companies.*Proceedings of World Business and Social Science Research Conference*.
- Jatiningrum & Fauzi. *Pengaruh Corporate Governance dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan Enterprise Risk Management*. Di akses 10 Maret 2014. Dari <http://feakuntansi.unila.ac.id/2010/download/prosiding-pdf/2.pdf>
- Kasmir.(2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4, Jakarta : PT. Rajafindo Persada.
- Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor Kep-11/PM/1997 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Menengah atau Kecil*
- Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor Kep-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik*
- Kumalasari, M., Subowo., & Anisykurillah, I. (2014). Faktor - faktor Yang Berpengaruh Terhadap Luas Pengungkapan Manajemen Risiko. *Accounting Analysis Journal*. Vol.3 No.1.
- Lam, J. (2007). *Enterprise Risk Management Panduan Komprehensif bagi Direksi, Komisaris, dan Profesional Risiko*, Jakarta: PT. Ray Indonesia.
- Meizaroh & Lucyanda, J. (2011). Pengaruh Corporate Governance dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan Enterprise Risk Management. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*. 21-22 Juli 2011. hlm.1-30.
- Onder, S., & Ergin, H. (2012). Determiners of *Enterprise Risk Management* applications in turkey : an empirical study with logistic regression model on the

companies included in ise (istanbul stock exchange). *BEH - Business and Economic Horizons*. Vol.7 No. 1. Page 19-26.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Bank Usaha Milik Negara

Prayoga, EB & Amilia, LS. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol. 4 No. 1. hlm. 1 - 19.

Sari F, J. (2013). Implementasi *Enterprise Risk Management* pada Perusahaan Manufaktur Indonesia *Lag. Accounting Analysis Journal*. Vol.2 No.2.

Sunyoto, D. (2011). Analisis Regresi dan Uji Hipotesis, Cetakan Pertama. Yogyakarta: CAPS

Syifa, L. (2013). Determinan Pengungkapan *Enterprise Risk Management* Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*. Vol.2 No.3. hlm. 286-294.

Syukur, M. (2014). *Liputan6.com*. Kredit Fiktif 3 Eks Pejabat BNI Pekanbaru di Vonis 9 Tahun Bui. Diakses 12 September 2014. Dari <http://news.liputan6.com/read/2104642/kredit-fiktif-3-eks-pejabat-bni-pekanbaru-divonis-9-tahun-bui>